

Dr. Mulyaningsih, M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Program Studi Administrasi Negara UNIGA lahir di Bandung tanggal 14 Agustus 1962. Telah menulis buku Budaya Organisasi, Karakter Berbagi sebagai Landasan Menghadapi Indonesia Future Shock, Perilaku Birokrat, Efektivitas Organisasi dan Etika Bisnis Penelitian fokus pada budaya yang telah diterbitkan di beberapa jurnal internasional bereputasi. Mulyaningsih juga sebagai Direktur CV KIMFA MANDIRI.

CV. KIMFA MANDIRI

ISBN 978-602-50828-1-8

9 786025 082818

Pembangunan Ekonomi

Dr. Mulyaningsih, M.Si

Pembangunan Ekonomi



Dr. Mulyaningsih, M.Si

Pembangunan Ekonomi

Dr. Mulyaningsih, M.Si

PEMBANGUNAN EKONOMI

Penulis:
Dr. Mulyaningsih, M.Si

ISBN: 978-602-50828-1-8

Editor:
Nina Kania, M.Si

Penyunting:
Desi Destrianingsih, SE

Desain Sampul dan Tata letak:
Devsev Desain

Penerbit:
CV KIMFA MANDIRI

Redaksi:
Jl. Ciapus RT 001 RW 006 Desa Ciapus
Kec Banjaran Kab Bandung 40377
No Tlp: 022 – 88883057 / 082217220165-081220816826
Fax: -
Email: kimfamandiriks@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan Ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan sektor ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah.

Bandung, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI iv

BAB I
PENDAHULUAN.....1
BAB II
PERTUMBUHAN EKONOMI..... 10
BAB III
PEREKONOMIAN DUNIA..... 84
BAB IV
PEMBANGUNAN EKONOMI 129
BAB V
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN
ADMINISTRASI 183

DAFTAR PUSTAKA.....265
DAFTAR PUSTAKA.....268

BAB I

PENDAHULUAN

Perhatian Terhadap Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bukanlah sebuah topik baru dalam ilmu ekonomi, Adam Smith misalnya, telah menyinggung berbagai aspek tentang pembangunan ekonomi dalam karya fenomenalnya yang berjudul *The Welth Of Nations*. Akan lebih tepat jika kita mengatakan bahwa analisis tentang masalah pembangunan yang dilakukan oleh para ekonom sekarang ini merupakan suatu "kebangkitan kembali" untuk memperhatikan masalah-masalah yang dianalisis oleh para ekonom terdahulu.

Konsep Ekonomi Pembangunan tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Ekonomi Pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

Pembangunan Ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Setiap negara akan memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi.

Pembangunan Ekonomi akan menjadi sebuah perhatian karena akan terkait kepada beberapa masalah yang dihadapi negara yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi akan menjadi perhatian karena adanya kekurangan negara dalam beberapa faktor.

Kurangnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor (*meier & Rouch*, 2000) antara lain:

1. Pertama, pada masa sebelum PD II sebagian negara sedang berkembang (NSB) masih merupakan negara jajahan.
2. Kedua, kurangnya usaha dan perhatian dari para pemimpin masyarakat negara-negara jajahan untuk membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi.
3. Ketiga, di kalangan para ekonom sendiri, perhatian dan analisis tentang masalah pembangunan ekonomi (masalah ekonomi jangka panjang) masih terbatas.

Bantuan dari negara-negara maju tersebut sifatnya bermacam-macam, bantuan tersebut bentuknya antara lain bantuan teknik dan tenaga ahli, bahan makanan, obat-obatan dan lain-lain. Pemikiran di atas tidak terlepas dari konsep pembangunan.

Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, adapun tujuan nasional Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat, yakni: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic*

growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi serta berbagai krisis lainnya yang berpengaruh pada multi kehidupan salah satunya adalah kemiskinan. Dampak dari krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut, penyebabnya adalah karena terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Tidak kurang sekitar 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan akibat dari dampak globalisasi ternyata tidak dapat diterapkan secara optimal pada negara berkembang dan menyebabkan negara tersebut menderita akibat jeratan hutang luar negeri yang membesar. Pertumbuhan ekonomi justru tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya diperlukan revisi agenda pembangunan, yakni pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Adanya kebijakan pembangunan sangat memegang peranan penting. Kebijakan di negara berkembang sangat dipengaruhi berbagai faktor dan kondisi dari negara yang bersangkutan termasuk administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan alat yang mampu menjelaskan secara sistematik proses dari sebuah pembangunan.

Tanpa adanya sistem administrasi pembangunan yang baik pembangunan tidak akan berjalan baik atau bahkan kacau. Dengan demikian, upaya pembaruan birokrasi atau dalam bahasa lain reformasi birokrasi adalah suatu hal yang mutlak untuk segera dilakukan. Kelemahan utama selama ini adalah birokrasi kita yang sangat birokratik sehingga urusan menjadi tidak efisien dan sangat lama. Ada lima ciri administrasi yang umumnya ditemukan di negara

berkembang. Pertama, pola dasar *(basic pattern*) administrasi publik di Indonesia bersifat jiplakan *(imitative)* dari pada asli *(indegenous*). Di negara-negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara yang pernah dijajah umumnya mengikuti pola administrasi negara yang menjajahnya oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi akan selalu berdekatan dengan berbagai kebijakan termasuk kebijakan di negara Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini mengalami kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das solen*) dan apa kenyataannya (*das sein*). Orientasi pembangunan ekonomi Indonesia telah menyimpang dari ideal Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan yang paling mencolok adalah kebijakan pemerintah yang pro pasar daripada pro rakyat. Beberapa tahun lalu pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang setelah melalui perdebatan alot di DPR, akhirnya diputuskan bahwa BBM tetap naik tetapi diundur waktunya dalam tempo enam bulan. Pemerintah berdalih bahwa kenaikan itu merupakan penyesuaian terhadap harga internasional. Kenaikan harga BBM akan menciptakan efek domino di hampir segala bidang yang secara otomatis akan membuat beban di pundak rakyat kian berat.

Untuk menangkis kritik, pemerintah berargumentasi dengan menyodorkan angka-angka. Menurut data statistik, tahun 2010 perekonomian nasional tumbuh 6,1%, sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 6,5%. Ini merupakan pencapaian tertinggi setelah reformasi, dengan inflasi terendah pula setelah reformasi yaitu 3,79%. Padahal, menurut Faisal Basri pola pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi sangat berbeda. Pertumbuhan sektor *tradeable* yakni sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan pada tahun 2007 hanya sebesar 2,8%, sedangkan sektor *non-tradeable* (industri jasa di kota besar) tumbuh 9%.

Menurutnya, hal ini akan mengakibatkan sulitnya memerangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

Bertolak belakang dengan temuan para pakar, pemerintah begitu bangga dengan turunnya angka kemiskinan sebesar 0,53% pada tahun 2011. Padahal angka tersebut merupakan angka kemiskinan absolut, sementara kemiskinan relatif malah semakin tinggi. Dari hasil analisis, diperoleh data bahwa 20% dari penduduk Indonesia menguasai 48% pendapatan domestik bruto, sedangkan mayoritas 80% menguasai 52% pendapatan domestik bruto. Artinya, pemerataan pendapatan masih jauh dari kenyataan. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan seberapa besar 'kue ekonomi' dinikmati oleh masyarakat. Semakin pincang distribusinya, semakin tidak berarti indikator tersebut.

Optimisme mengenai kondisi ekonomi Indonesia juga didasarkan pada indikator pendapatan per kapita. Pemerintah mencatat pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia yang terus naik. Saat ini pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah 3.500 dolar Amerika. Dengan kata lain, tingkat kemakmuran penduduk Indonesia sudah lumayan tinggi. Namun pada kenyataannya, angka tersebut sama sekali tidak merepresentasikan sebagian besar golongan kelas bawah. Angka pendapatan per kapita bukanlah indikator yang bagus untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena tidak menunjukkan realitas yang sebenarnya.

Dalam perkembangannya, pemerataan pembangunan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Ketika demokrasi politik bergulir pasca tumbangnya rezim Orde Baru, demokrasi ekonomi masih mencari bentuk. Namun celakanya, pemerintahan era reformasi masih melanjutkan tradisi ekonomi liberal/kapitalis daripada melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945. Meskipun telah digariskan dalam Tap-Tap MPR dan UU tentang Propenas yang berintikan gagasan populisme/kerakyatan. Ulasan-ulasan mengenai

bagaimana menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan sudah banyak. Sebagian besar karya tersebut lebih berorientasi praktis ketimbang teoritis.

Fahmi Radhi menyodorkan tiga strategi untuk menerapkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil. *Pertama*, penanggulangan kemiskinan berupa pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan. *Kedua*, memfokuskan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penciptaan iklim industri yang kondusif, pembentukan lembaga keuangan untuk UMKM, dan bantuan teknis pendampingan. *Ketiga*, pengembangan kawasan yakni pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Revrisond Baswir mengemukakan tujuh langkah strategis sebagai agenda jangka panjang implementasi kebijakan ekonomi kerakyatan.

Ketujuh langkah strategis itu adalah: *pertama*, penghapusan utang luar negeri; *kedua*, disiplin pengelolaan keuangan negara; *ketiga*, demokratisasi pengelolaan BUMN; *keempat*, meningkatkan alokasi sumber penerimaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; *kelima*, perlindungan hak para pekerja dan peningkatan partisipasi pekerja dalam perusahaan; *keenam*, pembatasan penguasaan dan redistribusi kepemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap; dan *ketujuh*, pembaharuan UU koperasi dan pembentukan koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Sementara Ida Ayu Nyoman Saskara mengemukakan tiga rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yaitu kembali ke sistem ekonomi Pancasila, pendekatan institusional yaitu sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, akses permodalan, teknologi, dan akses pasar, serta membangun sinergi antara ekonomi rakyat dan korporasi swasta nasional.

Dari beberapa ulasan di atas, tak satupun yang berangkat dari

analisis ekonomi-politik global. Kebijakan pemerintah seolah-olah tak tertembus oleh eksistensi tren ekonomi dunia. Kesimpulan yang dapat ditarik keseluruhannya bercorak ekonomi sehingga menghasilkan rekomendasi yang menafikan peran ideologi rezim berkuasa. Bagaimanapun juga, lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang turut berpengaruh pada preferensi kebijakan domestik. Meskipun rekomendasi yang ditawarkan cukup canggih, namun prakondisi yang mendahului rekomendasi itu diabaikan (epifenomena). Persepsi pemerintah terhadap situasi ekonomi internasional pada gilirannya mempengaruhi bagaimana pemerintah menyusun prioritas kebijakan ekonomi nasional yang tentunya akan berdampak pada masyarakat luas. Tulisan ini akan mencoba mengisi celah kosong tersebut dengan harapan memberi cakrawala berpikir yang lebih holistik dalam dunia tanpa sekat-sekat tradisional sekarang ini.

Permasalahan seputar inkonsistensi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini dan memberikan saran untuk keluar dari permasalahan tersebut. Penyimpangan itu sudah terlalu akut dan perlu segera dibenahi agar kesejahteraan masyarakat luas sebagai sasaran pokok pembangunan bisa dicapai. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini adalah kebijakan ekonomi yang terlampau berorientasi keluar (*outward looking*) sehingga mengikis kesadaran ekonomi berbasis kerakyatan (*inward looking*). Pemujaan terhadap globalisasi ekonomi yang menuntut keterlibatan dalam forum ekonomi multilateral serta ketertundukkan pada pasar dunia membuat kebijakan ekonomi Indonesia tidak berpijak pada nasionalisme ekonomi. Negara seolah-olah kehilangan tanggung jawab untuk meratakan kesejahteraan rakyatnya. Kultur globalisme menggantikan Pancasila sebagai ideologi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya isu globalisasi dan yang akan mengarah pada revolusi industri merupakan sebuah

kondisi yang tidak mudah bagi Sumber Daya Manusia Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara yang telah maju juga dengan negara-negara Asia. Pada tahun 2020 negara-negara di Asia akan mengalami kondisi yang Shock (Bacham, 2008). Dengan demikian Indonesia perlu adanya perubahan pola pikir sebagai basic berusaha secara profesional bagi sumber daya manusia Indonesia yang sudah memiliki modal dasar filosofis kearifan lokal yang mampu menjadi karakteristik budaya organisasi sharing sebagai dasar kultur untuk menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara juga menjalankan usaha bisnis di berbagai bidang serta menjalankan kegiatan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya yang mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia.

> *Cultural Characteristics strategic HR organization owned by Indonesia should be able as a tool to support the implementation of development progress through the skills measured by the capacity of organized entrepreneurship that makes HR Indonesia as a 'model of sharing' (sharing) and agent of change (Agents of Change) of reconstruction values contained in Pancasila as the noble values of the positive character of the Indonesian nation through the results of research studies on level Sunda namely; "sarendek saig e ul sabobot sapihane a n, silih asah silih asih silih asuh, silih simbeuh and identity, Involvement; participate actively, consistency is to run mission; keserempakan work, the level of creativity. Sharing is a behavior, concepts, ideas and ways of containing the following meanings: "share" (English: sharing) are jointly use of resources or space. In the narrow sense refers to the use of either a merger or an inherently limited alternatives, we can observe the effect of human activity naturally.*
>
> (Mulyaningsih,2015)

Secara strategis Karakteristik Budaya organisasi yang dimiliki SDM Indonesia harus mampu sebagai alat pendukung implementasi

kemajuan pembangunan melalui kemampuan yang terukur dengan memiliki kapasitas *organized entrepreneurship* yang menjadikan SDM Indonesia sebagai 'model berbagi' (*sharing*) dan agent perubahan (*Agent of Change*) dari rekontruksi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai nilai luhur dari karakter positif yang dimiliki bangsa Indonesia melalui hasil kajian penelitian di tataran sunda yaitu ;*"sarendek saigeul sabobot sapihanean, silih asah silih asih silih asuh silih simbeuh* serta identitas, Involvement; turut aktif, *consistency* yaitu untuk menjalankan *mission*; keserempakan kerja, tingkat kreativitas. Berbagi adalah perilaku, konsep, pemikiran dan cara yang mengandung arti sebagai berikut: "berbagi" (bahasa inggris:*sharing*) adalah pemakaian secara bersama atas sumber daya atau ruang. Dalam arti sempit merujuk pada sebuah penggabungan penggunaan secara baik alternatif terbatas atau inheren, dapat kita amati dalam aktivitas manusia yang berlaku secara alami.

Dengan pemikiran berbagi merupakan sikap baik atau tindakan yang selama ini sudah terdapat di kalangan organisasi masyarakat Indonesia, termasuk dalam keanggotaan masyarakat Indonesia yang terkecil yaitu keluarga. Karakteristik Budaya organisasi SDM Indonesia merupakan alat bagi para pakar pendidik atau yang menaruh perhatian terhadap pendidikan, perencana pengembangan sumber daya manusia serta pengusaha guna mengambil keputusan yang tepat dalam kebijakan pengelolaan SDM secara konsisten memanfaatkan potensi SDM pada pola membangun filosofi menangkal persoalan bangsa khususnya dalam menghadapi ASIAN Future Shock tahun 2020 dengan metode pendekatan budaya sebagai dasar pemahaman membangun karakter manusia yang komitmen pada prinsip *think globally act locally* sebagai citra bangsa secara terus menerus dan berkelanjutan ke arah perbaikan kualitas bangsa dalam lingkaran kebijakan nasional.

BAB II

PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam era globalisasi seperti saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Identifikasi suatu negara apakah termasuk sebagai negara maju atau negara berkembang dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan hasil pembangunannya. Suatu negara tergolong negara maju atau negara berkembang ditentukan tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapita negara tersebut. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti pertumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, angka kelahiran dan kematian, angka harapan hidup dan sebagainya.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331) "pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat". Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi

akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi akan dimulai dengan dilakukan sebuah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki indikator pembangunan. Ada beberapa indikator pembangunan.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi

yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

b. Organisasi

Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa ke arah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa ke arah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

c. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

d. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang

selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

a. Tingkat ketergantungan pada sektor primer
b. Peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
c. Pembangunan infrastruktur
d. Kualitas sumber daya manusia
e. Tabungan masyarakat
f. Belanja pemerintah daerah

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011: 335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut:

a. Teori Sollow Swan

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan.

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

b. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja.

3. Agen Pertumbuhan

a. Pengusaha
b. Investor
c. Penabung
d. Inovator

Kegiatan tersebut membantu pertumbuhan sehingga memunculkan :

a. Kewiraswastaan
b. Peningkatan sumber pengetahuan

c. Pengembangan keterampilan produktif masyarakat
d. Peningkatan laju tabungan dan investasi

4. Rangsangan Pertumbuhan

a. Rangsangan ZERO-SUM
   1) Tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi bersifat upaya distributif
   2) Kegiatan bukan dagang ; posisi monopolistik, kekuatan politik & prestise sosial
   3) Kegiatan dagang, tidak menambah sumber agregat
   4) Kegiatan spekulatif, memboroskan sumber kewiraswastaan yang langka

Kegiatan tabungan netto ; nilai sosial nibil / lebih rendah dari privatnya.

b. Rangsangan POSITIVE-SUM
   Menuju pada pengembangan pendapatan nasional

Dalam ekonomi terbelakang, ada pengaruh bersifat anti perubahan yang menekan pendapatan per kapita :

a. Kegiatan usaha ZERO-SUM, pembatasan peluang ekonomi
b. Tindakan konservatif para buruh yang terorganisir menentang perubahan
c. Perlawanan terhadap gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengetahuan
d. Kenaikan pengeluaran konsumsi mewah pribadi/publik ; tidak produktif
e. Pertumbuhan penduduk & Angkatan buruh.

Upaya minimum kritis mengatasi pengaruh perekonomian terbelakang agar laju pertumbuhan ekonomi merangsang POSITIVE-SUM menjadi lebih besar dari ZERO-SUM, sehingga pendapatan per

kapita naik, tabungan & investasi naik, yaitu :

1) Ekspansi agen pertumbuhan
2) Sumbangan masyarakat terhadap per unit modal naik seiring rasio modal output turun.
3) Berkurangnya keefektifan faktor-faktor penghambat pertumbuhan
4) Penciptaan kondisi lingkungan dan sosial ; mobilitas ekonomi dan sosial naik.
5) Peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier.

A. NEGARA MAJU

1. Pengertian negara maju dan berkembang

Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Negara yang digolongkan sebagai negara maju terdapat di benua Eropa terutama kawasan Eropa Barat serta Amerika (Utara) Misalnya Belanda, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Di kawasan Asia terdapat beberapa negara maju seperti Jepang, Australia, Korea Selatan dan Selandia Baru.

2. Indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju/ negara berkembang

a. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Namun demikian, tingginya pendapatan per kapita bukan penentu kemakmuran suatu negara. Meskipun negara itu pendapatan per kapitanya tinggi, namun jika terjadi perang saudara di dalam negara tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai negara

makmur/sejahtera. Karena dengan adanya peperangan banyak menimbulkan kematian, penderitaan, dan rasa tidak aman.

b. Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara dikatakan makmur/sejahtera apabila rakyatnya yang hidup miskin berjumlah sedikit saja.

c. Tingkat Pengangguran

Salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah tingkat pengangguran. Di negara maju umumnya tingkat penganggurannya rendah. Sebaliknya di negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya tinggi.

d. Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan

Salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Di negara maju umumnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah. Hal ini disebabkan penduduk mampu membeli makanan yang bergizi, mampu membeli pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Sebaliknya di negara berkembang angka kematian bayi dan ibu melahirkan relatif tinggi. Hal ini disebabkan penduduk tidak mampu membeli makanan yang bergizi, tidak mampu membeli pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai, karena pendapatannya rendah.

e. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis. Suatu negara dikatakan maju apabila angka melek hurufnya tinggi atau angka buta hurufnya rendah.

3. Ciri-ciri Negara Maju dan Berkembang

Ciri-ciri negara maju

a. Sumber Daya Alam Dimanfaatkan secara Optimal
b. Dapat Mengatasi Masalah Kependudukan.
c. Tingkat dan Kualitas Hidup Masyarakat Tinggi
d. Ekspor yang Dilakukan adalah Ekspor Hasil Industri dan Jasa
e. Tercukupinya Penyediaan Fasilitas Umum
f. Kesadaran Hukum, Kesetaraan Gender, dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi
g. Tingkat Pendidikan Relatif Tinggi
h. Tingkat Pendapatan Penduduk Relatif Tinggi
i. Tingkat Kesehatan Sudah Baik

Permasalahan yang Sering Timbul di Negara Berkembang dengan negara maju

Setiap negara pastilah mempunyai permasalahan, tidak mungkin jika tidak memiliki permasalahan baik negara maju maupun negara berkembang. Perbedaannya, negara maju lebih memiliki sedikit permasalahan daripada negara berkembang jika dilihat dari berbagai sisi. Apa saja permasalahan yang ada di negara berkembang? Berikut ini adalah ulasannya masalah yang dihadapi oleh Negara Indonesia, yaitu :

a. Penduduk

Permasalahan utama dari negara berkembang adalah pertumbuhan penduduknya yang tidak terkendali. Hal ini akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit.

b. Ekonomi

Keadaan perekonomian di negara berkembang biasanya masih semrawut. Banyak pengangguran di negara berkembang,

penyebabnya adalah kurangnya kesempatan kerja dan juga kualitas SDM yang masih rendah.

c. Pendidikan

Pendidikan di negara berkembang tidak merata dan masih banyak orang yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Hal ini karena kelebihan jumlah penduduk di negara berkembang.

d. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di negara berkembang masih sangat kurang. Hal ini juga didukung oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang menjaga kebersihan, sehingga masih banyak orang yang sakit.

e. Infrastruktur

Biasanya negara berkembang memiliki luas wilayah yang lebih besar daripada negara maju, namun infrastrukturnya kurang. Hal ini karena kekurangan anggaran yang dimiliki oleh negara berkembang.

f. Hukum

Penegakan hukum di negara berkembang masih kurang. Hal ini didukung dengan kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri masih rendah, sehingga masih banyak ditemukan berbagai permasalahan hukum.

g. Tingkat Produksi

Hasil produksi di negara berkembang masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat produktivitas yang rendah dan juga kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Industrinya biasanya menggunakan tenaga manusia sehingga kalah dengan yang menggunakan mesin.

h. Kualitas penduduk

Kualitas penduduk rata-rata di negara berkembang masih rendah. Hal ini didukung dengan pendidikan yang masih tidak merata.

i. Ketidakmerataan Hasil Pembangunan

Kekurangan infrastruktur membuat hasil pembangunan menjadi

tidak merata, hanya terpusat di wilayah ibukota saja. Hal ini didukung dengan ketidakmerataan penghasilan masyarakat.

j. Ketergantungan pada Luar Negeri

Negara berkembang masih kekurangan dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Banyak barang yang mengandalkan produksi negara lain sehingga melakukan impor dari luar negeri. Selain itu kecintaan penduduk akan produk dalam negeri masih kurang sehingga lebih memilih barang impor.

Nah itulah berbagai permasalahan yang dihadapi negara maju, dan pada kenyataannya mungkin akan lebih banyak lagi. Semoga artikel ini bermanfaat.

4. Tahapan-tahapan Perkembangan suatu negara

a. Tahap Perekonomian Tradisional

Pada tahap ini, kegiatan ekonomi masih berorientasi pada usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Penerapan teknologi dan manajemen masih sangat rendah sehingga produktivitasnya juga masih rendah. Adapun ciri-ciri tahap perekonomian tradisional sebagai berikut.

1) Tingkat produksi dan produktivitas per pekerja masih sangat rendah, karena belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
2) Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian.
3) Struktur sosial masih bersifat hierarkis.
4) Hubungan keluarga masih sangat erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas.
5) Masyarakat pada masa ini cenderung statis, sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat.

b. Tahap Pra-Lepas Landas

Masyarakat tradisional meskipun sangat lambat namun

terus bergerak, dan pada suatu titik mencapai prakondisi untuk lepas landas. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar, yaitu dari masyarakat yang lebih maju. Tahap ini merupakan masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai tahap lepas landas. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat lepas landas adalah adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan sistem nilai. Pada masa transisi ini merupakan masa yang penting supaya berhasil pada tahap lepas landas.

c. Tahap Lepas Landas (Take Off)

Tahap lepas landas merupakan tahap dimana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Pada tahap ini penerapan teknologi dan manajemen modern makin luas dan intensif. Selain itu, terjadi perubahan drastis di bidang sosial maupun politik, serta terciptanya kemajuan ekonomi yang pesat karena inovasi-inovasi dan terbukanya pasar-pasar baru. Semua itu dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional di atas tingkat pertambahan penduduk. Ciri-ciri negara yang sudah lepas landas adalah:

1) Meningkatkan jumlah investasi dari ≤5% menjadi ≥10% dari Produk Nasional Neto,
2) Laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi, sehingga dapat memacu sektor-sektor lain,
3) Terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri, serta
4) Masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kisaran waktu 20 tahun.

d. Tahap Kedewasaan (Maturity)

Tahap ini merupakan suatu periode dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Pada masa ini sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan *leading* industri mengalami kemunduran tetapi digantikan oleh sektor lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak setinggi tahap lepas landas, namun diimbangi pertumbuhan hal-hal kualitatif sehingga perekonomian makin kuat dan mandiri. Setelah lepas landas, kemajuan akan terus bergerak walaupun kadang terjadi pasang surut. Industri berkembang dengan pesat dan mulai memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor. Pada tahap ini terjadi tiga perubahan penting, yaitu:

1) Tenaga kerja menjadi lebih terdidik,
2) Watak pekerja berubah dari pekerja kasar menjadi manajer yang efisien dan berwatak halus serta sopan, serta
3) Masyarakat mulai jenuh dengan kemajuan industri dan mulai menginginkan sesuatu yang baru.

e. Tahap Konsumsi Massa Tingkat Tinggi (High Mass Consumption)

Pada tahap ini, tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Ciri-ciri tahap ini adalah:

1) Angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik,
2) Tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai,
3) Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia.

Karena pendapatan masyarakat yang meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat ke kebutuhan

yang lebih tinggi. Pada tahap ini merupakan ciri-ciri dari sebuah massa yang ideal di mana masyarakat hidup nyaman, sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga sehingga jumlah penduduk akan meningkat.

Teori Rostow ini didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Pada tahap-tahap tersebut yang paling penting dalam gerak kemajuan dari tahap satu ke tahap yang lain adalah pada periode tahap lepas landas. Proses perubahan tahap yang satu ke tahap yang lain memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar.

f. Contoh Negara Maju dan Berkembang

Negara Maju :
Anggota Uni Eropa:

Austria	Jerman	Belanda
Belgia	Yunani	Portugal
Denmark	Irlandia	Spanyol
Finlandia	Italia	Swedia
Perancis	Luxemburg	Britania Raya

Negara non-UE:

Andorra	Monako
Hongaria	Norwegia
Islandia	San Marino
Liechtenstein	Swiss
	Vatikan

Negara bukan Eropa:

Australia	Jepang
Kanada	Kuwait
Korea Selatan	Selandia Baru
Hong Kong	Singapura
Brunei Darussalam	Taiwan
Israel	Amerika Serikat
	Uni Emirat Arab
	Qatar

g. Pertumbuhan Ekonomi, Pengertian, Teori dan Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Negara Maju

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah? Sebelum masuk ke dalam pembahasan, materi yang akan dibahas lebih dulu yaitu tentang pengertian, teori, rumus dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan dengan kondisi perekonomian di dalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaksud juga dengan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang dibentuk ke dalam kenaikan pendapatan nasional.

Terbentuknya pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pada pembangunan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat. *Image* pertumbuhan ekonomi akan menggambarkan apakah tergolong maju mundurnya sebuah negara. Untuk menuju

kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara akan mengikuti beberapa teori yang dipergunakan oleh berbagai negara atau negara tersebut dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sehingga tergolong negara maju atau terbelakang alias berkembang. Teori pertumbuhan ekonomi ada beberapa konsep, mazhab yang dipergunakan oleh beberapa negara maju sebelumnya. Negara maju tersebut disebut maju manakala mereka memiliki pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan negara-negara maju pada umumnya menggunakan teori pertumbuhan ekonomi yang hampir sama hanya dikembangkan dengan kondisi situasi dan budaya dari negara tersebut. Mengingat tidak semua konsep teori tersebut secara utuh dijalankan melainkan selalu dikombinasikan degan lingkungan internal dari kondisi negara tersebut, oleh sebab itu ada beberapa cara penilaian yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan dari teori pertumbuhan yang dijalankan oleh suatu negara dalam menuju kepada konsep negara maju.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori klasik

Teori klasik pada pertumbuhan ekonomi ini sudah berkembang sejak abad ke-17. Teori ini dipelopori oleh beberapa konsep pemikiran tokoh di era klasik ini. Terdapat dua tokoh yang sangat berpengaruh pada pemikiran teori klasik ini, yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith

Adam Smith adalah tokoh klasik yang telah banyak membahas tentang teori-teori ekonomi, termasuk salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Tertulis pada bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes Wealth of Nation (1776).*

Adam Smith menjabarkan pendapatnya tentang bagaimana

caranya menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan dua faktor, yaitu :

a. faktor output total, dan
b. faktor pertumbuhan penduduk.

Penjelasan dari Perhitungan output total dapat digunakan pada tiga variabel yaitu;

a. sumber daya alam,
b. sumber daya manusia, dan
c. persediaan capital atau modal.

Sedangkan jika pada faktor kedua yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut David Ricardo

Teori pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo memikirkan pada hal pertumbuhan ekonomi yang sangat dikenal yaitu tentang *the law of diminishing return*. Pemikiran David Ricardo ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penurunan produk marginal dikarenakan terbatasnya pada jumlah tanah.

Menurut David Ricardo, peningkatan produktivitas pada tenaga kerja lebih membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang sangat cukup. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

2. Teori Neoklasik

Mazhab teori pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu mazhab teori neoklasik. Pada teori neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi, ada dua tokoh yang sangat dikenal yaitu ;

a. Joseph A Schumpeter, dan
b. Robert Solow.

a. Pertumbuhan Ekonomi menurut Joseph A Schumpeter

Joseph A Schumpeter pada bukunya yang ditulis berjudul *The Theory of Economic Development*, memberikan konsep membahas tentang peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter mendefinisikan bahwa proses pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya proses pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses inovasi yang dilakukan pada para innovator dan wirausahawan.

b. Pertumbuhan Ekonomi menurut Robert Solow

Robert Solow memiliki pendapat tentang pertumbuhan ekonomi dengan melihat beberapa faktor yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan. rangkaian kegiatan yaitu rangkaian kegiatan bersumber pada empat faktor utama.

Empat (4) rangkaian kegiatan faktor tersebut yaitu;

1) manusia,
2) akumulasi modal,
3) teknologi modern, dan
4) hasil (output).

Setelah 2 mazhab pertumbuhan ekonomi yaitu teori klasik dan teori neoklasik, maka ada beberapa mazhab pemikiran yang dipergunakan beberapa negara dalam pertumbuhan ekonomi seperti teori Neokeynes, W.W. Rostow, Karl Bucher dengan pemikiran masing-masing. Adapun teori tersebut didasari oleh beberapa pemikiran tokoh dan ahli yang memandang bahwa pertumbuhan ekonomi didasari oleh sebuah kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi modal seperti investasi, perilaku sikap masyarakat dalam sebuah negara dan kondisi dari sebuah perdagangan yang dilakukan oleh sebuah negara. Untuk itu akan dibahas dalam tulisan selanjutnya.

3. Teori Neokeynes

Pada teori Neokeynes dibangun oleh beberapa tokoh yang sangat dikenal. Dua (2) tokoh pada teori Neokeynes, yaitu:

a. Roy F. Harrod, dan
b. Evsey D Domar.

Kedua Pandangan pada kedua tokoh tersebut yaitu tentang:

a. adanya pengaruh investasi dalam permintaan agregat, dan
b. pertumbuhan pada kapasitas produksi.

Investasi menurut pandangan ini investasi tersebut karena, yang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam teori neokeynes ini mempunyai pandangan bahwa tentang penanaman modal yaitu komponen yang paling utama pada proses penentuan suksesnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pandangan ini maka negara-negara berlomba-lomba untuk berinvestasi ke berbagai negara berkembang bahkan banyak negara untuk menerima investasi dari beberapa negara maju.

Dengan demikian ada ikatan antara negara yang berkembang terhadap negara maju atau negara maju berupaya untuk selalu mengikat negara berkembang dalam akumulasi modal sehingga mereka tetap mendapat pandangan sebagai investor atau sebagai negara maju yang memiliki modal yang besar dan mampu sharing terhadap negara yang kurang maju atau negara miskin atau negara berkembang.

4. Teori W.W. Rostow

Pada teori W.W. Rostow telah membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan Teori Pembangunan. Berbagai pemikirannya telah didefinisikan pada salah satu buku yang ditulisnya berjudul *The Stages of Economic, A Non Communist Manifesto*.

Pada buku tersebut, Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu masyarakat.

Menurut Teori ini, pada suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi secara berlangsung melalui tahapan-tahapan, diantaranya:

- Masyarakat tradisional atau *traditional society*
- Tahap prasyarat tinggal landas atau *praconditions for take off*
- Tahap tinggal landas atau *the take off*
- Tahap menuju kedewasaan atau *maturity*
- Tahap konsumsi tinggi atau *high mass consumption*

5. Teori Karl Bucher

Pada teori Karl Bucher memiliki pendapat tentang mengenai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung pada suatu masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bucher yaitu:

- Produksi dalam kebutuhan sendiri (rumah tangga yang tertutup).
- Perekonomian termasuk ke dalam bentuk perluasan pertukaran produk pada pasar (rumah tangga kota).
- Perekonomian nasional memiliki peran perdagangan yang semakin diperlukan (rumah tangga negara).
- Kegiatan dagang yang telah luas melintasi batas suatu negara (rumah tangga dunia).

Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara dapat diukur menggunakan cara membandingkan, misalnya dalam sebuah ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun saat ini dengan tahun yang sebelumnya.

Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menentukan hal yang sangat penting pada pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara yaitu dengan memperhitungkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang telah tersedia secara langsung dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dengan ilmu keterampilan, kemampuan kreatif, pelatihan, dan pendidikan yang sudah dimiliki. Jika pada suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang sangat baik, terampil dan terlatih maka output yang akan dihasilkan memiliki kualitas tinggi.

Tetapi kekurangan akan sumber daya manusia terampil bisa menghambat pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada surplus terhadap sumber daya manusia ini akan kurang signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, sumber daya manusia di dalam suatu negara harus sebanding dengan jumlahnya pada keterampilan dan kemampuan yang sedang dibutuhkan, sehingga menghasilkan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam bisa mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Sumber daya alam adalah sumber daya yang sudah tersedia di alam, baik yang ada di darat atau juga di bawah laut.

Sumber daya alam yang telah dimiliki pada suatu negara sesuai dalam kondisi iklim dan lingkungan di dalam negara tersebut. Negara yang mempunyai banyak sumber daya alam bisa menikmati pertumbuhan yang baik dibanding pada negara-negara yang sumber daya alam sedikit.

3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal terdiri berdasarkan dengan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi lainnya. Pembentukan modal adalah proses produksi pada semua produk yang berasal dari buatan manusia.

Pembentukan modal bisa meningkatkan ketersediaan modal pada tenaga kerja, bisa meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja. Akibatnya, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang bisa menghasilkan pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara.

4. Pengembangan Teknologi

Teknologi memiliki sifat dan jenis pada instrumen teknis yang dipakai dengan sejumlah tenaga kerja. Perkembangan teknologi memiliki andil terhadap peningkatan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang sangat terbatas.

Negara-negara yang sudah memakai pengembangan teknologi dapat tumbuh secara pesat dibandingkan pada negara-negara yang tidak menggunakannya. Pemilihan pengembangan teknologi secara tepat bisa berperan penting pada pertumbuhan ekonomi.

5. Faktor Sosial dan Politik

Faktor sosial terdiri berdasarkan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai dan keyakinan di dalam setiap negara, hal tersebut bisa memberikan kontribusi pada suatu pertumbuhan ekonomi.

Kondisi politik suatu negara bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Jika saat kondisi politik dalam suatu negara stabil akan berjalan dengan baik dan dapat memberikan kenyamanan terhadap para masyarakat juga bisa mendukung peningkatan kinerja pada produksi.

Dengan begitu masyarakat bebas akan berinovasi dan

mengembangkan potensi yang telah dimilikinya, sehingga akan terbentuknya pencapaian pada pertumbuhan ekonomi.

Demikian pembahasan tentang Pengertian, Teori dan Faktor Yang Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan pembahasan. Semoga bermanfaat
+ (tambahan)

PERTUMBUHAN EKONOMI

Teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 2 :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

a. Frederich List (1789 – 1846)

Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Frederich Listber adalah tingkat-tingkat yang dikenal dengan sebutan Stuffen Theorien (teori tangga).

Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi dibagi 4 sebagai berikut :

1) Masa berburu dan mengembara

Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan hidupnya sangat menggantungkan diri pada pemberian alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri

2) Masa beternak dan bertanam

Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk hidup menetap. Sehingga mereka bermata pencaharian bertanam.

3) Masa Bertani dan kerajinan

Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil memelihara tanaman yang mereka tanam kerajinan hanya mengajar usaha sampingan.

4) Masa kerajinan, Industri, dan perdagangan.

Pada masa ini kerajinan bukan sebagai usaha sampingan

melainkan sebagai kebutuhan untuk dijual ke pasar, sehingga industri berkembang dari industri kerajinan menjadi industri besar.

b. Karu Bucher (1847 – 1930)

Tahap Perekonomian dapat dibagi menjadi 4

1) Rumah tangga tertutup
2) Rumah tangga kota
3) Rumah tangga bangsa
4) Rumah tangga dunia

c. Werner sombart (1863 – 1947)

1) Prakapitalisme (Varkapitalisme)
2) Zaman kapitalis madya (buruh kapitalisme)
3) Zaman kapitalis Raya (Hachkapitalismus)
4) Zaman kapitalis akhir (spetkapitalismus)

d. Walt Whitmen Rosfow (1916 – 1979)

1) Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*)
2) Persyaratan untuk lepas landas (*Precondition for take off*)
3) Lepas landas (*Take off*)
4) Perekonomian yang matang/dewasa (*Maturity of economic*)
5) Masa ekonomi konsumsi tinggi (*High mass consumption*)

- **Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

a. Teori pertumbuhan menurut Adam Smith

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (Teori tangan-tangan gaib).

Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan :

1) Pertumbuhan penduduk

2) Pertumbuhan output total

Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini.

1) Sumber-sumber alam
2) Tenaga kerja (pertumbuhan penduduk
3) Jumlah persediaan

b. David Ricardo dan T.R. Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandekan.

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik

a. Robert Sollow

Rober Sollow lahir pada tahun 1950 di Brookyn, ia seorang peraih nobel di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan out put yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama. Yaitu modal dan tenaga kerja.

b. Harrod dan Domar

RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947 pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan Domar akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.

c. Joseph Schumpeter

Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.

- **Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik**

Apakah alat yang bisa digunakan untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara? Menurut M. Suparko dan Maria R. Suparko ada beberapa macam alat yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Produk Domestik Bruto

PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk.

2. PDB per Kapita atau Pendapatan Per kapita

PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan per kapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk.

3. Pendapatan Per jam Kerja

Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama.

B. MODEL-MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

Harrord Domar Keadaan "Steady-State Growth" Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar adalah model pertumbuhan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, model itu merupakan perkembangan langsung teori ekonomi makro Keynes yang merupakan teori jangka pendek yang menjadi teori jangka panjang. Pada model Harrod-Domar investasi diberikan peranan yang sangat penting. Dalam jangka panjang investasi mempunyai pengaruh kembar. Di satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain investasi mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan menambah stok modal yang tersedia.

Harrod menyimpulkan agar suatu ekonomi nasional selalu tumbuh dengan kapasitas produksi penuh (kesempatan kerja penuh) yang disebutnya sebagai ***"Pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady-state growth)"*** efek permintaan yang ditimbulkan dari penambahan investasi harus selalu diimbangi oleh efek penawarannya tanpa terkecuali. Tetapi investasi dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai pengharapan yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu, karena itu keseimbangan ekonomi jangka panjang yang mantap hanya dapat dicapai secara mantap pula apabila pengharapan para pengusaha stabil dan kemungkinan terjadinya hal itu sangat kecil, seperti yang dikemukakan oleh Joan Robinson (*golden age*).

Di samping itu Harrod mengemukakan bahwa sekali keseimbangan itu terganggu, maka gangguan itu akan mendorong ekonomi nasional menuju ke arah depresi atau inflasi sekular. Karena itu Harrod melambangkan keseimbangan ekonomi tersebut sebagai keseimbangan mata pisau, mudah sekali tergelincir dan sekali tergelincir semuanya akan menjadi hancur (jadi keseimbangan yang

tidak stabil).

Model pertumbuhan ekonomi Domar hampir mirip dengan model Harrod walaupun ada beberapa perbedaan yang esensial pula antara kedua model itu. Perbedaan itu khususnya menyangkut mengenai tiadanya fungsi investasi pada model Domar, sehingga investasi yang sebenarnya tidak ditentukan di dalam modelnya. Karena itu kesulitan pencapaian keseimbangan ekonomi jangka panjang yang mantap bagi Harrod, disebabkan oleh sulitnya kesamaan v dan vr atau laju pertumbuhan yang disyaratkan dengan laju pertumbuhan natural, sedang bagi Domar kesulitan itu timbul karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melakukan investasi yang relatif terlalu rendah (*underinvestment*).

Model Neo-Klasik sebagaimana dikemukakan oleh Solow (juga Swan) mencoba memperbaiki kelemahan model Harrod-Domar dengan mengolah asumsi yang mengenai fungsi produksi yang digunakan, dari fungsi produksi dengan proporsi tetap, menjadi fungsi produksi dengan proporsi yang variabel.

Berbeda dengan visi Harrod-Domar yang suram dan menakutkan visi teori Neo-Klasik adalah visi yang menggembirakan dan serasi dengan proses ekonomi yang otomatik dan mekanistik. Kelemahan pokok teori Neo-Klasik adalah dihilangkannya peranan pengharapan para pengusaha yang dalam teori Keynes menduduki peranan sentral.

C. NEGARA BERKEMBANG

1. Pengertian Negara Berkembang

Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap *negara berkembang* yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Negara yang digolongkan negara berkembang terdapat di Benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan (Latin).

2. Contoh Negara Berkembang :

Negara-negara Berkembang di Dunia

Jumlah negara berkembang di dunia sangat banyak sekali. Bahkan mayoritas atau sebagian besar negara di dunia merupakan negara berkembang. Apabila kita menjelajah bumi, kita menemukan beberapa benua. Nah, di setiap penjuru benua tersebut kita akan dapat menemukan negara berkembang. Bahkan di wilayah kita sendiri, wilayah Asia tenggara, negara-negara yang ada pun merupakan negara berkembang. Namun untuk mengetahui lebih detail negara apa saja yang merupakan negara berkembang, kita akan mengetahui dari benuanya masing-masing yang akan kita bahas di bawah ini.

a. Benua Asia, memiliki negara berkembang sebanyak 48, yaitu:

- Indonesia
- Filipina
- Thailand
- Malaysia
- Vietnam
- Timor Leste
- Armenia
- Kazakstan
- Kirgistan
- Mongolia
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Afghanistan
- Bangladesh
- Bhutan
- Brunei Darussalam

- Kamboja
- Cina
- Fiji
- India
- Kiribati
- Korea Utara
- Laos
- Maldives
- Myanmar
- Nepal
- Pakistan
- Palestina
- Papua Nugini
- Samoa
- Solomon
- Sri Lanka
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Bahrain
- Iran
- Irak
- Yordania
- Kuwait
- Lebanon
- Oman
- Qatar
- Arab Saudi
- Suriah
- Zaman
- Uni Emirat Arab

b. Benua Afrika mempunyai negara berkembang sebanyak 58 negara, yaitu:

- Aljazair
- Senegal
- Zimbabwe
- Djibouti
- Mesir
- Libya
- Mauritania
- Maroko
- Sudan
- Sudan Selatan
- Tunisia
- Angola
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Kamerun
- Cape Verde
- Republik Afrika Tengah
- Chad
- Komoro
- Republik Demokratik Kongo
- Republik Kongo
- Ivory Coast
- Guinea Khatulistiwa
- Eritrea
- Ethiopia
- Gabon
- Gambia

- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Madagaskar
- Malawi
- Mali
- Mauritus
- Mozambik
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Rwanda
- Sao Tome and Principe
- Swaziland
- Tanzania
- Togo
- Uganda

c. **Negara-negara berkembang di benua Eropa**, terdiri dari 11 negara yakni sebagai berikut:
   - Polandia
   - Lituania
   - Romania
   - Bulgaria
   - Latvia
   - Montenegro
   - Ukraina
   - Serbia

- Albania
- Moldova
- Georgia
- Azerbaijan
- Bosnia dan Herzegovina
- Belarus
- Kroasia
- Kosovo
- Makedonia
- Turki

d. Negara-negara berkembang di benua Amerika, terdiri dari 30 negara yakni sebagai berikut:

- Argentina
- Bahama
- Barbados
- Chili
- Brazil
- Columbia
- Bolivia
- Bolivia
- Belize
- Antigua
- El Savador
- Ekuador
- Republic Dominika
- Costa rika
- Grenada
- Guyana
- Guatemala
- Haiti

- Honduras
- Meksiko
- Jamaika
- Panama
- Nikaragua
- Peru
- Paraguay
- Lucia
- Vincent
- Suriname
- Uruguay
- Venezuela
- Trinidad and Tobago

e. Negara-negara berkembang di benua Australia ada 11 negara, yakni sebagai berikut:

- Fiji
- Kiribati
- Kepulauan Marshall
- Federasi Mikronesia
- Nauru
- Palau
- Samoa
- Solomon
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu

3. Ciri-ciri Negara Berkembang

a. Tingkat pendidikan masih rendah

b. Tingkat penghasilan masih rendah/pendapatan per kapita

rendah

c. Tingkat kesehatan masih rendah
d. Sistem perekonomiannya masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional
e. Angka pengangguran yang tinggi
f. Kesempatan kerja yang minim
g. Angka pertumbuhan penduduk tinggi

4. Karakteristik Umum Negara Sedang Berkembang menurut World development

Pengelompokan negara-negara di dunia biasanya berdasarkan pada tingkat kesejahteraannya dengan menggunakan indikator pendapatan riil per kapita. Negara-negara sedang berkembang ini juga disebut sebagai negara dunia ketiga atau negara selatan.

Bank dunia dalam world development report (2009) mengelompokkan negara-negara ke dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat pendapatan nasional (GNI) per kapitanya yaitu :

a. Negara berpenghasilan rendah adalah kelompok negara-negara dengan GNI per kapita di bawah US $935
b. Negara berpenghasilan menengah adalah pendapatan GNI per kapitanya antara US $936 sampai US $11,455
c. Negara berpenghasilan tinggi adalah kelompok negara-negara yang GNI per kapitanya di atas US $11.456.

5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Posisi negara-negara berkembang dewasa ini dalam banyak hal berbeda dengan yang dimiliki oleh negara-negara maju pada saat lepas landas ke arah era pertumbuhan ekonomi modern. Dalam kondisi awal tersebut, paling tidak terdapat delapan perbedaan penting yang mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dan syarat-syarat terlaksananya pembangunan ekonomi modern.

Kedelapan butir perbedaan yang utama dan yang perlu dianalisis lebih lanjut itu adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia.
b. Perbedaan pendapatan per kapita dan tingkat GNP dibandingkan negara-negara lainnya di dunia.
c. Perbedaan iklim.
d. Perbedaan jumlah penduduk, distribusi, serta laju pertumbuhannya.
e. Peranan sejarah migrasi internasional.
f. Perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional.
g. Kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar.
h. Stabilitas dan fleksibilitas lembaga-lembaga politik dan sosial.

Oleh karena itu agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara maka dapat dilakukan upaya perbaikan di segala bidang dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan/penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah. Beberapa ahli ekonomi mengemukakan pertumbuhan ekonomi dengan persepsi yang berbeda-beda. Seperti pada aliran klasik dan neo klasik. Sebagai contohnya : Robert Solow mengemukakan pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi

modern dan hasil/output. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengemukakan pertumbuhan ekonomi dalam arti yang berbeda-beda.

Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu negara terus memajukan pendapatan negara dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak yang katanya bisa menjadikan lebih baik tingkat perekonomian.

D. PENGERTIAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat kita lihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial.

Pertumbuhan Ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional.

Suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik. Lalu apakah suatu negara yang mengalami gejala perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan suatu bisnis? Tentu saja iya, karena perubahan dari perekonomian masyarakat akan mempengaruhi permintaan persediaan barang dan jasa suatu bisnis.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Beberapa ahli di bidang ilmu ekonomi pernah memberikan

penjelasan tentang perkembangan ekonomi, diantaranya adalah:

1. Adam Smith

Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka output atau hasil dari suatu negara akan ikut bertambah.

2. Sadono Sukimo (1985)

Menurut Sadono Sukimo, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun, yang kita kenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

3. Budiono (1994)

Menurut Budiono, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses pertumbuhan output per kapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifatnya sementara.

Artinya, pertumbuhan tersebut sifatnya *self generating* yang menghasilkan suatu kekuatan atau momentum untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya.

4. M. P. Todaro

Menurut Budiono, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses yang mantap dimana kapasitas produksi suatu perekonomian mengalami peningkatan sepanjang waktu dan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional.

5. Prof. Simon Kuznets

Menurut Prof. Simon Smith Kuznets, pengertian pertumbuhan

ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan tersebut tumbuh seturut dengan perkembangan teknologi, ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut.

6. Menurut Para Ekonom Klasik

Beberapa ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill) dan juga ekonom neoklasik (Robert Sollow, Trevor Swan), setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi ekonomi sebuah negara, diantaranya:

- Jumlah penduduk
- Jumlah stok barang modal
- Luas tanah dan kekayaan alamnya
- Kemajuan teknologi

Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang berdasarkan kepada produk nasional dan komponennya, tenaga kerja, penduduk, dan lainnya.

Berikut ini adalah ciri-cirinya:

1. Terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat
2. Adanya peningkatan produktivitas masyarakat
3. Terjadi perubahan struktural yang tinggi
4. Adanya urbanisasi dalam suatu negara
5. Melakukan ekspansi ke negara maju
6. Terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia

Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Setelah memahami pengertian pertumbuhan ekonomi dan ciri-cirinya, maka kita juga harus tahu faktor apa yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi bisnis:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor SDM dapat mempercepat atau justru memperlambat proses pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, ketika suatu negara memiliki peningkatan jumlah pengangguran terhadap penduduknya maka negara tersebut dapat dikatakan sedang mengalami kemunduran.

Penurunan kualitas sumber daya manusia menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran yang diperparah dengan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan. Meningkatnya pengangguran bisa memicu semakin tingginya kemiskinan masyarakat.

Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dari suatu bisnis atau perusahaan. Masyarakat akan cenderung menghemat pendapatannya dan hanya membelanjakannya untuk hal-hal yang primer saja.

2. Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, kekayaan SDA tersebut tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang baik untuk mengelolanya.

Alhasil, Indonesia seringkali melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali saat barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Dengan keterbatasan pengelolaan sumber daya alam ini mengharuskan suatu bisnis atau perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan bahan mentah seringkali harus mengimpor

bahan dasar dari luar negeri sehingga mengakibatkan produk perusahaan jauh lebih mahal daripada ketika harus mendapatkannya dari dalam negeri.

Inilah yang seringkali menjadi dilema di masyarakat kita. Karena masih banyak produk-produk dalam negeri yang dinilai mahal yang membuat permintaannya menurun.

3. Kemajuan IPTEK

Suatu negara dikatakan maju dalam ekonomi ketika mengalami peningkatan dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Tak terkecuali pada suatu perusahaan yang mengedepankan teknologi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang lebih efisien.

Penggunaan teknologi yang sudah maju mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk lebih cepat dan efisien. Teknologi dalam hal peralatan produksi yang digunakan dapat membantu meminimalisir serapan tenaga kerja sehingga anggaran untuk pegawai dapat dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain.

Namun, untuk bisnis yang sedang berkembang umumnya masih sulit untuk menerapkan teknologi dalam usahanya. Karena pembelian peralatan modern dinilai masih mahal dan harus mengimpor dari luar negeri.

4. Tingkat Inflasi

Inflasi juga merupakan salah satu gejala yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah kejadian dimana laju peredaran rupiah tak terkendali.

Meningkatnya harga-harga berpengaruh terhadap produktivitas bahan baku karena menyebabkan peningkatan biaya operasi perusahaan untuk pemasokan bahan baku. Tidak hanya itu, adanya inflasi akan mempengaruhi gaji pegawai suatu perusahaan.

Terdapat dua tipe inflasi yang dapat berpengaruh langsung

terhadap bisnis perusahaan yaitu cos-push inflation dan deman-pull inflation. Cos-push inflation adalah harga produk naik karena permintaan masyarakat naik dan deman-pull inflation adalah kenaikan permintaan masyarakat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

5. Tingkat Suku Bunga

Perkembangan ekonomi mempengaruhi tingkat suku bunga suatu negara. Pertumbuhan ini cenderung membuat tingkat suku bunga mengalami kenaikan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Suku bunga yang tinggi berpengaruh buruk terhadap bisnis atau perusahaan yang umumnya menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan.

Selain itu, adanya suku bunga yang tinggi mempengaruhi permintaan investasi yang rendah tentu ini berdampak buruk terhadap saham perusahaan. Alasannya karena investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan.

Perkembangan suatu bisnis sangat dipengaruhi secara langsung dari hasil pertumbuhan ekonomi di negara. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah ketika pertumbuhan ke arah yang lebih baik maka permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa juga akan naik begitu juga sebaliknya.

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation)* terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku meningkatkan

stock modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yakni, total nilai riil "neto" atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial. Di samping investasi yang bersifat langsung banyak cara yang bersifat tidak langsung untuk menginvestasikan dana dalam berbagai jenis sumber daya. Di samping itu ada juga Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap manusia. Segenap kegiatan yang dijelaskan di atas merupakan bentuk-bentuk investasi yang menjurus ke akumulasi modal.

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Meskipun demikian, kita masih mempertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara-negara berkembang (sehingga banyak diantara mereka yang mengalami kelebihan tenaga kerja) benar-benar akan memberikan dampak positif, atau justru negatif, terhadap pembangunan ekonominya. Sebenarnya, hal tersebut (positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi) sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut.

Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi (technological progress) bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian, atau membangun rumah. Kita mengenal tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu: kemajuan teknologi yang bersifat netral (*neutral technological progress*), kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (*labor-saving technological progress*), dan kemajuan teknologi yang hemat modal (*capital-saving technological progress*).

Kemajuan teknologi yang netral (*neutral technological progress*) terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Inovasi yang sederhana, seperti pembagian tenaga kerja (semacam spesialisasi) yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat adalah contohnya. Sementara itu, kemajuan teknologi dapat berlangsung sedemikian rupa sehingga menghemat pemakaian modal atau tenaga kerja (artinya, penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja atau modal yang sama). Penggunaan komputer, mesin tekstil otomatis, bor listrik berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan banyak lagi jenis mesin serta peralatan modern lainnya, dapat diklasifikasikan sebagai kemajuan **teknologi yang hemat tenaga kerja *(labor-saving technological progress).*** Sedangkan **kemajuan teknologi**

hemat modal ***(capital-saving technological progress)*** merupakan fenomena yang langka. Hal ini dikarenakan hampir semua penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan di negara-negara maju dengan tujuan utama menghemat pekerja, dan bukan menghemat modal. Di negara-negara dunia ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan sesuatu yang paling diperlukan.

Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja. **Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja** ***(labor-augmenting technological progress)*** terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. Misalnya, dengan menggunakan videotape, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya di dalam kelas, proses belajar bias lebih lancar sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi lebih baik. Demikian pula halnya dengan **kemajuan teknologi yang meningkatkan modal** ***(capital-augmenting technological progress).*** Jenis kemajuan ini terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif. Misalnya, penggunaan bajak kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian.

E. KARAKTERISTIK NEGARA BERKEMBANG

Karakteristik Negara Berkembang Beserta Permasalahan Yang Dihadapinya

Kehidupan bernegara pada dasarnya seperti kehidupan berumah tangga. Rumah tangga ibarat bentuk sederhana dari suatu negara, banyak persoalan yang sama yang dihadapi oleh keduanya seperti bagaimana mencukupi kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya, bagaimana cara efektif untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, bagaimana cara untuk membangun citra baik di mata dunia, hingga bagaimana caranya untuk meningkatkan

status mengejar predikat sebagai "negara maju". Ya, menjadi negara maju merupakan predikat yang diinginkan oleh setiap negara. Tidak hanya sekadar sebutan saja, namun menjadi negara maju berarti bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya sekaligus bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya. Negara maju juga merupakan negara yang kuat dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang teknologi.

Negara maju memiliki banyak sekali peralatan yang canggih serta modern, selain itu gaya hidup yang dianut oleh rakyatnya merupakan gaya hidup yang serba modern. Sayangnya, negara-negara di dunia ini hanya sebagian saja yang bisa memenuhi karakteristik negara maju. Masih banyak dan bahkan sebagian besar dari negara-negara di dunia ini yang belum berstatus sebagai negara maju, melainkan sebagai negara berkembang maupun terbelakang.

Negara berkembang merupakan salah satu status yang dimiliki oleh sebagian negara di dunia ini. Negara berkembang merupakan kondisi suatu negara yang tengah beranjak melakukan pembenahan terhadap tatanan negaranya. Negara berkembang selalu mencoba memperbaiki kondisi di dalamnya sehingga menjadi lebih baik lagi setiap waktu. Negara berkembang merupakan negara yang bertransformasi dari negara yang kecil dan tradisional menjadi negara yang maju. Inovasi-inovasi selalu diterapkan oleh negara berkembang baik dalam berbagai sektor maupun dalam bidang teknologi. Teknologi-teknologi canggih selalu diterapkan misalnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan cara produksi yang lebih hemat dan efisien. Dengan demikian negara berkembang merupakan negara yang sibuk untuk memperbaiki berbagai hal yang ada di dalam negara tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai negara berkembang, kita akan membahasnya secara lebih lengkap.

Suatu negara akan dikatakan sebagai negara berkembang apabila

memiliki beberapa karakteristik dari negara berkembang itu sendiri. Beberapa karakteristik dari negara berkembang antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi

Hal yang sangat berbeda yang kita temukan di antara negara maju dan negara berkembang terletak pada beberapa hal, dan salah satunya pada tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk memang menjadi salah satu ciri yang menunjukkan suatu negara apakah tergolong dalam negara berkembang ataukah negara maju. Di negara maju, kita akan menemukan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, bahkan sangat rendah. Hal ini dipengaruhi dan didukung oleh berbagai macam hal, seperti gaya hidup yang serba modern hingga sifat hedonis dan individualistis yang tinggi. Namun hal-hal tersebut tidak akan kita temukan di negara berkembang. Negara berkembang memiliki sebagian penduduk yang masih mengenyam pendidikan rendah. Selain itu masyarakat negara berkembang masih sangat kental dengan adat istiadat serta kebudayaan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan ikatan yang kuat diantara sesama anggota keluarga. Dengan demikian mempunyai keturunan yang banyak menjadi suatu anugerah tersendiri.

Dengan perbedaan tingkat pendidikan dan kebudayaan serta pola pikir yang masih tradisional, maka menjadikan tingkat pertumbuhan di negara berkembang cenderung tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan banyak permasalahan timbul, terutama di masa depan. Beberapa permasalahan yang dapat timbul yang diakibatkan oleh hal ini adalah mahalnya biaya pendidikan, sulitnya tanah untuk membangun rumah, dan lain sebagainya. Selain itu pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan menaikkan anggaran pengeluaran negara.

2. Mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi

Negara berkembang merupakan negara yang mempunyai beberapa tanda khusus yang dapat kita lihat. Beberapa tanda atau ciri atau karakteristik dari negara berkembang ini memiliki sifat serba tinggi. Selain tingginya pertumbuhan penduduk, ternyata negara berkembang juga bisa ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengangguran merupakan momok yang dijauhi oleh negara-negara di dunia ini (baca: negara penghasil kopi terbesar di dunia). Bagaimanapun juga yang namanya pengangguran itu tidak produktif dan banyak mendatangkan permasalahan, baik permasalahan di bidang ekonomi, sosial masyarakat, hingga kriminalitas. Pengangguran sendiri merupakan seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang bekerja namun hanya beberapa jam saja seminggu. Orang dikatakan sebagai pengangguran apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- Sedang mencari pekerjaan
- Sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja
- Tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak akan mendapatkan
- Sedang mempersiapkan usaha

Nah itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk disebut sebagai seorang pengangguran. Keberadaan pengangguran di tengah-tengah masyarakat memang menjadi suatu masalah. Sebab pengangguran tidak mendapatkan pemasukan, namun tetap mengeluarkan uang untuk bertahan hidup. Otomatis hal ini akan menjadi tanggungan bagi negara secara tidak langsung. Dan selain hal itu, pengangguran akan menimbulkan berbagai macam dampak baik dampak dalam bidang perekonomian maupun dalam bidang sosial. Beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari status pengangguran

antara lain dapat menyebabkan tingginya pengeluaran negara hingga menimbulkan kriminalitas dimana-mana.

3. Ketergantungan pada sektor pertanian atau primer

Perekonomian adalah salah satu bagian yang paling penting bagi suatu negara. Perekonomian suatu negara menjadi salah satu cerminan kesejahteraan masyarakatnya. Banyak cara yang bisa dilakukan suatu negara untuk menopang perekonomiannya. Sektor-sektor perekonomian ini bisa bermacam-macam, seperti sektor ekstraktif, industri, perdagangan dan juga jasa. Bagi negara maju, sektor yang mayoritas digeluti dan menjadi andalan negaranya adalah sektor industri. Sektor industri sangat dibutuhkan oleh banyak orang dan menjadi sektor yang memproduksi banyak benda-benda yang dibutuhkan manusia sehari-hari. Namun tidak seperti negara maju, di negara berkembang sektor yang sangat dijadikan penopang adalah sektor primer, dalam hal ini adalah sektor pertanian. Selain sektor pertanian, bisa juga sektor ekstraktif atau mengambil langsung dari alam seperti pertambangan, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Di negara berkembang memang masih banyak dijumpai lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan dan lainnya, maka dari itulah banyak masyarakat yang bekerja di sana. Selain karena luasnya lahan, salah satu faktor yang mendukung adalah kurangnya tingkat pendidikan masyarakatnya sehingga banyak masyarakat yang bekerja dengan kekuatan tangannya, seperti halnya sektor primer.

4. Pasar dan informasi tidak sempurna

Di negara berkembang banyak hal yang masih jauh dari kata kesempurnaan. Beberapa diantaranya adalah pasar serta informasi. Keterbatasan teknologi serta kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan negara berkembang memiliki sistem informasi yang kurang sempurna dan pastinya tertinggal jauh dengan

negara maju. Sistem komunikasi di negara maju sudah banyak menggunakan peralatan yang super canggih dan belum ada di negara berkembang. Karena di negara maju sudah sangat berkembang, maka tidak heran apabila di negara berkembang tertinggal. Hal ini karena masyarakat negara maju mempunyai cukup uang untuk kembali peralatan komunikasi yang canggih didukung dengan kebutuhan mereka yang penuh dengan mobilitas. Bahkan tidak hanya pada peralatan komunikasi saja, namun juga dalam hal pasar di negara berkembang juga belum tertata rapi. Banyak hal yang menjadi masalah di negara berkembang sehingga menyebabkan pasar tidak bertumbuh dengan lancar.

5. Pendapatan per kapita rendah

Salah satu ciri yang cukup mencolok dalam menandai negara berkembang adalah pendapatan per kapita penduduknya yang masih rendah. Negara berkembang sangat identik dengan keterbatasan dan keterbelakangan. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, maka akan banyak penduduk negara berkembang hidup dalam batas garis kemiskinan. Hal ini akan membuat kesejahteraan penduduk menjadi sangat jauh dari kata baik. Dengan pendapatan per kapitan yang hanya sedikit itu, kebanyakan masyarakat hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok saja, dan sedikit kemungkinan untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan sekunder, atau bahkan kebutuhan mewah. Karena jumlah pendapatan yang pas-pasan, maka penduduk negara berkembang ini hanya akan memperoleh makanan yang sederhana saja. Bisa jadi masyarakat negara berkembang akan kekurangan gizi. Selain itu, rumah-rumah penduduk di negara berkembang banyak yang masih sangat sederhana. Di beberapa negara berkembang bahkan masih ada anak-anak serta bayi-bayi yang terlantar, kurang gizi sehingga sangat mudah untuk terserang penyakit. Perolehan pendidikan juga dalam batas yang biasa saja, disesuaikan dengan pendapatan yang

diperoleh mereka. Tidak heran, di negara berkembang jumlah siswa yang berprestasi akan sangat jauh beda dengan negara maju yang telah memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap.

6. Kesempatan kerja yang kurang memadai

Kesempatan kerja yang kurang memadai menjadi salah satu ciri negara berkembang. Kesempatan kerja yang sangat terbatas ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor. Salah satu hal yang membuat kesempatan kerja ini menjadi tidak luas adalah karena perekonomian di negara berkembang hanya mengandalkan sektor pertanian. Dengan demikian lapangan kerja yang dibuka juga tidak banyak. Kesempatan kerja yang terbatas tersebut akan melahirkan banyak pengangguran yang akan berdampak buruk bagi negara. Selain adanya kesempatan kerja yang terbatas, ciri lain dari negara berkembang adalah kurangnya atau sedikitnya jumlah wirausaha. Sedikitnya jumlah wirausaha ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang membangun bisnis serta terbatasnya modal yang dipunyai masyarakat, ditambah dengan berbagai macam pendapat yang keluar dari pemikiran yang masih kolot diantara masyarakat desa.

7. Adanya keterbatasan modal usaha

Telah dikatakan sebelumnya bahwa salah satu ciri dari negara berkembang adalah sedikitnya jumlah pengusaha atau wirausaha. Hal ini terjadi karena dua hal yakni kurangnya pengetahuan untuk berwirausaha serta terbatasnya jumlah modal yang dimiliki. Jumlah modal terbatas karena negara berkembang hanya mengandalkan sektor primer saja, sehingga pendapatan yang diterima pun juga hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang ditabung. Maka dari itulah masyarakatnya yang tinggal di negara berkembang hanya

mempunyai sedikit modal yang dapat digunakan untuk membangun usaha. Merintis usaha pun tidak selalu langsung berhasil, terkadang kita mengalami kerugian terlebih dahulu. Ketika percobaan pertama rugi, maka kita akan mencoba kembali. Kali kedua membangun usaha itulah kita membutuhkan modal lagi, maka dari itu modal yang disediakan harus memenuhi jumlah yang cukup.

Itulah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh negara berkembang. Karakteristik tersebut mungkin tidak semua dimiliki oleh suatu negara berkembang, namun poin-poin yang telah disebutkan di atas merupakan karakteristik negara berkembang secara umum dan paling banyak ditemui.

Kondisi Indonesia sebagai Negara Berkembang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di benua Asia), tepatnya di Asia Tenggara. Sebagai salah satu bagian dari benua Asia, Asia tenggara memiliki belasan negara anggota. Belasan negara anggota dari Asia Tenggara tersebut sebagian besar bahkan semuanya adalah negara yang masih berkembang. Negara berkembang merupakan negara yang masih terus memperbaharui kondisi negaranya. Negara berkembang masih memiliki banyak permasalahan yang sedikit rumit, seperti misal tingkat kemiskinan yang masih tinggi, Dengan demikian dapat kita sarankan kepada pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.
- Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta melaksanakan

fungsi entrepreneurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.

- Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sektor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.
- Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.
- Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja,

yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi; tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

F. Tujuan Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang

Tujuan Pembangunan Ekonomi Di Negara Sedang Berkembang

Pembangunan Ekonomi memiliki Pengertian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi di negara berkembang memiliki tujuan. **Negara-negara Berkembang di Dunia** Jumlah negara berkembang di dunia sangat banyak sekali. Bahkan mayoritas atau sebagian besar negara di dunia merupakan negara berkembang. Apabila kita menjelajah bumi, kita menemukan beberapa benua. Nah, di setiap penjuru benua tersebut kita akan dapat menemukan negara berkembang. Bahkan di wilayah kita sendiri, wilayah Asia tenggara, negara-negara yang ada pun merupakan negara berkembang.

Nah itulah negara-negara berkembang yang ada di berbagai belahan dunia dan sudah dikelompokkan ke dalam benua-benuanya masing-masing. Negara berkembang tersebut memiliki karakteristik yang sama pada umumnya, namun tetap saja tidak semua negara tersebut mempunyai semua karakteristik. Negara-negara berkembang seperti yang telah disebutkan di atas tetap berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas negaranya dan juga berusaha mengatasi setiap masalah yang dihadapinya dengan cara yang seefektif mungkin. Dengan demikian kedaan yang dimilikinya akan berangsur-angsur membaik dan tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi negara maju, dan sebaliknya negara maju pun tidak lepas kemungkinan akan menjadi negara berkembang jika

mengalami penurunan kualitas dari berbagai segi.

1. Membangun bangsa yang maju

Taraf kemajuan perekonomian dapat diukur dari berbagai indikator, antara lain PDB dan PDB per kapita. Keseimbangan komposisi dalam struktur perekonomian mencerminkan pula kemajuan perekonomian.

Perekonomian yang maju seringkali diartikan dengan perekonomian yang tidak terlalu bergantung pada sektor primer, dalam hal ini pertanian dan pertambangan. Perekonomian yang maju lebih di dominasi oleh peranan sektor industri manufaktur dan jasa. Keseimbangan struktur ekonomi juga harus tercermin dalam penyerapan tenaga kerja. Umumnya komposisi tenaga kerja menurut sektor mengikuti keadaan struktur ekonominya. Kemajuan ekonomi juga dapat dicerminkan dari tingkat ketergantungan sumber daya pembangunan di mana ketergantungan pada sumber daya pembangunan dari luar negeri makin mengecil. Di samping semua hal tersebut, perekonomian yang maju juga ditandai dengan makin membaiknya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini mencakup distribusi pendapatan antar daerah, antar golongan dan antara kota dan desa.

2. Membangun bangsa yang mandiri

Tujuan pembangunan nasional yang kedua adalah membangun bangsa yang mandiri. Kemandirian adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai suatu bangsa sehingga bangsa itu dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatannya sendiri. Ini berarti untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan. Kemandirian juga tercermin pada kemampuan bangsa untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang paling pokok.

3. Membentuk masyarakat yang sejahtera

Tujuan yang ketiga adalah membentuk masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok itu mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu saja tidak cukup, karena masyarakat yang sejahtera harus pula berkeadilan. Dengan makin majunya taraf kehidupan masyarakat, maka masyarakat yang sejahtera akan menikmati kemajuan hidup secara berkeadilan. Keseluruhan upaya itu harus membangun kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan. Upaya membangun kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan itu harus dicapai pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinan dan kelaparan (United Nations, 2000). Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dimana pemerintah dan semua perangkatnya dalam semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling lambat tahun 2015. Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan MDGs untuk mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia makin memburuk dalam 10 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, HDI atau IPM Indonesia yang diukur dari pendapatan riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peringkat Indonesia dari tahun ke tahun selalu menurun dari 110 menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang dinilai UNDP (2003), walaupun pada tahun 2006 terdapat peningkatan ranking ke 110 (UNDP, 2007).

1. Penduduk

Permasalahan utama dari negara berkembang adalah pertumbuhan penduduknya yang tidak terkendali. Hal ini akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit.

2. Permasalahan yang Sering Timbul di Negara Berkembang

Setiap negara pastilah mempunyai permasalahan, tidak mungkin jika tidak memiliki permasalahan baik negara maju maupun negara berkembang. Perbedaannya, negara maju lebih memiliki sedikit permasalahan daripada negara berkembang jika dilihat dari berbagai sisi. Apa saja permasalahan yang ada di negara berkembang? Berikut ini adalah ulasannya.

3. Ekonomi

Keadaan perekonomian di negara berkembang biasanya masih semrawut. Banyak pengangguran di negara berkembang, penyebabnya adalah kurangnya kesempatan kerja dan juga kualitas SDM yang masih rendah.

4. Pendidikan

Pendidikan di negara berkembang tidak merata dan masih banyak orang yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Hal ini karena kelebihan jumlah penduduk di negara berkembang.

5. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di negara berkembang masih sangat kurang. Hal ini juga didukung oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang menjaga kebersihan, sehingga masih banyak orang yang sakit.

6. Infrastuktur

Biasanya negara berkembang memiliki luas wilayah yang lebih besar daripada negara maju, namun infrastrukturnya kurang. Hal ini karena kekurangan anggaran yang dimiliki oleh negara berkembang.

7. Hukum

Penegakan hukum di negara berkembang masih kurang. Hal ini didukung dengan kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri masih rendah, sehingga masih banyak ditemukan berbagai permasalahan hukum.

8. Tingkat Produksi

Hasil produksi di negara berkembang masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat produktivitas yang rendah dan juga kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Industrinya biasanya menggunakan tenaga manusia sehingga kalah dengan yang menggunakan mesin.

9. Kualitas penduduk

Kualitas penduduk rata-rata di negara berkembang masih rendah. Hal ini didukung dengan pendidikan yang masih tidak merata.

10. Ketidakmerataan Hasil Pembangunan

Kekurangan infrastruktur membuat hasil pembangunan menjadi tidak merata, hanya terpusat di wilayah ibukota saja. Hal ini didukung dengan ketidakmerataan penghasilan masyarakat.

11. Ketergantungan pada Luar Negeri

Negara berkembang masih kekurangan dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Banyak barang yang mengandalkan produksi negara lain.

Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Tujuan Pembangunan Ekonomi **Tujuan**

Selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan, terutama sekali, untuk maksimalisasi pertumbuhan ekonomi melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Meskipun demikian, tolok ukur ekonomi tersebut tampaknya tidak sepenuhnya menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Memasuki akhir dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi, mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitikberatkan

pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan, seperti pendekatan pembangunan pertumbuhan dengan pemerataan (*redistribution with growth*) dan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Meskipun demikian, pemikiran tersebut tidak mengerucut pada suatu solusi yang mampu mengatasi problematika pembangunan yang terjadi.

Perubahan yang paling mendasar pada fokus ekonomi pembangunan terjadi selama dekade 1970-an dan dekade 1980-an. Fokus kajian ekonomi pembangunan sudah lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman negara sedang berkembang (NSB) dan pengidentifikasian faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan tingkat kinerja ekonomi dari setiap negara. Pada masa ini pembangunan semakin dilihat sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan yang mendasar di dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (*institutional development*), selain aspek-aspek ekonomi seperti kenaikan pendapatan per kapita, kemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Tujuan Pembangunan GBHN 1993 menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional dalam PJP II adalah **membangun bangsa yang maju**, **mandiri** dan **sejahtera**. Untuk mencapainya, pertama-tama kita harus memajukan perekonomian seiring dengan kualitas sumber daya manusia. tujuan pembanguna di orde baru melalui beberapa prioritas untuk memenuhi beberapa indikator.

1. Membangun bangsa yang maju

Taraf kemajuan perekonomian dapat diukur dari berbagai indikator, antara lain PDB dan PDB per kapita. Keseimbangan komposisi dalam struktur perekonomian mencerminkan pula kemajuan perekonomian. Perekonomian yang maju seringkali diartikan dengan perekonomian yang tidak terlalu bergantung pada sektor primer, dalam hal ini pertanian dan pertambangan. Perekonomian yang maju lebih didominasi oleh peranan sektor industri manufaktur dan jasa. Keseimbangan struktur ekonomi juga harus tercermin dalam penyerapan tenaga kerja. Umumnya komposisi tenaga kerja menurut sektor mengikuti keadaan struktur ekonominya. Kemajuan ekonomi juga dapat dicerminkan dari tingkat ketergantungan sumber daya pembangunan di mana ketergantungan pada sumber daya pembangunan dari luar negeri makin mengecil. Di samping semua hal tersebut, perekonomian yang maju juga ditandai dengan makin membaiknya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini mencakup distribusi pendapatan antar daerah, antar golongan dan antara kota dan desa.

2. Membangun bangsa yang mandiri

Tujuan pembangunan nasional yang kedua adalah membangun bangsa yang mandiri. Kemandirian adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai suatu bangsa sehingga bangsa itu dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatannya sendiri. Ini berarti untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan. Kemandirian juga tercermin pada kemampuan bangsa untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang paling pokok.

3. Membentuk masyarakat yang sejahtera

Tujuan yang ketiga adalah membentuk masyarakat yang

sejahtera. Masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok itu mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Namun hal itu saja tidak cukup, karena masyarakat yang sejahtera harus pula berkeadilan. Dengan makin majunya taraf kehidupan masyarakat, maka masyarakat yang sejahtera akan menikmati kemajuan hidup secara berkeadilan. Keseluruhan upaya itu harus membangun kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan. Upaya membangun kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan itu harus dicapai pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan) tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinan dan kelaparan (United Nations, 2000). Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dimana pemerintah dan semua perangkatnya dalam semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling lambat tahun 2015. Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan MDGs untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang dikeluarkan

oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia makin memburuk dalam 10 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, HDI atau IPM Indonesia yang diukur dari pendapatan riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peringkat Indonesia dari tahun ke tahun selalu menurun dari 110 menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang dinilai UNDP (2003), walaupun pada tahun 2006 terdapat peningkatan ranking ke 110 (UNDP, 2007).

Sebelum Orde Baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya tampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tingi (Hyper Inflasi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat melakukan impor dari luar negeri. Selain itu kecintaan penduduk akan produk dalam negeri masih kurang sehingga lebih memilih barang impor.

Nah itulah berbagai permasalan yang dihadapi negara maju, dan pada kenyataannya mungkin akan lebih banyak lagi.

Hambatan Pembangunan Di Indonesia

Salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan kita bangsa Indonesia lambat berkembang adalah karena tidak berorientasi kepada akar kemampuan bangsa sendiri.

Susilo Bambang Yudoyono (www.wartapedia.com) mengungkapkan beberapa hambatan dalam pembangunan yaitu:

1. Pemerintah pusat, utamanya birokrasi, sering lambat dan bahkan tidak sejalan dengan sebuah rencana.
2. Penyakit kedua, pemerintah daerah sering karena ada kepentingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung menghambat.
3. Hambatan ketiga, ketika investor ingkar janji atau gagal memenuhi komitmen dan rencananya.
4. Keempat, sudah tahu ada regulasi yang menghambat dan bisa kita perbaiki tetapi tidak segera kita perbaiki.
5. Demokrasi harus membawa amanah, politik kita harus menjadi solusi, dan tidak boleh politik diabdikan untuk kepentingan-kepentingan sempit yang mengunci segalanya.

Lima (5) ciri administrasi yang umumnya ditemukan di negara berkembang

1. Pola dasar (*basic pattern*) administrasi publik di Indonesia bersifat jiplakan (imitative) dari pada asli (*indegenous*). Di negara-negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara yang pernah dijajah umumnya mengikuti pola administrasi negara yang menjajahnya.
2. Birokrasi di negara berkembang kekurangan sumberdaya manusia terampil untuk menyelenggarakan administrasi pembangunan. Kekurangan ini bukan pada kuantitas, melainkan kualitas.
3. Birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi pada hal-hal lain ketimbang mengarah pada yang benar-benar menghasilkan. Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya daripada kepentingan masyarakat.
4. Adanya kesenjangan yang lebar antara yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Budaya yang hidup adalah budaya formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi.
5. Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan dari administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka.

Proses Perubahan terencana yang kesinambungan untuk menciptakan kehidupan masyarakat lebih baik. Tantangan Pembangunan ekonomi Indonesia;

a. Perjalanan Pembangunan Indonesia memang menunjukkan

berbagai hal yang dapat membuat optimis bangsa, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Kinerja ekonomi Indonesia telah menunjukkan keadaan yang stabil, seperti terlihat melalui berbagai indikator makro.

b. Namun membaiknya indikator makro tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi yang terkait dengan persoalan kemanusiaan yang mendasar yakni masalah kemiskinan pengangguran.
c. Kemiskinan dan pengangguran, banyak disebabkan oleh masalh struktural dan kultural.
d. Pendekatan struktural membutuhkan penguatan ekonomi makro yang perlu dikaitkan dengan penguatan sektor rill.
e. Syarat penting untuk menggerakkan sektor rill adalah tersedianya investasi. Investasi memerlukan modal terutama dari sistem perbankan, namun sampai saat ini intermediasi perbankan sebagai salah satu fungsi terpenting perbankan dalam menyediakan kredit untuk sektor rill belum sepenuhnya berjalan.

Hakikat Pembangunan

- Prof. Dr. Otto Soemarwoto (1992:39) Pembangunan pada hakekatnya adalah "gangguan" terhadap kesinambungan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan baik keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih baik.
- Pasal 16, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan LH, yang telah pula "disempurnakan" menjadi pasal 15 dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LH yang memuat:
- Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang mungkin akan menimbulkan dampak ("besar" dan) penting terhadap LH

wajib memiliki (melaksanakan) analisis mengenai dampak LH.

- Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak ("besar" dan) penting terhadap LH, sebagai (mana) dimaksud pada ayat 1 di atas). Serta tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Disempurnakan lagi menjadi Pasal 22 dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH yang memuat antara lain:

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap LH wajib memiliki AMDAL.
- Pasal 23 UU No. 32 tahun 2009 memuat antara lain:
  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri.

Hubungan Kemiskinan Dengan Pembangunan

- **Pengertian pembangunan :**

1. **Hettne (2001)** mengungkapkan bahwa "tidak ada definisi baku dan final mengenai pembangunan yang ada adalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu".
2. **Randy dan Riant (2006:10)** menjelaskan definisi pembangunan yaitu "sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Perubahan alami adalah perubahan yang diciptakan, dimulai, ditentukan, digerakkan, dan diselenggarakan oleh tindakan publik".

3. **Susanto (1974:137),** pembangunan adalah "pemanfaatan dan pengarahan perubahan masyarakat ke arah kemajuan suatu bangsa dalam bentuk materi dan non materi".
4. **Susanto, Tjokroamidjojo (1995:222)** mendefinisikan pembangunan sebagai : "suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa usaha pembaharuan tersebut, pada umumnya dilakukan dengan peranan pemerintah yang aktif dan dengan usaha berencana".
5. **Briyant & White (1987:21)**, pembangunan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya.
6. **Misra dalam Tjokroamidjojo (1995:9)** mendefinisikan "pembangunan adalah sebagai upaya sadar dan melembaga sehingga pembangunan tidak boleh tidak, akan bermuatan nilai yang artinya bahwa pembangunan ingin mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik di dalam citra suatu bangsa. Dengan tujuan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik sebagaimana didefinisikan dalam suatu negara (*an increasing of oneowncultural values*)".

- **Secara lebih terperinci, Siagian (1995:2-3) merangkum beberapa pengertian tentang pembangunan, yaitu :**

1. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan.
2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang sadar dilaksanakan.
3. Pembangunan yang dilakukan secara sederhana dan perencanaan tersebut berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

4. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan yang dimensional artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara.
6. Bahwa semua hal yang telah disebutkan tadi ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian
7. Pada hakikatnya pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan sadar dan secara terus menerus serta berkesinambungan untuk mencari solusi, memperbaiki dan menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar individu ataupun suatu kelompok masyarakat mampu memperbaiki taraf kehidupannya menjadi lebih baik.
8. Kenyataannya pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi telah gagal atau terdistorsi sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan rakyat malah telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial serius di tengah masyarakat sampai sekarang ini, seperti kemiskinan, disharmonisasi keluarga, tindakan kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan dan meningkatkan pengangguran. (Chamsyah: 2006:133)

a. Sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan sebelumnya lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi, telah mendasari lahirnya paradigma baru dalam pembangunan yaitu pembangunan sosial.
b. Chamsyah (2006:25) mengatakan: “paradigma pembangunan kita hari ini adalah bahwa pembangunan sosial adalah salah satu sisi pembangunan, dan bukan penampungan masalah

pembangunan lain, khususnya pembangunan ekonomi

Isu pembangunan Indonesia

1. OTDA - kemajuan daerah (kesejahteraan daerah) - kemajuan bangsa - kemajuan daya saing daerah - daya saing bangsa - MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MEA.
2. Pembangunan Bali - Sumatra : Lebih maju dari timur (NTT, Maluku, Kalimantan, s.d. Papua) KARENA PERBEDAAN; kondisi alam, geografi, budaya dan sosial, SDA, SDM.
3. Daerah perbatasan: pemenuhan hak daya rakyat; Layanan pendidikan, gizi, sandang pangan dan kemiskinan, pengangguran dan air bersih, pencurian bahkan pembabatan hutan.
4. Keunggulan komperatif dan kompetitif : Belum optimal pemanfaatan
   - Pemecahannya : Kebijakan, program, kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektoral dengan kesesuaian lintas ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal; serta koordinasi dan kerjasama yang solid antar kementerian dan kesatuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan program dan pembangunan, pemecahan berbagai masalah daerah --- pembagian integral dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019
   - Sebuah kritik review terhadap buku "Administrasi Negara-Negara Berkembang" *(Fred W. Ringgs), "*Teori Pembangunan Dunia Ketiga", (DR. Arief Budiman) dan "Dari Kiri ke Kanan" *(Kevin P. Clemens)*

     Sejak akhir tahun tujuh puluhan isu berakhirnya **"Dunia Ketiga"** mulai terdengar. Salah satu indikasinya adalah

berkembangnya proses pembangunan pada 125 negara berkembang yang pada akhirnya berpredikat sebagai negara **"Dunia Ketiga"**. Kelompok negara tersebut mempunyai perbedaan tingkat pencapaian dan proses pembangunan, problem dan kepentingan yang semuanya itu mempersulit pembuatan kategorisasi dan konseptualisasi **"Dunia Ketiga".** Heterogenitas dan diferensiasi, ketidaksepakatan dan ketertutupan mulai menjadi kata kunci dalam perlakuan tentang istilah dan perjalanan sejarah **"Dunia Ketiga"**.

- *Andreas Boechkh (1993, 111)* memperkirakan bahwa berakhirnya "**Dunia Ketiga"** dapat dilihat dari adanya perbedaan besar dalam dinamika pembangunan "Dunia Ketiga". Lebih lanjut dinyatakan bahwa mungkin juga "**Dunia Ketiga"** tidak pernah ada dalam arti yang sebenarnya. T
- Terutama sekali karena tidak ada kesamaan karakteristik, struktur, prasyarat pembangunan dan satu dinamika pembangunan yang dapat menyatukannya. "Dunia Ketiga" dianalisa dengan kategori yang sama.

Latar belakang kemiskinan

1. Kemiskinan merupakan masalah akut yang selalu yang menyertai perjalanan setiap negara yang sedang berkembang termasuk juga dihadapi oleh Indonesia.
2. Kemiskinan sesuatu yang sangat sulit dihilangkan, hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan masalah sosial yang faktor penyebabnya berkaitan dengan masalah-masalah sosial lainnya.

Zygmunt Baumant menyatakan bahwa kemiskinan (termasuk di dalamnya orang-orang miskin) merupakan kondisi kekurangan yang selalu dihadapi oleh masyarakat dunia dimanapun baik itu masa

lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang jika tidak dilakukan perubahan-perubahan yang cukup

Secara garis besar faktor penyebab kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam 3 faktor yaitu :

a. **Faktor struktur**; faktor ini melihat bahwa kemiskinan merupakan sesuatu yang melekat pada suatu masyarakat.
b. **Faktor kultural** ; faktor ini berhubungan dengan budaya yang ada dalam suatu masyarakat maupun nilai yang ada dalam individu.
c. **Faktor kesengajaan** ; faktor ini melihat bahwa kemiskinan muncul karena adanya kesengajaan dari pihak-pihak tertentu.
d. Contoh beberapa cara pengentasan kemiskinan ;
e. Tahun 1970-an melalui program Inmas dan Bimas yaitu lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan hidup.
f. Tahun 1990-an dengan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, distribusi modal, dan penguatan lembaga-lembaga kemasyarakatan diantaranya IDT (Inpres desa tertinggal), P3DT (pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal), PPK (program pengembangan kecamatan).

Cara lain untuk mengentaskan kemiskinan yaitu :

a. **Penumbuhan jiwa wirausaha** dalam masyarakat : Menurut Ciputra angka yang ideal penduduk yang wirausaha yaitu 2% dari jumlah penduduk. Sedangkan di Indonesia baru ada sekitar 400 ribu orang wirausaha, menurutnya angka tersebut belum ideal untuk membangkitkan perekonomian Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa.
b. **Wirausahawan sosial** : Jumlah wirausahawan sosial sampai saat ini masih belum teridentifikasi secara pasti disebabkan karena wirausahawan sosial bekerja tidak mementingkan

popularitas dan materi melainkan bagaimana dapat memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat dapat mandiri.

Kondisi kemiskinan

1. Kemiskinan adalah permasalahan yang bersifat multidimensi.
2. Kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekadar kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi materi dasar, melainkan di dalamnya mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi dan ketersisihan dalam peranan sosial.
3. Suatu kesalahan jika saat ini orang-orang yang disebut sebagai orang miskin derajat kemanusiaannya hanya dipersamakan dengan beberapa kilo kalori.

BAB III

PEREKONOMIAN DUNIA

Kondisi di Indonesia;

A. Di Indonesia, pernah digunakan dua ukuran ;

1. Ukuran BPS yang menggunakan pendekat*an* ***basic needs*** dengan indikator ***Head Count Index (HDI)*** dan bersifat makro.
2. Ukuran menurut BKKBN yang lebih bersifat mikro.
3. Pengukuran kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non moneter, yaitu kemiskinan diukur dari akses penduduk akan kesehatan, pendidikan, kemampuan mengemukakan aspirasi dll.

B. Permasalahan kemiskinan dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1. Kegagalan pemenuhan hak dasar
2. Beban kependudukan
3. Ketidaksertaan dan ketidakadilan gender

C. Kondisi Kemiskinan

1. Kondisi kemiskinan di Indonesia dilihat dari sisi pendidikan; ketenagakerjaan; fertilisasi, mortalitas dan harapan hidup; kesehatan dan fasilitas perumahan.

2. Biro Pusat Statistik (BPS) menetapkan 14 kriteria untuk menentukan keluarga miskin; meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.
3. Kemiskinan dapat terjadi karena :

a. Disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal
b. Disebabkan oleh sistem; seperti ketidakmerataan pembangunan yang bersifat Pulau Jawa-sentris, regulasi pendidikan.

D. Beberapa macam jenis manusia, yaitu :

1. Orang yang tidak mau menyerah kepada keadaan, contoh orang miskin yang berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kerja keras dan usaha yang tidak kenal menyerah.
2. Orang yang menyerah pada keadaan, bersikap apatis, bahkan menjadi fatalis. Dalam keadaan tertentu keadaan mereka malah memburuk sesuai dengan harapan yang semakin berkurang.
3. Orang yang melihat kemiskinan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan tertentu, biasanya orang tipe golongan ini bersifat pemalas, cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya.
4. "Nyaman dengan kemiskinan" merupakan pola hidup yang akan meluas dan menjadi penyakit yang semakin menggerogoti kehidupan masyarakat apabila tidak ditanggulangi dan diobati.

E. Kondisi kemiskinan dapat dipandang sebagai :

1. **Kekurangan material**; kemiskinan dan orang-orang miskin dipandang sebagai komunitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Akibatnya muncul berbagai

masalah akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seperti munculnya daerah kumuh, kekurangan gizi, dll.

2. **Tidak terpenuhinya kebutuhan dan hubungan sosial**; dalam hal ini kemiskinan dan orang-orang miskin mempunyai kendala dalam mengadakan interaksi dalam masyarakatnya. Akibatnya orang miskin terkucil secara sosial, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
3. **Kekurangan pendapatan dan kemakmuran**; berhubungan erat dengan pandangan pertama karena kurangnya pendapatan akan berhadapan dengan kekurangan material

F. Solusi penanganan kemiskinan dalam meningkatkan tujuan pembangunan

1. Penanggulangan kemiskinan adalah suatu proses panjang yang memerlukan penanganan berkelanjutan.
2. Salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian sasaran program penanggulangan kemiskinan adalah dengan meningkatkan elemen pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin.
3. Keberdayaan masyarakat miskin ditujukan agar :
4. masyarakat miskin mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga secara swadaya memiliki kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan,
5. Mereka mampu memanfaatkan sumber daya produktif yang tersedia, baik yang sudah ada di masyarakat maupun yang disediakan Pemerintah berbagai program

G. Upaya pemerintah melakukan sinergi dan mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor seperti :

1. Dalam wadah PNPM Mandiri yang dilakukan sejak tahun 2007, program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diharapkan dapat diarahkan secara harmonis guna menciptakan modal sosial.
2. Tahun 2009 PNPM Mandiri terus dibiakkan dengan berbagai langkah pengendalian harga bahan pokok.

H. Rencana pemerintah (RKP) tahun 2009 telah menetapkan arah kebijakan

Pengurangan kemiskinan atas 2 kelompok :

1. Pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin.
2. Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
3. Peningkatan usaha rakyat.

I. Masalah Kemiskinan

1. Kuncoro (1997: 102-103) Mengemukakan Definisi Kemiskinan Sebagai Ketidakmampuan Untuk Memenuhi Standar Hidup Minimum. Definisi Tersebut Menyiratkan 3 Pernyataan Dasar, Yaitu :

a. Bagaimanakah Mengukur Standar Hidup
b. Apa Yang Dimaksud Dengan Standar Hidup Minimum
c. Indikator Sederhana Yang Bagaimanakah Yang Mampu Mewakili Masalah Kemiskinan Yang Begitu Rumit?

J. Beberapa kosakata standar dalam kajian kemiskinan Friedmann (1992:89)

1. *Power line* (garis kemiskinan), yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial.
2. *Absolute and relative poverty* (kemiskinan absolut dan relatif),

kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang jatuh di bawah standar konsumsi minimum dan karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal).

3. *Deserving poor* adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-orang non-miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan.
4. *Target population* (populasi sasaran) adalah kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah

K. Friedmann juga merumuskan kemiskinan sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya)
2. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum dan fasilitas kesehatan dan pendidikan)
3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka
4. Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia

Penciptaan lapangan kerja (*employment*) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

L. Beberapa faktor pandangan standar kemiskinan

1. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin

dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebutan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.

2. Adapun pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
3. Selama periode 1976-1993 telah terjadi peningkatan batas garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.
4. Garis kemiskinan yang paling dikenal adalah garis kemiskinan Sajogyo, suatu garis kemiskinan didasarkan atas harga beras.
5. Kartasasmita (1997:234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.
6. Kartasasmita (1997:234) ; masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

M. Pengertian kemiskinan :

1. Freidmann (1992:123) kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial.
2. Menurut Brendley (dalam Ala, 1981:4) kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.
3. Salim (Ala, 1981:1) kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

4. Lavitan mengatakan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

N. Kriteria Kemiskinan

- Www.CalegIndonesia.Com Menyebutkan Beberapa Kriteria Kemiskinan Sebagai Berikut :

1. Hidup Dalam Rumah Dengan Ukuran Lebih Kecil Dari $8m^2$
2. Hidup Dalam Rumah Dengan Lantai Tanah Atau Lantai Kayu Berkualitas Rendah
3. Hidup Dalam Rumah Dengan Dinding Terbuat Dari Kayu Berkualitas Rendah
4. Hidup Dalam Rumah Yang Tidak Dilengkapi Dengan WC
5. Hidup Dalam Rumah Tanpa Listrik
6. Tidak Mendapatkan Fasilitas Air Bersih
7. Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak
8. Mengkonsumsi daging atau susu seminggu sekali
9. Belanja satu set pakaian baru setahun sekali
10. Makan hanya sekali atau dua kali sehari
11. Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat
12. Pendapatan keluarga kurang dari Rp.600.000,- per bulan
13. Pendidikan kepala keluarga hanya setingkat SD
14. Memiliki tabungan kurang dari Rp.500.000
15. Mempekerjakan anak di bawah umur
16. Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah

O. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan bahwa kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar

Rp.211.726 atau sekitar Rp.7000 per hari.

1. BPS merelease mengenai kriteria kemiskinan di Indonesia dengan urutan sebagai berikut :
   a. **Tidak miskin**, pengeluaran/orang/bulan lebih dari Rp.350.610
   b. **Hampir tidak miskin**, pengeluaran/kepala antara Rp.280.488 -Rp.350.610 atau Rp.9.350 - Rp.11.687 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27.12 juta jiwa
   c. **Hampir miskin**, pengeluaran/bulan/kepala Rp.233.740 - Rp.280.488 atau Rp.7.780 - Rp.9.350 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta
   d. **Miskin**, pengeluaran/bulan/kepala Rp.233.740 – ke bawah atau Rp.7.780 – ke bawah/orang/hari. Jumlahnya mencapai 31 juta
   e. **Sangat miskin (kronis)** tanpa kriterianya pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui jumlahnya mencapai sekitar 15 juta
2. Kemiskinan dalam pandangan Syariah berulang-ulang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Selain miskin ada juga istilah yang berdekatan atau tumpang tindih dengannya yaitu faqir.
3. Kedua sering dijadikan dua kata yang melekat yaitu **fakir miskin**, padahal kata tersebut mempunyai arti yang spesifik.
   a. **Orang-orang faqir (Fuqara')**. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang dimaksud dengan Faqir yaitu orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya atau hanya mencukupi hajat paling asasinya.
   b. **Orang-orang miskin (Masakin).** Yaitu orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya.

P. Alat Ukur Kemiskinan

1. Dalam Upaya Mengetahui Tingkat Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Manusia, Biro Pusat Statistik Telah Mengembangkan Alat Ukur Yang Dikenal Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Mengukur Seberapa Tinggi Tingkat Pembangunan Manusia Yang Mencakup 4 Variabel, Yaitu :
   a. Harapan Hidup
   b. Angka Melek Huruf
   c. Rata-Rata Lama Sekolah
   d. Penghasilan Riil Kapita Yang Disesuaikan
3. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kemiskinan manusia yang mencakup 5 variabel :
   a. Penduduk yang diperkirakan tidak mencakup umur 40 tahun
   b. Angka buta huruf penduduk dewasa
   c. Penduduk tanpa akses pada air bersih
   d. Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan
   e. Balita kurang gizi
   f. Dari alat ukur tersebut dapat diperoleh informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial penduduk. Semakin tinggi tingkat IPM penduduk, menggambarkan semakin banyaknya penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan. Hidup dan mengakses pelayanan sosial, dan rendahnya IKM menggambarkan sedikitnya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
4. BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*)
2. Pendekatan Head Count Index.
3. Garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu :
    a. Garis kemiskinan makanan (*food line*)
    b. Garis kemiskinan non makanan (*non food line*)

5. Mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris :
    a. The incidence of proverty, presentasi dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Dikenal dengan rasio H.
    b. The dept of proverty, yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK). Dikenal dengan *proverty gap index*
    c. The severity of property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Dikenal dengan *distributionally sensitive index dapa*

Q. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha

Pada periode 1960 - 1965 perekonomian Indonesia berada pada masa sulit dan menghadapi masalah yang besar. Kebijakan pemerintah masih terkonsentrasi pada bidang politik. Situasi ekonomi dan politik tidak stabil. Pertumbuhan PDB sangat rendah dan inflasi sangat tinggi.

Pada periode 1966 - 1968 yang merupakan masa transisi dari orde lama ke orde baru, ekonomi Indonesia mulai menggeliat dan menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai lima persen.

Pembangunan nasional mulai terarah dan terencana melalui repelita. Dalam kurun waktu 1969–1973 pertumbuhan ekonomi meningkat tajam, dengan rata-rata pertumbuhan di atas tujuh persen. Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh ekspansif dengan pertumbuhan dua digit (*double digit*), begitu juga Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang menjadi sumber pertumbuhan pada periode ini.

Pada periode 1974 - 1983, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik. Dukungan program-program repelita sebelumnya menjadikan pertumbuhan rata-rata PDB mencapai 6,66 persen. Capaian ini sedikit lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya resesi ekonomi dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional. Pada periode ini sektor-sektor sekunder masih menunjukkan perkembangan yang baik.

Selanjutnya periode 1984 - 1993 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat dibanding periode sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 6,06 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, beberapa kebijakan ekonomi diluncurkan melalui paket-paket deregulasi seperti deregulasi perbankan serta ekspor dan impor. Tatanan ekonomi semakin diperbaiki dimana investasi dipacu lebih cepat dan pola produksi diarahkan ke pasar luar negeri.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia seperti negara lainnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pada pertengahan 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sebesar 4,70 persen. Dampak krisis ekonomi semakin nyata di tahun 1998 dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hebat sebesar 13,13 persen dan merupakan pertumbuhan terendah sejak Indonesia merdeka. Seluruh lapangan usaha ekonomi mengalami kontraksi pertumbuhan. Konstruksi merupakan lapangan usaha yang mengalami pukulan hebat akibat krisis ekonomi, diikuti Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan serta Perdagangan, Hotel, dan

Restoran.

Pada tahun 1999, dampak krisis ekonomi mulai dapat dikendalikan. Ekonomi Indonesia saat itu berada dalam masa perbaikan (*recovery*) dan mampu tumbuh 0,79 persen. Ekonomi Indonesia terus membaik dimana tahun 2000 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen. Selanjutnya Ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2001 - 2010 berkembang semakin baik dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit tekanan ketika terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Kondisi ini memberikan dampak pada ekonomi Indonesia tahun 2009 yang hanya tumbuh 4,63 persen melambat dibanding capaian tahun 2008 sebesar 6,01 persen. Tahun 2010, perekonomian Indonesia kembali membaik dengan capaian pertumbuhan sebesar 6,22 persen.

Dalam kurun waktu 2011 - 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perlambatan yang terjadi pada beberapa lapangan usaha, diantaranya Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan dan Perdagangan. Perlambatan di Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi serta perlambatan pada Pertambangan Batu Bara dan Lignit pada tahun 2014. Perlambatan di Industri Pengolahan disebabkan kontraksi pada Industri Batubara dan Pengilangan Migas serta perlambatan di beberapa industri bukan migas lainnya. Perlambatan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda motor disebabkan oleh perlambatan yang terjadi pada perdagangan besar dan eceran bukan mobil sepeda motor.

A. Investasi

(Investasi**)** Tabungan Dalam Negeri dalam pembangunan ekonomi sangat penting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam pembentukan modal.

Pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan tentang pentingnya proses pembentukan modal fisikal mungkin merupakan pendekatan yang paling populer, meskipun dalam dua dekade terakhir sudah banyak mengkritiknya.

Beberapa tiga hal yang menyebabkan kritikan terhadap pendekatan ini, yaitu :

Pertama Jika dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain, pendekatan ini mempunyai landasan teoritis yang cukup kuat, seperti ditunjukkan oleh *Harrod-Domar* yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan investasi dengan pendapatan nasional. Pandangan yang menganggap bahwa pembentukan modal merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan suatu negara ini kemudian kita kenal sebagai aliran ***fundamentalisme modal (capital fundamentalism).***

Kedua adalah karena aliran fundamentalisme modal ini sejalan dengan tujuan-tujuan dan keinginan dari para donor bantuan-bantuan luar negeri atau asing pada era tahun 1950-an dan 1960-an. Keterbatasan modal dinilai sebagai hambatan pokok bagi percepatan pembangunan ekonomi di setiap negara. Selain itu, setiap kerangka perencanaan pembangunan di berbagai negara. Program tersebut menunjukkan betapa pentingnya modal awal dan perlunya suntikkan awal modal asing (terutama dalam wujud bantuan luar negeri) yang cukup besar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Ketiga alasan lain mengapa aliran fundamentalisme modal ini bisa bertahan adalah karena kerangka kerjanya cukup fleksibel dalam memasukkan gagasan-gagasan baru dalam ilmu ekonomi, khususnya tentang konsep modal insani (human capital). Modal insani ini jika dibandingkan dengan stok modal fisikal, maka perbandingan tersebut sangatlah besar. Bahkan untuk beberapa negara maju, rasio antara modal insani dan modal fisikal bisa mencapai angka 1.1.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa nilai persediaan modal insani ternyata sama

dengan nilai persediaan modal fisikal. Hal ini merupakan kritik secara tidak langsung terhadap peranan modal fisikal dalam pembangunan ekonomi.

B. Sumber Tabungan Dalam Negeri

Pada umumnya, NSB membiayai rasio investasi GDP mereka yang lebih tinggi dengan cara mengidentifikasikan usaha-usaha mobilisasi tabungan dari berbagai sumber, baik tabungan domestic maupun tabungan luar negeri, tabungan pemerintah maupun tabungan swasta. Jumlah tabungan yang tersedia di suatu Negara (S) secara merupakan hasil akumulasi atas jumlah tabungan domestic (S_d) dan tabungan luar negeri (S_f) tabungan domestik dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu : 1. tabungan pemerintah (S_g), dan 2. Tabungan swasta (S_p). Tabungan pemerintah itu sendiri terdiri dari tabungan anggaran yang diperoleh dari *surplus* penerimaan pemerintah atas konsumsinya, di mana konsumsi pemerintah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang plus semua aliran modal keluar (*capital outflows*) untuk pembelian peralatan-peralatan militer. Untuk Indonesia, contoh-contoh konsumsi pemerintah ini meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk subsidi daerah otonom, subsidi pangan, gaji pegawai negeri dan angkatan bersenjata, perbaikan jalan-jalan dan jembatan dan pembayaran atas cicilan hutang plus bunga.

a. Tabungan Domestik

NSB sebagai sebuah kelompok telah mengintensifkan usaha-usaha mobilisasi tabungan sejak tahun 1980. Bagi sebagian kecil negara kecenderungan harga ekspor dari sumber daya alam mereka cukup memberikan pengaruh yang signifikan pada kapasitas menabung mereka, Kebijakan-kebijakan pemerintah juga mempunyai dampak yang cukup besar bagi kemampuan NSB dalam

memobilisasi tabungan domestic mereka. Di beberapa negara, yang pemerintahnya secara aktif berusaha menetapkan kebijakan fiscal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan tabungan dengan menggunakan instrument-instrument kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, banyak juga pemerintah di beberapa NSB yang memperhatikan peningkatan tabungan domestik mereka, tetapi masih mengandalkan pada instrument-instrument kebijakan yang kurang tepat dalam memobilisasi tabungan.

b. Tabungan pemerintah

Pada umumnya tabungan pemerintah hampir seluruhnya diperoleh dari surplus atas penerimaan pajak secara keseluruhan terhadap konsumsi pemerintah (S_{gb}). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hanya ada sedikit sekali kasus dimana tabungan pemerintah dari badan usaha milik Negara (BUMN) yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tabungan pemerintah secara keseluruhan. Peran tabungan pemerintah ini sangatlah kecil dan itu pun hanya terjadi di beberapa negara saja. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tabungan pemerintah dalam bagian ini dibatasi pada tabungan anggaran saja.

c. Tabungan swasta

Saat ini para ekonomi, pemberi bantuan (donor) dan para pembuat keputusan di NSB masih beranggapan bahwa tabungan domestic swasta sebagai sumber dana kedua sesudah tabungan pemerintah dan bantuan asing dalam struktur pembiayaan investasi. Namun, banyak bukti empiris di sebagian besar NSB yang menunjukkan bahwa tabungan swasta ternyata memainkan peranan penting dalam menunjang proses pembentukan modal di dalam negeri.

C. Faktor Penentu Tabungan Swasta

Perilaku Tabungan Rumah Tangga

1. Dalam suatu negara, pada suatu waktu tertentu, bagian pendapatan yang ditabung oleh rumah tangga yang berpendapatan lebih tinggi cenderung lebih besar daripada rumah tangga yang berpendapatan lebih rendah.
2. Dalam suatu negara, rasio tabungan rumah tangga cenderung konstan sepanjang waktu.
3. Rasio tabungan rumah tangga bervariasi antarnegara tanpa menunjukkan adanya hubungan yang jelas dengan pendapatan.

D. Sekilas Tentang Sumber Pembiayaan Dalam Negeri Indonesia :

Indonesia sebagai NSB juga mengalami masalah kesenjangan investasi-tabungan, karena pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan dan industrialisasi menuntut adanya investasi dalam jumlah besar.

Tabungan pemerintah, tabungan swasta dan tabungan domestik

Jumlah tabungan swasta pada akhir pelita IV besarnya hampir sepuluh kali lipat dari jumlah tabungan pemerintah. Hal tersebut mengindikasi peranan sektor swasta yang begitu kuat dalam proses pembentukan modal di tanah air. Meningkatnya peran sektor swasta ini tidak terlepas dari serangkaian kebijakan deregulasi yang diluncurkan pemerintah. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan pemerintah selain peminjaman plus hibah dikurangi pengeluaran rutin.

E. Pembangunan Yang Dihadapi Tidak Hanya Prospek Terbatas Pertumbuhan Secara Keseluruhan, Tetapi Juga Pertumbuhan Pro-Poor.

Selama tahun 1980 ketika tingkat pertumbuhan secara keseluruhan agak rendah, pengurangan kemiskinan di India lebih spektakuler (dari 51 persen menjadi 36 persen), terutama disebabkan terobosan pertanian. Demikian pula, Bangladesh mengurangi kemiskinan secara substansial pada tahun 1980 (dari 70 persen menjadi 48 persen) dengan meningkatkan produksi pangan. Negara-negara berkembang harus berusaha untuk terlibat dengan ekonomi dunia, tapi hati-hati dan dengan cara mereka sendiri. Pembukaan dini dapat menyebabkan baik untuk perpindahan langsung dari kegiatan ekonomi dan hilangnya pertumbuhan atau distribusi yang tidak merata dari keuntungan. Hanya jika pemerintah tepat urutan liberalisasi perdagangan dan neraca modal dapat globalisasi mendukung miskin. Strategi investasi dalam negeri harus mencari untuk memulai proses pertumbuhan adat sebelum membuka ke ekonomi global. Secara bersamaan, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat pembangunan manusia untuk menghadapi tekanan persaingan globalisasi dan untuk mengatasi kelembagaan kendala-seperti tidak adanya pengaturan yang memadai untuk pemasaran, kontrol kualitas, transfer teknologi, dan penelitian dan pengembangan-yang menghambat pembangunan sektor ekspor.

Salah satu implikasi dari liberalisasi perdagangan yang jarang diteliti adalah implikasi yang merugikan pembangunan manusia melalui dampak pada pendapatan masyarakat. Sebagian besar negara-negara berkembang sangat bergantung pada pajak perdagangan internasional untuk pendapatan karena mereka relatif mudah untuk mengumpulkan. Scaling down tarif impor sebagai bagian dari liberalisasi perdagangan telah menyebabkan kerugian pendapatan yang cukup besar karena ketidakmampuan untuk menggantikan tugas kustom dengan perpajakan yang lebih efektif dari pendapatan domestik, produksi, dan transaksi yang memerlukan administrasi perpajakan yang lebih canggih. Kekurangan pendapatan

dapat menyebabkan pemotongan besar pada pembangunan manusia pada saat negara-negara berkembang membutuhkan lebih banyak pengeluaran di daerah-daerah.

Prinsip umum yang dapat diturunkan dari contoh ini adalah bahwa pertumbuhan untuk segera mengurangi kemiskinan, harus mengarahkan sumber daya secara tidak proporsional untuk: sektor di mana masyarakat miskin bekerja (seperti pertanian); daerah di mana mereka tinggal (seperti kita daerah tertinggal); dan output yang mereka konsumsi (seperti makanan). Ini berarti bahwa strategi pertumbuhan pro-poor terutama terdiri dari penciptaan lapangan kerja dikombinasikan dengan stabilitas harga relatif barang dan jasa penting, seperti makanan, dalam keranjang konsumsi masyarakat miskin.

Berdasarkan prinsip-prinsip umum, ada empat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan: kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro atau mikro sektor, kebijakan restrukturisasi, dan kebijakan redistributif.

1. Kebijakan ekonomi makro

Bahan makroekonomi utama pertumbuhan pro-miskin tingkat tinggi kerja dan rendahnya tingkat inflasi. Namun, dalam arti kurva Phillips klasik, bisa ada trade-off antara dua tujuan tersebut. Artinya, mencapai stabilitas harga memerlukan membatasi tingkat agregat demand, dengan ini implikasi buruk pada tingkat output dan kesempatan kerja. Atau, meningkatkan tingkat kerja memerlukan merangsang permintaan, yang dapat meluas ke tekanan inflasi. Ini trade-off dapat dikurangi, namun, jika ada kelebihan kapasitas dalam perekonomian atau jika upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas faktor.

Konsensus Washington tradisional pada stabilisasi makroekonomi yang didukung oleh lembaga keuangan internasional

overemphasizes inflasi yang rendah, sering dengan mengorbankan pertumbuhan dan perkembangan. Secara khusus, obsesi dengan menghilangkan defisit fiskal (dan, dengan demikian, defisit transaksi berjalan), jika dicapai melalui pengurangan dalam pengeluaran publik pada kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Telah menghambat proses pertumbuhan dan menciptakan kemiskinan lebih. Bertentangan dengan pandangan bahwa defisit fiskal yang lebih tinggi mendesak keluar investasi swasta dengan menaikkan suku bunga, ada bukti empiris persuasif bahwa jika defisit fiskal yang lebih tinggi disebabkan oleh pengeluaran investasi publik yang lebih besar, dari ini mungkin benar-benar "berkokok di" investasi swasta secara bersih dengan menghapus kemacetan fisik infrastruktur dan dengan demikian meningkatkan produktivitas faktor investasi swasta. Selain itu, pengeluaran publik yang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan lebih baik membekali mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, adalah merupakan titik optimal dalam inflasi pengangguran trade-off dari sudut pandang pengentasan kemiskinan? Pengalaman tampaknya merangsang investasi dan pertumbuhan. Selama inflasi moderat, itu perlu untuk meredam pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan didorong oleh ekspansi fiskal dapat membantu defisit pemerintah keuangan selama mereka tidak berlebihan melalui pertumbuhan cepat pendapatan pajak. Tingkat yang lebih besar dari investasi publik, mengembangkan sumber daya manusia, dan mengurangi kemiskinan.

kinerja ekonomi Pakistan dalam beberapa tahun terakhir adalah contoh utama dari proses stabilisasi pergi terlalu jauh, di bawah naungan program IMF yang sedang berlangsung, yang memiliki pertumbuhan substansial terbelakang dan menyebabkan peningkatan pesat dalam pengangguran dan kemiskinan (dari sekitar 20 persen pada awal 1990-an untuk lebih dari 33 persen saat

ini). Selama tahun 1990, pengeluaran pembangunan sektor publik dipotong dari hampir 10 persen dari PDB menjadi kurang dari 3 persen. Sekarang tingkat stabilisasi ada, defisit transaksi berjalan telah diubah menjadi surplus, dan cadangan devisa telah meningkat tajam. Perkembangan yang menguntungkan meliputi dimulainya kembali bantuan hibah oleh Amerika Serikat, utang penjadwalan ulang yang menguntungkan, dan arus masuk besar pengiriman uang rumah.

Namun untuk tingkat pertumbuhan turun drastis menjadi sekitar hanya 3 persen. Investasi swasta telah menurun dalam beberapa tahun terakhir sebagai kebijakan stabilisasi telah menyebabkan tingkat nyata bunga yang tinggi, biaya relatif lebih tinggi dari impor barang modal (karena depresiasi riil tukar riil yang tinggi). Kelebihan kapasitas yang signifikan karena tingkat rendah atau permintaan agregat, dan tidak adanya investasi publik pelengkap dalam infrastruktur. Stabilizations fiskal telah terbukti sulit dipahami dan defisit anggaran tetap tinggi (mendekati 7 persen dari PDB) terutama disebabkan kegagalan penerimaan pajak tumbuh di hadapan ekonomi stagnan.

2. Kebijakan Sektor ekonomi mikro atau Micro

Untuk pertumbuhan menjadi kemiskinan sangat mengurangi, itu harus berkontribusi untuk generasi pekerjaan lebih pada peningkatan angkatan kerja dan stabilitas harga barang-barang penting. Ini berarti bahwa pertumbuhan harus terkonsentrasi di sektor-sektor yang merupakan sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat miskin atau memproduksi dan jasa yang mereka konsumsi.

Sektor utama yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah pertanian. pembangunan pertanian di produksi pangan khususnya ditingkatkan dan lebih secara umum pembangunan pedesaan cenderung membuat kontribusi terbesar untuk mengentaskan

kemiskinan, terutama karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Tentu saja, sejauh mana dampaknya tergantung pada sifat dari nominal yang tidak sama distribusi awal tanah dan pada sifat dari strategi tertentu untuk mencapai pembangunan pertanian. Kenaikan kemiskinan pedesaan di Pakistan pada tahun 1990an selama periode pertumbuhan pertanian yang cepat (lebih dari 4 persen per tahun) dan pencapaian yang dihasilkan dari swasembada pangan menyoroti pentingnya faktor-faktor ini. Kenaikan kemiskinan pedesaan disebabkan baik untuk tingkat tinggi ketidaksetaraan di kepemilikan tanah pedesaan dan perubahan dalam sistem kepemilikan tanah dimana pangsa croppers telah diubah menjadi upah buruh.

Pengalaman dengan pertumbuhan pertanian pro-miskin adalah bahwa hal itu tergantung pada kemajuan teknis yang tepat, untuk contoh, penyebaran varietas unggul benih untuk meningkatkan makanan, seperti yang terjadi selama revolusi hijau di tahun 1960-an. Ini juga membutuhkan investasi yang lebih besar di infrastruktur pedesaan, misalnya, dalam jaringan irigasi sekunder dan tersier, jalan pertanian ke pasar, listrik, dan pelayanan sosial dasar. Menghapus harga pertanian represi telah membantu merangsang kerja pertanian dan produksi melalui peningkatan insentif. Namun, pemerintah harus berat ini terhadap konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat miskin pembeli sebagian besar makanan bersih perkotaan. Lebih besar mekanisasi pertanian, difasilitasi oleh pemberian diperluas kredit, telah memberikan kontribusi untuk distribusi yang lebih merata keuntungan output dan menyebabkan penggusuran tidak memiliki tanah kecil dan besar.

Sektor lain yang datang paling dekat untuk memenuhi kriteria tersebut adalah konstruksi, terutama jika itu berfokus pada penampungan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan pada penyediaan infrastruktur pro-miskin di daerah kumuh perkotaan dan

pemukiman liar atau ke desa-desa di daerah yang lebih ke belakang. pesatnya pertumbuhan sektor konstruksi dapat menyerap proporsi yang signifikan dari tenaga kerja tidak terampil. Banyak negara telah memasukkan program pekerjaan umum sebagai komponen penting dari strategi pengurangan kemiskinan mereka untuk tujuan menyerap pekerja pertanian musiman pengangguran dan pekerja migran tidak terampil di daerah perkotaan.

3. Kebijakan restrukturisasi

Pada 1980-an dan 1990-an, kebijakan restrukturisasi ekonomi semakin berfokus pada mengurangi peran negara sebagai agen terkemuka pengembangan dan negara mengintegrasikan lebih dekat ke dalam ekonomi global. Ini telah melibatkan satu set standar langkah-langkah seperti privatisasi dan deregulasi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, dan konvertibilitas neraca modal.

Pelajaran dari pengalaman baru-baru ini menyoroti kebutuhan untuk sequencing tepat dan laju reformasi. Krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia Timur 1997 menunjukkan dengan jelas kebutuhan untuk regulasi lebih kuat dari pasar modal dalam negeri dan sektor perbankan. Krisis ini, yang juga memicu runtuhnya ekonomi riil, menyebabkan pembalikan dramatis pengurangan properti di negara-negara seperti Indonesia dan Thailand. Semalam, ini krisis keuangan menghapus keuntungan pengurangan kemiskinan. Masalah sequencing yang salah yang terlihat di negara-negara seperti Pakistan di mana liberalisasi sektor keuangan, yang melibatkan pindah ke suku bunga berbasis pasar sebelum reformasi fiskal, telah memperburuk masalah defisit fiskal yang besar karena pertumbuhan eksplosif yang dihasilkan dalam kewajiban utang-servis. Ini telah ramai keluar pengeluaran pembangunan dan menyebabkan kurangnya investasi substansial dalam pembangunan manusia.

Privatisasi telah memiliki dampak ambigu pada kemiskinan. Dimana dalam memberikan kontribusi untuk efisiensi yang lebih besar, itu diberikan manfaat konsumen dengan baik kenaikan harga mengurangi harga atau membatasi dalam utilitas dasar. Namun, di mana hal itu mengarah pada pembentukan kuasi-monopoli, itu membatasi akses bagi masyarakat miskin dengan menghapus subsidi silang dan pentahapan keluar layanan merugi. Selain itu, privatisasi yang melibatkan perampingan besar tenaga kerja telah menyebabkan lebih banyak pengangguran dan kemiskinan dalam ketiadaan, pertama, investasi swasta apung untuk menciptakan kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja pengungsi dan, kedua, jaring pengaman sosial yang memadai untuk akses ke kredit dan pelatihan kembali mekanisme .

Kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan kuratif telah menyebabkan struktur dual ketentuan. Orang kaya memperoleh akses ke layanan pribadi yang lebih berkualitas dan melihat miskin standar layanan jatuh. Mundur dari penyediaan layanan oleh sektor publik dialihkan tenaga terampil seperti dokter dan guru untuk fasilitas pribadi yang lebih menguntungkan. Meskipun kasus dapat dibuat untuk privatisasi industri dan perdagangan dengan alasan efisiensi, pemerintah tetap peran penting dalam menjaga akses masyarakat miskin terhadap utilitas dan pelayanan dasar.

Selama tahun 1990, liberalisasi perdagangan menjadi strategi dasar dimana negara-negara berkembang bisa manfaat dari globalisasi dan mencapai pertumbuhan yang dipicu ekspor lebih cepat. Di negara-negara di mana tingkat awal represi perdagangan tinggi (dari contoh India dan Bangladesh) membuka pasar mereka tidak memberi keuntungan yang signifikan pada awal-ke pertengahan 1990-an. Sebagian besar negara terus menurunkan tarif impor

mereka, phase out pembatasan kuantitatif mereka, dan bergerak ke arah rezim nilai tukar berbasis pasar dalam substitusi impor. Secara bersamaan, insentif fiskal yang menarik dibuka lebih sektor untuk FDI. Namun optimisme secara bertahap memudar dalam menghadapi resesi keseluruhan di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara maju mengangkat hambatan untuk ekspor padat karya melalui kuota ekspor (seperti di tekstil) dan subsidi yang sangat besar (terutama untuk pertanian) kepada produsen dalam negeri. FDI sebagian besar masih terkonsentrasi di negara-negara berpenghasilan menengah.

Sementara penurunan tarif impor memiliki beberapa konsekuensi merugikan, terutama pada pengurangan kemiskinan. Banyak industri meninggal karena ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan impor lebih murah. Misalnya adat tukang dan kerajinan sektor India, mempekerjakan banyak orang di pondok dan industri rumahan, menghadapi kepunahan karena ketersediaan barang konsumen dasar yang diproduksi secara massal dari luar negeri. Sektor yang telah memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan dan investasi langsung asing di India, seperti sektor teknologi informasi, telah dasarnya muncul sebagai kantong-kantong ekspor dengan beberapa link mundur atau maju dengan ekonomi domestik.

4. Kebijakan redistributive

Sebuah studi terbaru oleh Institut Dunia Ekonomi Pembangunan telah menunjukkan bahwa ketimpangan telah meningkat dalam dua-pertiga dari negara-negara yang datanya dapat diandalkan tersedia. Beberapa penjelasan yang ditawarkan untuk ini termasuk perubahan berbasis keterampilan teknologi, melemahnya serikat buruh, liberalisasi perdagangan, dan distribusi miring dari FDI. Globalisasi tidak hanya memberikan kontribusi untuk ketidaksetaraan lebih besar di antara negara-negara, tetapi juga untuk ketimpangan yang

lebih besar dalam negara. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 1990-an itu, oleh karena itu, kurang pro-poor.

Pemerintah harus menemukan kebijakan ketimpangan-mengurangi yang juga dapat memberikan kontribusi untuk pertumbuhan atau setidaknya netral. Salah satu kunci dari reformasi adalah kebijakan redistributif yang mengubah alokasi sumber daya publik melalui mengubah pola pengeluaran yang menguntungkan orang kaya. Misalnya, Pakistan, subsidi jasa yang dikonsumsi oleh orang kaya menambahkan hingga sebanyak 4 persen dari PDB. Underpriced, layanan pro-kaya termasuk irigasi, listrik, dan pendidikan tinggi. Kebijakan harga yang tepat untuk layanan ini bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk subsidi silang layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Pengeluaran pajak, dalam bentuk pembebasan atau konsesi dalam penerapan hukum pajak (terutama yang berkaitan dengan pajak langsung), yang merajalela di banyak negara. Di Pakistan, mereka biaya hampir 4 persen dari PDB dalam hal pendapatan terdahulu dan termasuk perlakuan pajak disukai dari pendapatan diterima di muka, termasuk penghasilan dari keuntungan modal atau bunga; tarif efektif yang rendah pajak atau real estate; hak bebas pajak untuk fungsionaris pemerintah tingkat tinggi; dan pembebasan pajak penghasilan pertanian. Salah satu cara yang efektif untuk memperluas basis pajak adalah untuk menarik pengeluaran pajak ini bersama dengan secara bersamaan mengurangi tingkat pajak tidak langsung, yang umumnya regresif di alam dan efek buruk lebih buruk. Daerah lain besar atau reformasi dalam pengeluaran publik adalah untuk mengubah komposisi. Misalnya, pengeluaran pertahanan di banyak negara Asia Selatan secara substansial melebihi pengeluaran sosial. Upaya mencapai perdamaian dan stabilitas yang lebih besar di wilayah tersebut bisa menghasilkan dividen yang cukup besar dalam hal pengeluaran yang lebih besar pada kesehatan dan pendidikan.

Daerah lain di mana kebijakan redistributif bisa efektif dalam alokasi kredit perbankan. Hal ini akan melibatkan orientasi sektor perbankan terhadap kredit mikro bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pinjaman untuk usaha kecil dan menengah. Penekanannya harus o meningkatkan akses bukan pada kredit bersubsidi. Pengalaman lembaga keuangan seperti Grameen Bank di Bangladesh adalah bahwa penekanan ini dapat menjaga biaya intermediasi lebih rendah melalui pinjaman berbasis kelompok sementara mempertahankan kinerja pembayaran pada tingkat tertinggi, bahkan pada tingkat dekat-pasar yang menarik, melalui tekanan peer group dan prospek ulangi peminjaman. Sebaliknya, peminjam besar lebih mungkin untuk menjadi rentan terhadap kesalahan yang disengaja karena sistem patronase politik dan kroni kapitalisme, khususnya di bank-bank pemerintah. Selain itu, kredit yang tersedia untuk peminjam kecil dapat berkontribusi pendapatan dan pekerjaan untuk secara substansial lebih besar pengganda dan, dengan demikian, membantu mengurangi kemiskinan.

Akhirnya, kasus untuk reformasi tanah yang kuat di negara-negara di mana distribusi tanah sangat tidak merata. Misalnya, di Pakistan dan Filipina, atas 2 sampai 3 persen petani memiliki lebih dari sepertiga dari tanah. Isu reformasi tanah, bagaimanapun, perdebatan dari sudut pandang dampak pada produktivitas pertanian. Namun demikian banyak bukti empiris menyoroti tidak adanya hubungan positif antara ukuran lahan dan produktivitas. Tampaknya bahwa sementara peternakan lebih besar dapat menggunakan modal dan faktor non masukan lebih intensif, pertanian kecil kemungkinan akan ditandai dengan penggunaan yang lebih tinggi tanah, tanam, dan intensitas tenaga kerja. Secara keseluruhan, lahan reformasi pasangan dengan kredit diperluas dan pengaturan pemasaran yang lebih baik fundamental dapat mengubah posisi kaum miskin pedesaan.

5. Politik Ekonomi dari Kebijakan Pro-Poor

Apa Kelayakan Mengadopsi Kebijakan Pro-Miskin dan dalam kondisi apa mereka cenderung adopter? Bahkan dalam masyarakat seharusnya demokratis kita melihat bukti kekuasaan negara oleh elite, dimana kebijakan publik dan alokasi sumber daya publik yang bias mendukung yang kaya dan berkuasa. Kebijakan ekonomi yang pro-miskin tidak mungkin kecuali politik dan proses tata kelola yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Untuk kebijakan ekonomi untuk fokus pada pengentasan kemiskinan, struktur pemerintahan harus efektif dalam mencapai tujuan ini. Untuk membuat struktur tersebut efektif, koalisi pro-poor yang luas diperlukan.

Pilihan dan pelaksanaan kebijakan pro-poor jelas tergantung pada implikasi ekonomi politik dari proses. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Pertanyaan mendasar adalah apakah koalisi yang efektif dapat diatur untuk menggagalkan upaya oleh kelompok-kelompok vested interest yang kuat melihat perubahan sebagai zero sum game, dengan gainers didefinisikan dengan baik dan pecundang, maka mereka lebih cenderung untuk menolak. Inilah sebabnya mengapa upaya sekaligus-dan-untuk-semua pengurangan ketidaksetaraan, seperti land reform yang progresif, sangat sulit untuk menerapkan. Oposisi terhadap reformasi ini sangat ketat bukan hanya karena kerugian ekonomi potensial, namun juga karena dampak yang mendasar pada struktur kekuasaan pedesaan. Oleh karena itu, reformasi tanah telah biasanya datang setelah terjadinya peristiwa bencana besar (misalnya, perang, seperti di Jepang atau mengikuti partisi dari India) atau ketika masalah kemiskinan dan kerusakan sosial yang dihasilkan telah menjadi begitu serius pemerintah radikal telah muncul dengan agenda yang melibatkan perubahan struktural utama. Pengalaman baru-baru Nepal mengungkapkan bahwa, dalam menghadapi pemberontakan Maois, pemerintah dipaksa untuk

mengumumkan reformasi lahan utama, meskipun mereka telah sebagian besar tetap diimplementasikan sampai saat ini.

Kebijakan pro-miskin lebih mungkin jika kelompok vested interest melihat mereka sebagai sum game yang positif. Ini adalah kasus ketika pendapatan umumnya meningkat dengan cepat dan itu menjadi mungkin di margin untuk mendistribusikan bagian yang tidak proporsional dari keuntungan pendapatan dalam mendukung orang miskin, misalnya, Malaysia mampu mengejar program tindakan afirmatif yang kuat dalam mendukung Melayu asli yang lebih miskin dari penduduk Cina atau India, selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan pro-miskin juga pro-pertumbuhan dan strategi pembangunan berupaya mengatasi kemiskinan selama proses pertumbuhan.

Apa elemen kunci dari pemerintahan cenderung mendukung penerapan kebijakan pro-miskin? Perubahan sistemik dan institusional yang memungkinkan masyarakat miskin untuk memiliki suara kuat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang penting dan termasuk:

- Peraturan penerbangan. Kepentingan orang miskin dapat ditumbangkan baik dengan kehadiran hukum-seperti inheren adil seperti yang berkaitan dengan hak milik atau perlakuan diskriminatif terhadap minoritas dan perempuan-atau dengan aplikasi adil dan penegakan hukum. Secara garis besar, sistem yang tepat dan peradilan diperlukan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi tetap menghormati hak milik, menjamin kesucian kontrak, dan menurunkan biaya transaksi.
- Transparansi dan Akuntabilitas. Masalah serius dengan tata kelola ekonomi meliputi lebih dari sentralisasi pengambilan keputusan

F. Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi

Studi-studi tentang kontribusi relatif dari modal terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas di NSB dan kesimpulan dari hasil estimasinya pun kurang begitu menyakinkan, karena keterbatasan data yang tersedia. Namun demikian, bukti-bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa dampak pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup baik di NSB, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan ekonominya.

Di sisi lain, pada tingkat pendapatan lebih tinggi, pertumbuhan produktivitas nampaknya jauh lebih penting daripada proses pembentukan modal, dan studi di beberapa negara berpenghasilan menengah seperti Korea Selatan, Filipina, dan Meksiko menunjukkan bahwa pada tahun 1990-an pertumbuhan persediaan modal fisikal mampu memberikan kontribusi antara 0,25-0,30 dari pertumbuhan ekonomi, atau paling banyak sebesar 0,50 di NSB pada umumnya. Sayangnya, tidak satupun dari studi-studi tersebut yang memasukkan kontribusi modal insani terhadap pertumbuhan ekonomi yang hasilnya mungkin akan mengecilkan peranan pembentukan modal fisikal dan tabungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

a. Efisiensi Penggunaan Modal

Salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di NSB adalah masalah efisiensi alokasi sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang dimilikinya. Pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan efisiensi alokasi sumberdaya ekonomi hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal karena terjadi pemborosan dalam alokasi sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang ada. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi akan terhambat karena efisiensi alokasi sumberdaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu

negara. Inilah arti penting dari efisiensi alokasi sumberdaya-sumberdaya ekonomi dalam pembangunan.

b. Rasio-rasio Investasi di NSB

Dalam beberapa hal penekanan perhatian terhadap jenis investasi padat modal (*capital intensive investment*) yang sering dijumpai di NSB merupakan hasil yang tidak disengaja dari kebijakan pemerintah. Selain itu, hal tersebut dapat juga menunjukkan keyakinan bahwa hanya teknologi padatlah yang efisien, dan dalam setiap pemilihan teknologi tidak memperhitungkan harga-harga relatif antara tenaga kerja dan modal. Beberapa ekonomi (antara lain, Lawrence White) mengungkapkan bahwa pemilihan teknik-teknik produksi di NSB umumnya tidak dipengaruhi oleh sinyal-sinyal harga.

Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan adanya ***underpricing*** atas modal dan ***overpricing*** atas tenaga kerja nampaknya menyebabkan perusahaan-perusahaan dan pemerintah mengadopsi teknik-teknik yang lebih banyak modal dan kurang tenaga kerja.

Dalam situasi surplus tenaga kerja, pertumbuhan pendapatan per kapita riil sebesar 4 persen per tahun tidak bisa sepanjang waktu tanpa adanya rasio investasi sekurang-kurangnya 15 persen di dalam perekonomian yang menekankan pada investasi yang bersifat padat tenaga kerja, dan 25 persen pada perekonomian yang menekankan pada investasi yang bersifat padat modal. Untuk menjamin rasio investasi sebesar 15 persen saja bukan merupakan hal yang mudah bagi sebagian NSB, khususnya pada beberapa negara (selain India dan Cina) yang dalam kategori Bank Dunia termasuk negara yang berpenghasilan rendah.

Table 6.3
Tingkat Investasi dan Tabungan Domestik Menurut Kelompok Pendapatan

Kategori Negara	Tabungan Domestik (% dari GDP) 1980 1990 2004	Investasi Domestik (% dari GDP) 1980 1990 2004	Celah Sumberdaya 1980 1990 2004
Pendapatan rendah	20 21 23	16 18 22	-5 -3 -1
Pendapatan menengah	27 23 26	28 26 28	1 0 2
Pendapatan tinggi	24 26 26	23 22 19	0 -4 -1

Tabel 6.3 menunjukkan bahwa secara rata-rata negara-negara berpendapatan menengah telah mencapai rasio investasi yang lebih tinggi daripada negara-negara industri maju (berpendapatan tinggi) sejak tahu 1990. Rasio-rasio investasi yang relatif lebih tinggi tersebut dicerminkan oleh adanya tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang relatif tinggi pula, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita riil tahunan untuk negara-negara berpendapatan menengah telah mencapai angka 3,8 persen selama periode 1996 sampai 1997 dan 2,8 persen untuk negara berpendapatan rendah, dan 2,2 persen pada kelompok negara-negara industri maju.

Teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup

teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Pengertian *pembangunan* mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata *pembangunan.*

Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, *pembangunan* dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia

Pada tahun 1950, PDB disusun pertama kali sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Nilai PDB atas dasar harga berlaku saat itu mencapai Rp.84,0 miliar. Mulai tahun 1960, PDB disusun secara berkala dengan metodologi dan cakupan yang lebih lengkap. Pada periode 1960 - 1965 kondisi perekonomian masih buruk, inflasi tumbuh sangat tinggi yang berdampak pada nilai PDB atas berlaku. Nilai PDB atas dasar harga berlaku saat itu tumbuh tinggi dari Rp.470,1 miliar pada tahun 1961 menjadi Rp.23.709,9 miliar pada tahun 1965. Namun pada akhir tahun 1965, pemerintah menerbitkan uang rupiah baru yang nilainya diciutkan. Nilai Rp.1.000 —uang lama— diturunkan menjadi Rp.1 —uang baru. Kebijakan ini kembali mempengaruhi besaran PDB, dimana PDB menurun menjadi Rp.315,9 miliar pada tahun 1966.

Pada tahun 1973 saat akhir Pelita I, PDB meningkat menjadi Rp.6.753,4 miliar. Lapangan Usaha Pertambangan mengalami masa emas (*booming*) dampak melonjaknya harga minyak di pasaran internasional. Lapangan Usaha Industri dan lapangan usaha lainnya meningkat tajam sebagai dampak positif dari penerapan berbagai kebijakan terutama di bidang moneter dan fiskal.

Tahun 1998, ekonomi Indonesia terkena dampak krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia yang langsung berdampak pada perekonomian Indonesia, saat itu nilai PDB Indonesia hanya mencapai Rp.955.753,5 miliar. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Perlahan ekonomi Indonesia mulai membaik. Pada tahun 2000, besaran PDB mencapai Rp.1.389.769,9 miliar dan terus merangkak naik hingga tahun 2014, PDB Indonesia mencapai Rp 10.542.693,5 miliar.

2. Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha

Struktur Ekonomi yang digambarkan oleh PDB atas dasar harga berlaku, dalam kurun waktu 1960 - 1980 didominasi oleh Sektor Primer yang utamanya adalah Lapangan Usaha Pertanian dengan kontribusi sebesar 50 - 60 persen. Selanjutnya Sektor Tersier dengan kontribusi sekitar 30 - 40 persen, dan diikuti Sektor Sekunder dengan kontribusi sekitar 10 - 20 persen. Pada tahun 1985 terjadi perubahan struktur ekonomi Indonesia, dimana kontribusi Sektor Tersier mulai melampaui Sektor Primer. Sektor Tersier memiliki kontribusi sebesar 40 persen, diikuti Sektor Primer dengan kontribusi berkisar 25 - 40 persen. Selanjutnya Sektor Sekunder yang didominasi industri pengolahan memiliki tren terus meningkat dengan kontribusi berkisar 20 - 30 persen. Pada tahun 1993 struktur ekonomi kembali mengalami perubahan. Sektor Sekunder dengan kontribusi berkisar 30 - 40 persen mampu menggeser Sektor Primer ke urutan paling bawah dengan kontribusi berkisar 25 - 30 persen. Sementara Sektor Tersier masih menempati urutan teratas dengan kontribusi sekitar 40 persen. Sampai saat ini, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Sektor Tersier, kemudian Sekunder dan Primer. Meskipun demikian, perbedaan antara ketiganya tidak terlalu besar.

3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi dapat juga ditunjukkan menurut komponen Pengeluaran PDB. Pertumbuhan ekonomi menurut komponen Pengeluaran PDB ini juga menggambarkan angka yang bervariasi. Keanekaragaman angka pertumbuhan ini juga sangat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tahapan dan kebijakan ini sangat dipengaruhi pula oleh kejadian dan peristiwa yang juga terjadi di dalam perekonomian dunia pada umumnya dan kejadian

dan peristiwa yang juga terjadi di dalam negeri. Mulai dari masa orde lama, masa transisi, masa awal perencanaan pembangunan lima tahun (Pelita), masa keemasan migas (*oil boom*), *recovery* dari *oil boom* menjadi *non oil boom*, masa *non oil boom*, sampai kepada masa krisis moneter dunia yang mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi perekonomian Indonesia dan akhirnya pada masa pemulihan perekonomian atau *recovery* kedua.

Pada masa orde lama tahun 1960 - 1968 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih cukup tinggi mulai sebesar 7,8 persen tahun 1961 menjadi 9,1 persen tahun 1968, kecuali tahun 1963 dan 1966 tumbuh negatif masing-masing sebesar 4,0 persen dan 1,5 persen. Tingginya pertumbuhan ini didorong pula dengan pengeluaran konsumsi makanan yang begitu mahal pada waktu itu. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pertumbuhannya juga cukup tinggi, terbesar tahun 1966 senilai 39,0 persen, kecuali tahun 1961, 1962, 1965 dan 1967 pertumbuhannya negatif. Hal ini dapat dimengerti karena pada masa itu belum adanya perencanaan yang komprehensif dan baik dari pemerintah. Pembentukan Modal juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada waktu ini. Mulai tahun 1961 sebesar 43,7 persen dan tahun 1968 sebesar 22,3 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto ini secara umum masih didominasi oleh PMTB pemerintah. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa pertumbuhannya juga cukup tinggi, walaupun sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1962, 1963, 1965 dan 1966 dengan pertumbuhan ekspor semakin tinggi dibandingkan dengan impor.

Tahun 1969 - 1975 pada masa awal pelaksanaan Pelita pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga berada di bawah tujuh persen, kecuali tahun 1974 sebesar 13,8 persen. Terlihat di sini bahwa penyediaan dan permintaan barang dan jasa sudah mulai agak membaik seiring dengan membaiknya iklim perekonomian. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah seiring dengan peran yang

sangat dominan dari pemerintah pada masa itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan mencapai angka 36,5 dan 30,3 persen pada tahun 1973 dan 1975, tetapi juga bertumbuh negatif pada tahun 1972 sebesar 1,9 persen. Pertumbuhan Pembentukan Modal pada tahun ini mencapai di atas 15 persen, tertinggi tahun 1970 sebesar 33,0 persen dan terendah 14,6 persen tahun 1975. Pembentukan modal ini masih didominasi oleh modal milik pemerintah. Begitu pula dengan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa berada di atas 9 persen, kecuali pertumbuhan ekspor tahun 1974 dan 1975 masing-masing sebesar 3,6 dan -9,8 persen, dan impor tahun 1975 sebesar 7,9 persen.

Pada masa harga minyak di pasaran dunia mulai naik tahun 1976 dan mencapai puncaknya tahun 1981 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga cukup tinggi dari sebesar 6,2 persen tahun 1976 menjadi 16,7 persen tahun 1981. Begitu pula dengan pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berada di atas 10 persen, tertinggi sebesar 16,5 persen tahun 1977, kecuali tahun 1976, dan 1982 masing-masing sebesar 7,3 persen dan 8,2 persen. Pertumbuhan pembentukan modal selama periode ini juga cukup tinggi, yaitu berada di atas 11 persen, kecuali tahun 1976 dan 1979. (PMTB) didominasi oleh investasi pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana, yang sebagian besar berasal dari hasil ekspor migas.

Hal ini dapat dimengerti karena tabungan domestik dan sumber dana luar negeri pada waktu itu masih relatif rendah. Pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa pada masa keemasan migas ini juga cukup tinggi.

Pertumbuhan Ekspor tertinggi tahun 1977 sebesar 22,4 persen, tetapi pada waktu mendekati habisnya masa keemasan migas ini mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 5,6; 2,4 dan 13,9 persen berturutturut tahun 1980 - 1982. Di lain pihak

pertumbuhan Impor Barang dan Jasa masih berada di atas 15 persen, kecuali tahun 1976 dan 1982.

Pada masa transisi yaitu masa ketergantungan ekonomi terhadap migas menjadi nonmigas tahun 1982 - 1985 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah mulai melambat yaitu di bawah empat persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah masih tumbuh sebesar 7,6 persen tahun 1985. Begitu juga dengan pertumbuhan PMTB juga mulai lambat, bahkan tahun 1984 pertumbuhannya negatif sebesar 6,0 persen. Pemerintah mulai mendorong investasi dari pihak swasta untuk menggantikan sumber dari penerimaan migas. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa juga mengalami perubahan yang drastis, Ekspor turun -13,9 persen dan -7,8 persen tahun 1985 yang tidak lagi bertumpu dari migas. Sebaliknya Impor juga tumbuh negatif 7,5 persen tahun 1984.

Pada tahun 1986 - 1989 masa recovery atau pemulihan kembali kepada keadaan oil boom, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, mulai naik kembali. Tahun 1989 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,2 persen, dan Pengeluaran Pemerintah sebesar 10,5 persen, walaupun sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2 persen tahun 1987. Pertumbuhan PMTB pada masa ini juga semakin lama semakin meningkat dari 9,2 persen tahun 1986 menjadi 13,4 persen tahun 1989. Pertumbuhan PMTB swasta masih tetap tinggi pada periode ini, terutama investasi di bidang nonmigas. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa pada waktu ini juga menyamai pertumbuhan semasa periode *oil boom* yaitu masing-masing sebesar 10,4 persen dan 13,4 persen tahun 1989. Periode ditandai dengan kontribusi ekspor nonmigas semakin meningkat dibandingkan nonmigas.

Periode tahun 1990 - 1996 disebut juga dengan fase non oil boom. Peranan nonmigas sangat dominan dibandingkan dengan migas. Pada masa ini pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tahun 1990 dan 1995 mencapai sebesar 9,9 persen dan 12,6 persen. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tidak secepat pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, karena sudah semakin berperannya swasta pada waktu itu. Tahun 1991 dan 1992 masing-masing sebesar 7,0 persen dan 5,8 persen pada puncaknya dan semakin menurun pada tahun-tahun selanjutnya. PMTB pertumbuhannya juga semakin tinggi, 14,6 persen pada tahun 1990, kemudian sempat menurun pada tahun-tahun berikutnya, lalu meningkat lagi pada tahun 1994 - 1996 di atas 13 persen. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa pada waktu ini juga cukup tinggi, tetapi pertumbuhan Impor lebih besar dari Ekspor.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik dan sosial tahun 1998, merupakan krisis ekonomi terparah yang pernah dialami oleh Indonesia. Pertumbuhan semua komponen PDB Pengeluaran utamanya tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 6,2 persen walaupun tahun 1997 sempat tumbuh sebesar 7,8 persen dan 3,1 persen tahun 1999. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga tumbuh negatif 15,4 persen, yang pada tahun 1997 dan 1999 juga hanya tumbuh 0,1 persen dan 0,7 persen. PMTB mengalami pertumbuhan negatif tidak hanya pada tahun 1998 tetapi juga pada tahun 1999 masing-masing sebesar 33,0 persen dan 16,7 persen. Padahal tahun 1997 masih tumbuh sebesar 8,6 persen. Hanya Ekspor Barang dan Jasa yang masih tumbuh positif karena didorong oleh terdepresiasinya mata uang rupiah terhadap US dolar, sebesar 11,2 persen. Tahun 1997 Ekspor Barang dan Jasa juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,8 persen, tetapi tahun 1999 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 31,8 persen. Sementara Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998 dan 1999 masing-masing sebesar 5,3 persen dan

38,3 persen, tetapi tahun sebelumnya tahun 1997 masih tumbuh positif 14,7 persen.

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada masa recovery kedua dan kebangkitan kembali perekonomian Indonesia tahun 2000 - 2010 bertumbuh sebesar 3 - 5 persen. Mulai tahun 2000 sampai dengan 2005 angka pertumbuhannya tercatat semakin tinggi, 3,6 persen tahun 2001 menjadi 5,7 persen tahun 2005. Sedangkan untuk paruh kedua periode 2000 - 2010, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga cenderung tumbuh tinggi dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2006 (3,2 persen) dan tertinggi pada tahun 2008 yang tercatat 5,3 persen. Pada periode ini, pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sempat berada pada titik terendah sejak krisis moneter 1998 yaitu hanya tumbuh sebesar 0,3 persen pada tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada rentang waktu 2000 - 2010 terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,7 persen sebagai dampak dari adanya pemilu parlemen dan presiden yang membutuhkan tambahan belanja negara secara signifikan. Pada periode ini, pertumbuhan Ekspor juga relatif membaik dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2009 pertumbuhan tercatat negatif -9,7 persen. Pertumbuhan Ekspor negatif pada tahun 2009 ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan merupakan gejala umum yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan Impor pada periode ini juga memiliki dinamika yang senada dengan pertumbuhan Ekspor yaitu mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2009 bahkan dengan magnitude yang lebih besar, yaitu -15,0 persen.

Periode 2010 - 2014 diwarnai oleh situasi perekonomian internasional yang kurang kondusif, meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di atas lima persen pada tiap tahunnya. Yang terendah adalah pertumbuhan tahun 2014 yang tercatat 5,0 persen sedangkan yang tertinggi adalah capaian

tahun 2011 yang tercatat 6,2 persen.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh stabil di kisaran lima persen sementara Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014 menjadi 2,0 persen dari 6,9 persen yang dicapai pada tahun sebelumnya. Pembentukan Modal Tetap Bruto sepanjang periode 2010 - 2014 juga cenderung menurun terutama karena ketergantungan yang tinggi terhadap barang modal impor sehingga gejolak yang terjadi pada mata uang Rupiah sangat mempengaruhi komponen ini.

Ekspor dan Impor hanya tumbuh tinggi pada tahun 2011. Untuk tahun-tahun setelahnya tercatat pertumbuhan yang tergolong rendah meskipun masih positif. Penyebab rendahnya pertumbuhan Ekspor dan Impor pada beberapa tahun belakangan ini adalah lemahnya demand terhadap komoditas ekspor Indonesia yang sebagian besar adalah komoditas primer. Di samping itu, pelemahan mata uang Rupiah terhadap US Dolar membuat harga barang impor termasuk juga barang modal impor menjadi tidak ekonomis dan secara otomatis mengurangi masuknya barang impor ke dalam negeri. Pada semester I tahun 2015, pertumbuhan tercatat 4,7 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya (c-to-c). Hal ini merupakan capaian pertumbuhan semester I yang terendah sejak tahun 2010 yang biasanya di atas lima persen. Penyebabnya adalah ekonomi internasional yang kurang kondusif sebagai dampak dari berlarut-larutnya krisis Eropa. Meskipun demikian, capaian pertumbuhan semester I sebesar 4,70 persen ini tergolong exceptional karena rendahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara baik di Asia Tenggara maupun kawasan lain di dunia. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga pada semester ini tercatat lima persen, capaian ini sedikit lebih rendah daripada capaian tiga tahun terakhir yang selalu di atas lima persen. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tercatat 2,47 persen dikarenakan penyerapan belanja negara yang

baru mencapai 37,9 persen pada akhir semester I tahun 2015. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada semester ini tercatat 3,92 persen. Ini termasuk rendah dibandingkan dengan capaian semester I tahun lalu yang tercatat 4,18 persen. Pertumbuhan negatif terjadi untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan jenis Mesin dan Perlengkapan yang terkontraksi masing-masing sebesar minus 3,32 persen dan minus 6,47 persen. Ekspor dan Impor tumbuh negatif dikarenakan penurunan harga komoditas andalan ekspor Indonesia dan pelemahan Rupiah terhadap dolar.

4. Struktur Perekonomian Menurut Komponen Pengeluaran

Pada masa 1960 - 1968 lebih banyak digunakan untuk Pengeluaran Konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah masing-masing tertinggi 96,0 persen tahun 1966 dan 11,8 persen tahun 1961. Sedangkan, persentase terendah masing-masing tahun 1960 sebesar 79,8 persen dan 5,6 persen tahun 1965. Sementara itu, Investasi atau PMTB tertinggi sebesar 12,1 persen tahun 1964 dan terendah tahun 1966 sebesar 4,5 persen. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa tertinggi terjadi pada tahun 1960 sebesar 13,3 persen dan terendah sebesar 5,3 persen tahun 1965, sedangkan kontribusi Impor tertinggi terjadi tahun 1966 sebesar 22,1 persen dan terendah sebesar 5,7 persen tahun 1965.

Pada awal pelaksanaan Pelita 1969 - 1975 kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mulai menurun dibandingkan dengan pada masa Orde Lama. Dari sebesar 86,8 persen pada tahun 1969 menjadi 69,2 persen pada tahun 1975. Begitu pula dengan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mulai stabil pada angka tertinggi sebesar 10,8 persen tahun 1973 dan terendah tahun 1969 sebesar 7,3 persen. Tetapi terjadi lonjakan yang besar terhadap kontribusi PMTB dari 13,70 tahun 1970 yang merupakan persentase terendah menjadi 20,3 persen tahun 1975. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa

juga meningkat dari 9,0 persen tahun 1969 (terendah) menjadi 29,0 tahun 1974 (tertinggi). Begitu juga dengan Impor Barang dan Jasa dari yang terendah sebesar 14,8 persen tahun 1969 menjadi 22,0 tertinggi tahun 1975.

Pada masa oil boom tahun 1976 - 1981 kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, yaitu terendah sebesar 60,5 persen tahun 1980 dan tertinggi sebesar 67,7 persen tahun 1976. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada periode ini terbesar 12,1 persen tahun 1978 dan terkecil 10,3 persen tahun 1976. Kontribusi PMTB juga naik dari yang terendah 20,1 persen tahun 1977 menjadi 21,4 persen tertinggi tahun 1981. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa juga naik dari terkecil sebesar 21,8 tahun 1978 menjadi tertinggi sebesar 30,5 persen tahun 1980. Begitu juga dengan Impor sebesar 20,1 persen tahun 1977 yang merupakan persentase terendah menjadi 25,6 persen tahun 1981 yang merupakan persentase tertinggi.

Tahun 1982 - 1985 masa transisi dari migas ke nonmigas kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin menurun dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya, tertinggi sebesar 69,9 persen tahun 1982 menjadi terendah 59,0 persen tahun 1985. Distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah cukup stabil pada 10,2 persen terendah tahun 1984 menjadi 11,2 persen tertinggi tahun 1985. PMTB kontribusinya juga bertambah dari tertinggi tahun 1983 sebesar 25,1 persen dan terendah tahun 1984 sebesar 22,4 persen. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa kontribusinya tertinggi masing-masing sebesar 25,6 persen tahun 1984 dan 25,3 persen tahun 1983, dan terendah masing-masing sebesar 22,2 dan 20,5 persen tahun 1985.

Tahun 1986 - 1989 masa pemulihan dari masa ketergantungan dari migas kepada nonmigas, kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin kecil yaitu dari sebesar 61,7 persen tahun

1986 yang merupakan persentase tertinggi menjadi 53,1 persen tahun 1989 sebagai persentase terendah. Begitu juga dengan kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah juga semakin kecil dari 11,2 persen (tertinggi) tahun 1986 dan sebesar 9,0 persen (terendah) tahun 1988. PMTB kontribusinya semakin naik dari 24,1 persen tahun 1986 terendah menjadi 27,3 persen tahun 1989 tertinggi. Kontribusi ekspor dan impor barang dan jasa sedikit bertambah dari 19,5 persen tahun 1986 terendah menjadi 25,5 persen tahun 1989 tertinggi untuk ekspor, serta dari 20,5 persen tahun 1986 terendah menjadi 23,1 persen tertinggi untuk impor, walaupun sempat sedikit menurun tahun 1988 sebesar 21,5 persen.

Masa ketergantungan terhadap nonmigas tahun 1990 - 1996, kontribusi Pengeluaran Rumah Tangga sedikit naik, walaupun pada tahun 1990 - 1993 sempat mengalami penurunan, yaitu dari yang terendah sebesar 52,3 persen tahun 1992 menjadi 62,4 persen tahun 1996. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah semakin kecil, dari yang tertinggi sebesar 9,9 persen tahun 1993 menjadi terendah 7,6 persen tahun 1996. Sementara kontribusi PMTB semakin naik dari yang terendah sebesar 25,9 persen tahun 1993 menjadi yang tertinggi sebesar 29,6 persen tahun 1996. Begitu juga dengan Ekspor secara perlahan juga menunjukkan perubahan kontribusi yang berkurang dari yang tertinggi sebesar 29,4 persen tahun 1992 menjadi yang terendah sebesar 25,8 persen tahun 1996. Begitu juga dengan kontribusi Impor dari yang tertinggi sebesar 27,1 persen tahun 1992 menjadi terendah sebesar 25,4 persen tahun 1994.

Pada masa krisis perekonomian tahun 1997 - 1999 persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB semakin naik yaitu dari 61,8 persen tahun 1997 menjadi 76,2 persen tahun 1999. Persentase Pengeluaran Pemerintah turun dari 6,8 persen tahun 1997 menjadi 5,7 persen tahun 1998, akan tetapi naik kembali sebesar 6,6 persen tahun 1999. Persentase PMTB semakin turun dari 28,3 persen

tahun 1997 menjadi 20,6 persen tahun 1999. Sebaliknya Ekspor dan Impor Barang dan Jasa terutama pada tahun 1998 persentasenya sempat naik tinggi dari 27,9 persen tahun 1997 menjadi 53,0 persen serta dari 28,1 persen tahun 1997 menjadi 43,2 persen. Tahun 1999 persentase keduanya menurun kembali masing-masing sebesar 35,5 persen dan 28,5 persen.

Tahun 2000 - 2010 diwarnai oleh krisis keuangan global yang dipicu oleh macetnya subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007. Sentimen negatif dan kepanikan yang terjadi di Wall Street sebagai akibat dari krisis subprime mortgage ini dengan cepat menjalar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini tergambar dari kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami pasang surut, yaitu dari 61,7 persen pada tahun 2000, mencapai puncak kontribusi pada tahun 2003 yaitu 66,5 persen dan kemudian menurun mulai tahun 2008 hingga tahun 2010. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah justru menunjukkan kontribusi yang meningkat sejak tahun 2007. Hal ini dikarenakan pemerintah sengaja meningkatkan belanjanya untuk mengkompensasi pelemahan yang terjadi baik pada sisi produksi, konsumsi, dan ekonomi eksternal (ekspor dan impor). PMTB kontribusinya menunjukkan peningkatan yang terus menerus. Dari sebesar 19,7 persen pada tahun 2000 hingga menjadi 32 persen pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan dunia usaha yang kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang dekade ini pula, kontribusi Ekspor dan Impor cenderung menurun. Kontribusi Ekspor terhitung menurun dari 39,0 persen pada awal periode menjadi 24,6 persen pada akhir periode, sedangkan kontribusi Impor juga cenderung menurun dari 30,8 persen pada awal periode menjadi 22,9 persen pada akhir periode. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi eksternal yang sedang kurang kondusif untuk mengakomodasi perkembangan kegiatan

ekonomi Indonesia.

Periode 2010 hingga 2014 merupakan periode yang menandai recovery perekonomian Indonesia dari dampak krisis subprime mortgage meskipun tak lama setelah itu, krisis berskala global kembali terjadi yaitu di Eropa. Dampak krisis Eropa ini juga dapat dirasakan di Indonesia terutama dengan melemahnya permintaan ekspor dari Indonesia oleh negara-negara Eropa. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga kontribusinya terjaga pada kisaran 55 hingga 57 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada periode ini cenderung meningkat sedikit demi sedikit dari 9,0 persen pada tahun 2010 menjadi 9,5 persen pada tahun 2014. Pergerakan Kontribusi PMTB pun senada dengan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang menunjukkan kenaikan secara gradual dari 31,0 persen pada awal periode hingga 32,6 persen pada akhir periode. Kontribusi Ekspor dan Impor cenderung fluktuatif di tengah gejolak ekonomi eksternal yang terjadi pada periode ini. Kontribusi Ekspor terendah terjadi pada tahun 2013 sementara kontribusi Impor terendah terjadi pada tahun 2010.

Untuk semester I tahun 2015, struktur Produk Domestik Bruto Indonesia menurut pengeluaran relatif sama dengan struktur PDB menurut Pengeluaran pada lima tahun terakhir. Dominasi yang kuat masih ada pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat 55,34 persen disusul oleh PMTB (32,46 persen). Kontribusi Ekspor tercatat 21,81 persen dan merupakan kontribusi Ekspor terendah sejak semester I tahun 2010. Sementara itu, kontribusi Impor juga lebih kecil daripada kontribusi Impor pada semester I tahun-tahun sebelumnya pada periode 2010 - 2014. Adanya usaha-usaha pengembangan wilayah negara berkembang khususnya Negara Indonesia serta adanya rencana yang matang untuk melakukan pengembangan wilayah negara maju dan negara berkembang.

BAB IV

PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pengertian dari pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses suatu kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang memperhitungkan pada pertambahan penduduk. Kemudian disertai pada perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan kepada penduduk suatu negara Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita
3. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
4. Perbaikan sistem kelangkaan di segala bidang

Pembangunan Ekonomi - Pembangunan ekonomi adalah? sebelum masuk ke dalam pembahasan, materi yang akan dibahas yaitu pengertian, tujuan dan perencanaan pembangunan ekonomi secara lengkap.

1. Pengertian Pembangunan ekonomi Menurut Para Ahli

a. Menurut Sadono Sukirno (1996)

Pengertian pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita pada jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial dengan menjadikan sebagai ekonomi real dalam melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, dan lain-lain

b. Menurut Adam Smith

Economic development merupakan suatu proses perpaduan atau kombinasi dengan pertumbuhan penduduk (pendapatan per kapita) kemudian kemajuan teknologi.

c. Menurut Prof. Meier

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dengan jangka waktu panjang.

d. Menurut Schumpeter (Suryana, 2000:5)

Economic development merupakan perubahan pada lapangan industri dan perdagangan yang memiliki kaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional.

e. Menurut Irawan (2002: 5)

Economic development merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup pada suatu negara yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Image pembangunan ekonomi

2. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Ada beberapa tujuan dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai

suatu kesejahteraan pendapatan per kapita yaitu sebagai berikut:

a. Dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat pada pemerataan pendapatan.
b. Meningkatkan kesempatan kerja untuk menambah bidang-bidang kerja yang dapat membuat banyak tenaga kerja.
c. Memperbaiki kualitas pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
d. Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk budaya nilai-nilai leluhur termasuk nilai sosial, agama dan kultur agar tidak dapat mudah dipengaruhi dengan budaya lain yang tidak sesuai pada norma yang berlaku terhadap suatu negara.
e. Dapat menghindari suatu inflasi.

3. Dampak Pembangunan Ekonomi

Sebuah proses pembangunan ekonomi yang dilakukan di berbagai negara melalui pelaksanaan yang berdasarkan berbagai ahli akan memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi tersebut baik secara positif maupun negatif**.**

a. Dampak Positif

1) Menggunakan pembangunan ekonomi, pelaksanaan pada kegiatan perekonomian akan berjalan semakin maju dan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
2) Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan dapat membuat lapangan pekerjaan yang sedang dibutuhkan para masyarakat, dengan begitu akan mengurangi jumlah pengangguran.
3) Terbentuknya lapangan pekerjaan karena adanya pembangunan ekonomi secara langsung dapat memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
4) Terbentuknya pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan pada struktur perekonomian dengan struktur

ekonomi agraris menjadi suatu struktur ekonomi industri, sehingga pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.

5) Pembangunan ekonomi membuat peningkatan pada kualitas SDM sehingga dapa memungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Dengan begitu akan menjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak Negatif

Selain memiliki dampak positif, pembangunan ekonomi pun tidak terlepas dari dampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut sebagai berikut;

1) Terbentuknya pembangunan ekonomi yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengakibatkan adanya kerusakan pada lingkungan hidup.
2) Industrialisasi dapat mengakibatkan kekurangan lahan pertanian.
    a. Pembangunan ekonomi sebelum dijalankan akan melakukan sebuah perencanaan, Adapun perencanaan pembangunan ekonomi memiliki ciri, unsur dan tujuan dari perencanaan pembangunan ekonomi tersebut.
    b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pengertian, Unsur, Fungsi, Sifat, Proses dan Peranan Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Menurut Davidoff & Rainer (1962),Robinson (1972) Faludi (1973) dari perspektif paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Sedangkan menurut Dror (1963) perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan

seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa depan. Dari definisi tersebut Nampak bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang bisa diterapkan untuk organisasi public maupun privat. Menurut Arsyad (2002), menyatakan ada 4 (empat) elemen dasar perencanaan yakni:

1) Merencanakan berarti memilih
2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4) Perencanaan untuk masa depan..

Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan juga dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial secara sadar. Pembangunan (*development*) secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (*growth*), perbaikan (*improvement*), dan perubahan (*change*). Sebagai suatu proses, maka pembangunan masyarakat tidak terlepas dari aspek manajemen yang menanganinya. Dalam suatu proses manajemen yang umum akan meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan pembangunan dari perspektif lingkungan menurut Eagles (1984) memiliki dua komponen yaitu :

1) Sekumpulan alasan yang melihat tujuan perencanaan dari segi ekologi dan pembangunan manusia

2) Seperangkat kriteria sebagai acuan dalam menilai pembangunan dari aspek etika ekologi dan etika sosial.

Adapun ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi yaitu:

1) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap *(steady social economic growth)*. Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3) Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
4) Usaha perluasan kesempatan kerja.
5) Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai *distributive justice*
6) Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

b. Unsur Perencanaan

Unsur-unsur perencanaan adalah sebagai berikut :

1) Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
2) Adanya kerangka rencana makro.
3) Perkiraan sumberdaya-sumberdaya bagi pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
4) Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya.
5) Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral.

c. Fungsi Perencanaan

Fungsi-fungsi perencanaan :

1) Diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2) Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik
3) Dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi tujuan
4) Sebagai alat untuk mengukur dan mengadakan pengawasan dan evaluasi.

d. Sifat Perencanaan

Sifat perencanaan diantaranya yaitu:

1) Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial.
2) Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.
3) Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.
4) Dalam jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah atau jangka pendek.
5) Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas atau kedua-duanya.
6) Dari segi ketepatan atau keluwesan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif, atau preskriptif.
7) Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan rakal.

Produk perencanaan dapat berbentuk rencana kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program atau kegiatan.

e. Proses Perencanaan

Proses perencanaan ekonomi melalui beberapa tahap dan masing-masing tahap sudah ditentukan dahulu apa yang ingin dicapai pada setiap tahap tersebut. Tahap-tahap perencanaan ekonomi :

1) Menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut, diantaranya untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya.
2) Mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya : tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain.
3) Memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang kebijakan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi, dan lain-lain.
4) Mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (*welfare function*) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional.

f. Peranan Perencanaan Ekonomi

Suatu rencana ekonomi bisa dianggap sebagai target ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bersifat komprehensif atau parsial yang artinya menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional, sedangkan yang bersifat parsial adalah hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor

industri, pertanian, luar negeri, dsb.

Perekonomian pasar tidak sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana memobilisir sumberdaya yang terbatas sehingga timbul perubahan structural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lancer, cepat dan seimbang. Di dunia sistem perekonomian dibagi menjadi 2 macam yaitu *market economy* dan *planned economy*-nya, namun sebenarnya tidak ada perekonomian yang benar-benar berencana karena masalah perencanaan adalah masalah kadar atau derajat saja (formalitas).

g. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan :

Menurut Jhingan (1983) syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan memerlukan adanya hal-hal berikut ini :

1) Komisi Perencanaan Pembentukan suatu komisi (badan atau lembaga) perencanaan yang harus diorganisir secara tepat yang dibagi dalam bagian-bagian dan subbagian yang dikoordinir oleh para pakar, seperti pakar ekonomi, statistik, teknik serta pakar lain yang berkenaan dengan masalah perekonomian.
2) Data Statistik. Adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumberdaya-sumberdaya potensial lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara tersebut.
3) Tujuan. Suatu perencanaan dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan.
4) Penetapan Sasaran dan Prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro dirumuskan secara tegas serta mencakup

setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral harus disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan.

5) Mobilisasi Sumberdaya. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik).
6) Keseimbangan dalam Perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan.

h. Adapun tujuan dari Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah sebagai berikut :

1) Mengarahkan kegiatan, pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan
2) Memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia
3) Memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.
4) Terdapat perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan & risiko masa yang akan datang.
5) Memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik.
6) Dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
7) Sebagai alat mengukur/standar terhadap pengawasan evaluasi.
8) Memperbaiki pemakaian sumberdaya publik yang telah tersedia.
9) Mengarahkan suatu kegiatan pencapaian tujuan di dalam pembangunan.
10) Memperbaiki kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan nilai sumber daya swasta secara lebih bertanggung jawab

guna kepentingan pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

11) Memberikan kesempatan dalam mengadakan pilihan terbaik.
12) Adanya perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan dan risiko untuk di masa yang akan datang.
13) Dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
14) Digunakan sebagai alat mengukur atau standar dalam pengawasan.

i. Model-Model Perencanaan Pembangunan

Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang memerikan berfungsinya suatu kesatuan perekonomian (rumah tangga, individu, nasional dan internasional) dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan.

Model-model perencanaan pembangunan antara lain:

1) Model Agregat

Tipe model perencanaan yang paling sederhana adalah model agregat yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Model ini biasanya digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. (*aggregate growth model*)

2) Model Input-Output dan Proyeksi Sektoral: Gagasan Dasar

Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa varian model-antar industri (inter-industry model) atau model input-output (input-output model). Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan

bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan yang pada akhirnya akan menunjukkan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua industri selain dianggap selain sebagai produsen output tertentu juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input-inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu (misalnya gandum) sektor ini juga menggunakan input-input yang merupakan output-output, katakanlah sektor industri mesin dan sektor industri pupuk.

3) Penilaian Proyek dan Analisis Manfaat Biaya Sosial

Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umumnya menggunakan output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari-harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makro ekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek (*project appraisal*). Namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga teknik perencanaan yang penting tersebut tidak diabaikan

4) Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis

Perencanaan pada umumnya merupakan usaha dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga yang stabil melalui kebijaksanaan fiscal dan moneter. Alat kebijaksanaan yang utama digunakan adalah terutama dalam bidang moneter, perpajakan, dan hubungan perdagangan luar negeri. Jadi, kalaupun tidak terdapat rencana ekonomi yang terisi di kebanyakan perekonomian kapitalis dalam arti seperangkat sasaran tertentu yang ditetapkan, tetapi perencanaan pemerintah dilaksanakan dengan dasar analisis trend masa lalu dan

proyeksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang.

5) Perencanaan Dalam Perekonomian Sosialis

Perencanaan perekonomian sosialis dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni bubar) dan perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Perbedaan yang esensial antara perekonomian kapitalis dan perekonomian sosialis adalah rangsangan versus pengendalian.

Perbedaan antara peranan perencanaan perekonomian kapitalis dan perekonomian sosial:

Peranan perekonomian kapitalis hanya berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak keluar dari lintasan pertumbuhan yang stabil yang diinginkan melalui alat kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung.

Peranan perekonomian sosialis hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan akan tetapi juga berusaha melaksanakan rencananya secara langsung.

6) Perencanaan Dalam Perekonomian Campuran

Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan dimana sebagian dari sumberdaya produktif dan dikelola oleh pihak swasta, sedangkan sebagian oleh pemerintah. Tidak seperti perekonomian kapitalis yang biasanya pemilikan pemerintah hanya kecil sekali, maka perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar.

Dua aspek utama dari Perencanaan Perekonomian Campuran:

Penggunaan tabungan masyarakat dan pembayaran dari luar negeri dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk melaksanakan

investasi-investasi pada proyek pemerintah dan memobilisir serta menyalurkan sumberdaya yang langka ke bidang yang bisa diharapkan memberi sumbangan ke arah kemajuan ekonomi dalam jangka panjang.

a. Kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah, bahkan mengendalikan keadaan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi antara pengusaha swasta dengan pemerintah pusat.
b. Sifat kompromi dari keadaan tersebut yaitu antara rangsangan kapitalis dan pengendalian sosialis tampak jelas dari karakteristik perencanaan dan perekonomian campuran.

7) Perencanaan Pembangunan Di Indonesia
8) Perencanaan Pembangunan Menurut Ilmu Administrasi
   a. Menurut sudut pandang ilmu administrasi, terdapat tiga asumsi agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, yaitu;
      1. Kepemimpinan pembangunan
      2. Manajemen Sumber Daya Pembangunan
      3. Prosedur Perencanaan
   b. Perencanaan Pembangunan Menurut Teori-Teori Perencanaan Pembangunan
      1. Proses politik, yaitu dalam rangka mengharmonisasikan perbedaan pandangan diantara kepentingan politik untuk membuat konsensus.
      2. Proses ekonomi, yaitu dalam rangka menyusun tujuan pembangunan yang terencana untuk membuat perencanaan pembangunan yang terukur.
      3. Proses administrasi, yaitu dalam rangka menyelenggarakan perencanaan pembangunan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan

9) Pengendalian dan Pemantauan

Pemahaman tentang pengendalian dan pemantauan diperluaskan agar dapat diketahui secara baik bagaimana proses pengendalian dan pemantauan itu seharusnya dilakukan baik oleh;

(a) Departemen (nasional atau koordinasi lintas provinsi/ regional),
(b) Dinas provinsi (provinsi)
(c) Kantor (kabupaten/kota),
(d) Kelompok independen

Pengendalian dan pemantauan terhadap implementasi perencanaan pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjamin perencanaan pembangunan mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, suatu proses pengendalian dan pemantauan pembangunan harus memerhatikan prinsip-prinsip

a. Pengendalian pembangunan diarahkan pada efisiensi pengeluaran negara;
b. Pengoptimalan tugas pokok dan fungsi lembaga negara yang sudah ada;
c. Pengoptimalan peran serta masyarakat secara proaktif dalam pengawasan penggunaan keuangan negara;
d. Penegakan upaya penilaian terhadap kinerja implementasi perencanaan pembangunan

j. Evaluasi Hasil Perencanaan

Pemahaman tentang evaluasi hasil perencanaan: oleh departemen (nasional atau koordinasi lintas provinsi/regional), kelompok independen (terbentur pada siapa yang mendanai kegiatan kelompok independen ini; jika didanai oleh Pemerintah, kelompok ini tidak dapat lagi disebut kelompok independen).

B. TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI ATAU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemahaman Konsep Pendukung Teori Pembangunan Ekonomi Atau Pertumbuhan

Konsep Ekonomi Pembangunan tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Ekonomi Pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

Pembangunan Ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Setiap negara akan memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi. Pembangunan Ekonomi akan menjadi sebuah perhatian karena akan terkait kepada beberapa masalah yang dihadapi negara yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi akan menjadi perhatian karena adanya kekurangan negara dalam beberapa faktor.

Evolusi Fokus Ekonomi Pembangunan**.** Menurut Meier & Rouch (2000) selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an kebijakan-kebijakan pembangunan ditunjukkan terutama sekali pada maksimalisasi pertumbuhan GNP melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Kenyataannya strategi ini mengarahkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Namun, keberhasilan pembangunan yang ditinjau dari tolak ukur ekonomi klasik tampaknya tidak sepenuhnya mampu mencerminkan kenyataan hidup yang sebenarnya di dalam masyarakat.

Fokus kajian ekonomi pembangunan sudah lebih ditekankan

pada analisis tentang berkeragaman NSB dan pengidentifikasian faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan tingkat kinerja ekonomi di setiap negara.

1. Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Sebelum memberikan pemaparan yang lebih dalam mengenai strategi pembangunan ekonomi daerah alangkah baiknya kita rinci terlebih dahulu apa yang di maksud dengan istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Pendapatan Nasional Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial

dan teknik. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang

Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Setelah sebelumnya membahas tentang perspektif global ilmu ekonomi pembangunan, pada bahasan kali ini akan diulas teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada bahasan kali ini, ada enam teori yang akan diulas yaitu :

1. Mazhab Historismus

Pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah (fenomena ekonomi : perkembangan menyeluruh dan dalam tahap dalam perjalanan sejarah). Mazhab ini mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad XIX sampai awal XX

a. Friedrich List tahun 1840 (cara produksi)

Merupakan pelopor Historismus : eksponen Nasionalisme Ekonomi bahwa tahap perkembangan ekonomi yaitu dengan cara produksi, yaitu : tahap primitif, tahap beternak, tahap pertanian, tahap pengolahan, manufacturing, pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. List juga berpendapat bahwa daerah-daerah dengan iklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.

b. Bruno Hildebrand tahun 1848 (cara distribusi)

Terjadi evolusi dalam masyarakat, Bruno mengkritik List : bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi/ cara konsumsi tetapi lebih kepada cara distribusi yang digunakan, yaitu :

1) Perekonomian barter (natura)
2) Perekonomian uang
3) Perekonomian kredit

Teori Bruno memiliki kelemahan yaitu : tidak jelas proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya dan tidak memberi sumbangan yang berarti pada peralatan analisis di bidang ilmu ekonomi

c. Karl Bucher (produksi dan distribusi)

Pendapat Bucher merupakan sintesa dari List dan Hildebrand. Menurut Bucher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap, yaitu :

1) Produksi untuk kebutuhan sendiri (subsistem)
2) Perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas
3) Perekonomian nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting

Dari ketiga teori, Bucher lebih menyempurnakan mazhab ini karena mensintesakan antara pemikiran List dan Hildebrand.

d. Walt Whitman Rostow (W. W. Rostow)

Teori ini sangat populer dan paling banyak komentar dari ahli. Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan :

1) Perubahan Orientasi ekonomi, politik dan social yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar
2) Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu kesadaran untuk membina keluarga kecil
3) Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif
4) Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yang kurang merangsang pembangunan ekonomi, misal : kurang menghargai

waktu kerja orang lain.

W.W. Rostow membedakan pembangunan ekonomi ke dalam 5 tahap, yaitu terdiri dari tahap sebagai berikut:

1) Tahap masyarakat tradisional
2) Tahap prasyarat tinggal landas
3) Tahap tinggal landas
4) Tahap menuju kedewasaan
5) Tahap konsumsi tinggi

2. Teori Klasik dan Teori Non klasik (Mazhab Analitis)

a. Tokoh ekonomi Klasik : Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall

1) Adam Smith

Adam Smith merupakan pelopor pembangunan ekonomi, kebijaksanaan laissez-faire dan *free trade*. Dua aspek utama pertumbuhan ekonomi menurut Smith :

a. Pertumbuhan output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu ; SDA, SDM, barang modal yang ada. Semakin besar stok modal, menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya Spesialisasi dan Pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.

b. Pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsistem yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. jika tingkat upah di atas tingkat subsistem, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, jumlah kelahiran meningkat. Laju permintaan akan tenaga kerja akan ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal dan laju pertumbuhan output.

2) David Ricardo

Teori David Ricardo fokus kepada keunggulan komparatif. Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (Perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation (1917).*

Terbatasnya jumlah tanah (faktor produksi), maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marjinal, hal ini dikenal dengan istilah *The law of diminishing returns.* Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing returns* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses **tarik menarik** antara kedua dua kekuatan dinamis yaitu ***The law of diminishing returns*** dan **kemajuan teknologi,** yang dimenangkan oleh *The law of diminishing returns*.

Ciri-ciri masyarakat mencapai posisi stasioner:

(a) Tingkat output konstan
(b) Jumlah penduduk konstan
(c) Pendapatan per kapita juga menjadi konstan
(d) Tingkat upah pada tingkat upah minimal
(e) Tingkat keuntungan minimal
(f) Akumulasi modal berhenti (stok modal konstan)
(g) Tingkat sewa tanah maksimal

3. Teori Neo Klasik : dirintis oleh Robert Solow dan Trevor Swan

Pada teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyedia faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

Rasio modal-output bisa berubah. Dengan kata lain, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output.

a. Teori Keynesian (Harrod-Domar)

Teori Keynesia dikembangkan oleh Evsey Domar dan R. F Harrod. Teori ini menganalisa syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian tumbuh dalam jangka panjang; perbandingan efektivitas investasi diformulasikan dalam ICOR. Asumsi teori Harrod-Domar :

1) Perekonomian dalam keadaan *full-employment* dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh
2) Perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga dan swasta (perusahaan)
3) Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional
4) Kecenderungan menabung (MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara capital output ratio juga tetap.

Dalam teori ini fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif). Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-

barang modal yang rusak.

Keterbatasan Teori Harrod-Domar :

1) MPS dan ICOR tidak konstan, pada kenyataannya kedua hal tersebut sangat mungkin untuk berubah, apalagi dalam jangka waktu panjang.
2) Proporsi Penggunaan tenaga kerja dan Modal tidak tetap, umumnya tenaga kerja dapat menggantikan modal dan perekonomian dapat bergerak lebih mulus ke arah lintasan pertumbuhan yang mantap. Dalam kenyataannya lintasan ini tidak begitu stabil sehingga perekonomian harus mengalami inflasi kronis dan pengangguran kronis.
3) Harga tidak akan tetap konstan
4) Suku bunga berubah, yang mana akan mempengaruhi investasi dengan hubungan keduanya negat

b. Teori Schumpeter

Teori ini menjelaskan peranan pengusaha dalam proses pembangunan. Faktor utama perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneur (pengusaha). Inovasi memberikan pengaruh terhadap produk baru, cara berproduksi yang baru, daerah pemasaran yang baru, sumber bahan mentah yang baru dan perubahan organisasi yang lebih efisien.

Runtuhnya Kapitalisme.

Pertama, bagi negara sedang berkembang (NSB) yang berusaha mengejar kemajuan ekonomi (pertumbuhan output) maka sistem kapitalis sesuai untuk diterapkan.

Kedua, dalam jangka panjang sistem kapitalis akan meningkatkan dan meratakan pendapatan per kapita masyarakat.

Ketiga, Dalam jangka panjang sistem kapitalis akan "runtuh", karena adanya transformasi gradual di dalam sistem tersebut menuju ke arah sistem yang lebih bersifat sosialistis.

c. Teori Ketergantungan

1) Tergabungnya secara paksa daerah-daerah pinggiran ke dalam ekonomi kapitalis dunia ; penyebab keterbelakangan NSB.
2) Implikasi -> tanpa kolonialisme dan integrasi ke sistem kapitalisme dunia, NSB mampu mencapai tingkat kesejahteraan tinggi dan dapat mengembangkan pengolahan (*manufacturing)* mereka atas usaha dan kekuatan sendiri.
3) Mengabaikan faktor-faktor internal; struktur sosial budaya dan pola perilaku masyarakat prakolonial.
4) Terlalu melebihkan efisiensi administratif untuk menekankan kemungkinan yang sebenarnya terbuka bagi negara-negara untuk mengalami suatu **transisi kapitalisme borjuis.**

Teori ini melihat NSB mengalami kekakuan institusional politik dan ekonomi dalam dan luar negeri dan terjebak dalam hubungan ketergantungan dan dominasi negara-negara industri.

Tiga Model Ketergantungan

1) Model Ketergantungan neocolonical ; terjadi keterbelakangan dan kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin dalam sistem kapitalis.
2) Model paradigma keliru, terjadinya keterbelakangan NSB akibat nasehar yang salah dan tidak tepatnya para ahli internasional yang pandai tapi kurang informasi, melenceng, etnosentris dan mempunyai rested interest untuk kepentingan mereka dan organisasi internasional.
3) Model pembangunan dualistic ; dunia menunjukkan dualisme aliran keberadaannya, dualistis antara negara kaya dan miskin, antara superior dan inferior yang keberadaannya selalu berdampingan.

4. Cakupan Bahasan Ekonomi Pembangunan

Belum adanya suatu pola analisis yang dapat diterima secara umum disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Pertama, karena kompleksitas masalah pembangunan dan banyak nya faktor yang mempengaruhi pembangunan.
b. Kedua, tidak adanya teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang berlaku umum dalam memberi gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Pada hakikatnya pembahasan dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukan ke dalam dua kelompok.

a. Pertama adalah pembahasan tentang pembangunan ekonomi baik yang bersifat deskriptif maupun analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik perekonomian dan masyarakat NSB dan implikasinya pada pembangunan ekonomi di kawasan tersebut.
b. Kedua adalah pembahasan tentang pilihan berbagai orientasi kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di NBS.

5. Transformasi Struktural

Proses transformasi struktural dapat dikelompokkan ke dalam empat proses utama yaitu : proses akuntansi, proses alokasi, proses distribusi dan proses demografi.

Transformasi struktural di Indonesia berlangsung sangat cepat, terjadi pula kenaikan dalam kontribusi sektor industri yaitu hampir mencapai angka 300 persen.

Satu hal yang senantiasa mengiringi proses transformasi struktural adalah urbanisasi.

6. Pendapatan Nasional

Metode pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga metode : metode produksi, metode pendapatan dan metode pengeluaran.

Laju pertumbuhan nasional, pendapatan nasional mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara pada periode tertentu. Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan nilai pendapatan nasional yaitu, perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan tingkat harga. Oleh karena itu menurut acuan tingkat harga yang digunakan, pendapatan nasional dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, pendapatan nasional nominal dan pendapatan nasional riil.

7. Cara Mengevaluasi Hasil Pembangunan

a. Indikator Pembangunan

Indikator pembangunan sangat berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, indikator pembangunan juga dapat dipergunakan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan oleh negara berkembang untuk menyamakan tingkat kehidupannya dengan negara maju.

1) Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:

a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan

barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.

b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*capital output ratio = COR*) dan rasio antara pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika Rp.3,00 modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar Rp.1,00 maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Hubungan tersebut yang telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 berbanding.

2) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan

pembangunan dalam bukunya *Business Cycle*. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Dia juga mengemukakan bahwa ada lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi yaitu sebagai berikut:

a. Memperkenalkan produk baru.
b. Memperkenalkan cara berproduksi baru.
c. Adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi.
d. Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
e. Pembukaan pasar-pasar baru.

Hal-hal yang berhubungan teori ini adalah ;

Ad 1). Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonom.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:67) "PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu". Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi

(*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita.

PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

Ad. 2). Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD menggambarkan hak-hak dan kewajiban pemerintah. Hak tersebut bersumber dari pendapatan pemerintah sedangkan kewajiban ialah bersumber dari belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pengeluaran tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan umum.

Menurut Halim (2012:73) mengemukakan bahwa "Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi *asset*, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana". Sedangkan menurut PSAP No. 2 menyatakan bahwa "Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah". Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 "belanja daerah dapat di definisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih"

Jadi dapat disimpulkan belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah dari rekening kas umum negara/daerah yang dapat mengurangi kekayaan bersih atau ekuitas dana pemerintah.

Klasifikasi Belanja Daerah

a. Klasifikasi Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja baik Negara maupun Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi ini meliputi:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi:

1. Tanah

2. Gedung dan bangunan
3. Peralatan dan mesin
4. jalan, irigasi dan jaringan
5. Aset tidak berwujud

c. Belanja Tak Terduga/ Belanja Lain-lain
d. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
e. Belanja transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Selain itu terdapat klasifikasi belanja daerah menurut PP 71 Tahun 2010 yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari dua jenis:

1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah;
2. Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Yang meliputi: belanja fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan pemukiman, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan sosial.

Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja dibedakan menjadi:

1) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung meliputi:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

2) Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja tidak langsung meliputi:

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Belanja bantuan keuangan
8. Belanja tak terduga

8. Teori Pengeluaran Pemerintah

Banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil keputusan mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang

harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Berikut macam-macam teori pengeluaran pemerintah menurut Sukirno (2011: 240) yaitu sebagai berikut:

a. Model Perkembangan Pengeluaran Pemerintah oleh Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi-investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu pada tahap ini, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan

persentase investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

b. Teori Adolf Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut: "Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat". Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum Wagner dapat dirumuskan sebagai berikut: peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *Organic Theory Of State* yaitu teori organis yang

menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari masyarakat lain.

c. Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

1. Hubungan Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (*aggregate demand*/AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena

pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2013: 56) "ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi". Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *social overhead capital (SOC)* yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan (Alliasuddin dan Dawood, 2008).

2. Indikator Pembangunan

Indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan pendapatan per kapita, kehidupan masyarakat ataupun indikator "campuran" karena terdiri indikator sosial dan ekonomi, indikator ini meliputi aspek-aspek berikut

: pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilasi, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, akses ke media masa.

a. Indikator Pembangunan Moneter

1) Indikator Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita seringkali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang. Pendapatan per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara.

2) Melalui indikator pendapatan per kapita ini Bank Dunia (2003) mengklasifikasikan negara menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Negara berpenghasilan rendah (*low-income economies*)
2. Negara-negara ini memiliki Pendapatan per kapita Kurang atau sama dengan US$ 745 per tahun.
3. Negara berpenghasilan menengah (*middle-income economies*)
4. Kelompok Negara ini memiliki Pendapatan per kapita lebih dari US$ 745 namun kurang dari US$ 8.626 per tahun

3) Ada beberapa kelemahan terkait digunakannya angka pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan ekonomi, akan tetapi pendekatan ini masih sangat cocok untuk digunakan dan mudah untuk dipahami, dan indikator ini mungkin adalah indikator pembangunan ekonomi satu-

satunya yang "terbaik" yang ada pada saat ini. Berikut ini adalah identifikasi-identifikasi kelemahan pendapatan per kapita, sebagai Indikator Pembangunan Ekonomi :

4) Kelemahan umum Pendekatan Pendapatan Per Kapita. Kelemahan dalam indikator ini adalah bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut.
5) Kelemahan Metodologi Pendekatan Pendapatan per Kapita. Nilai pendapatan per kapita secara khusus merupakan indeks untuk menunjukkan perbandingan kesejahteraan dan jurang tingkat kesejahteraan antar masyarakat masih mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut timbul karena perbandingan dengan cara demikian mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antara negara dalam hal seperti, struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang nasional dengan mata uang dolar Amerika Serikat.
6) Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih (Net Economic Welfare)

1) Diperkenalkan William Nordhaus dan James Tobin (1972), menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik, dengan dua cara :
   a) Koreksi Positif : Memperhatikan waktu senggang (*leisure time*) dan perekonomian sektor informal.
   b) Koreksi Negatif : Kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan.

a. Indikator Pembangunan Non Moneter

Indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa

hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indikator sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam sub-Indikator. Berikut ini adalah uraiannya.

b. Indikator Sosial

Ahli Pembangunan Ekonomi yang bernama Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara membandingkan tingkat kesejahteraan dalam 3 kelompok.

1) Kelompok pertama, merupakan suatu usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dalam dua atau beberapa negara dengan cara memperbaiki pelaksanaan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark yang selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis.
2) Kelompok kedua, dengan usaha membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan melihat pertimbangan perbedaan tingkat harga di setiap negara.
3) Kelompok ketiga, adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter seperti, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, dan usaha ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Bennet.

c. Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, ada sebuah indeks gabungan yang dikenal dengan **Physical Quality of Line Index (PQLI)** dan **Indeks Kualitas Hidup (IKH)**. Indeks ini diperkenalkan oleh Morris D. Morris. Indeks Kualitas Hidup (IKH) terdiri dari 3 indikator yakni, tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat

melek huruf.

Sejak tahun 1990, **United Netions for Development Program (UNDP)** mengembangkan indeks yang sering dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur indeks ini adalah :

1) Tingkat harapan hidup.
2) Tingkat melek huruf masyarakat.
3) Pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara.

Indeks HDI ini besarannya antara 0 sampai dengan 1,0. Apabila angka indeks yang diperoleh dari suatu negara mendekati 1, maka HDI di negara tersebut semakin tinggi. Sedangkan, apabila angka indeks mendekati 0, maka negara tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah.

d. Indikator Campuran

1) Indikator susenas inti

Indikator sussenas inti ini merupakan indikator "campuran" karena terdiri indikator sosial dan ekonomi, indikator ini meliputi aspek berikut : Pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilasi, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, akses ke media masa.

2) Indeks pembangunan manusia

Sejak tahun 1990 UNDP mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai indeks pembangunan manusia atau PMI, konsep PMI ini memberikan pelajaran bagi kita tentang apa yang seharusnya dipandang sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Tidak pernah lepas berbagai strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

C. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi\

1. Strategi Upaya Minimum Kritis (Critical Minimum Effort)

a. Menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat pembangunan berkesinambungan (SUSTAINABLE) : terjadi laju pertumbuhan penduduk (HARVEY LEIBSTEIN).
b. Setiap ekonomi tergantung HAMBATAN & RANGSANGAN.
   1) Hambatan : menurunkan pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya
   2) Rangsangan : menaikkan pendapatan per kapita

2. Pertumbuhan Penduduk Fungsi Dari Pendapatan Per kapita

a. Pendapatan naik, meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Hanya pada titik tertentu, jika melampaui titik tersebut, kenaikan pendapatan per kapita menurunkan tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan mencapai tahap maju, maka laju pertumbuhan penduduk turun (LEIBSTEIN).
b. Dengan kenaikan pendapatan per kapita, keinginan memperoleh anak semakin berkurang. Spesialisasi meningkat dan Mobilitas ekonomi & sosial ; kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal. Maka laju pertumbuhan penduduk KONSTAN dan menurun (TESIS KAPILARITAS SOSIAL DUMONT).

Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dari pelaksanaan Upaya Minimum Kritis :

1) Skala disekonomis internal ; akibat tidak dapat dibaginya faktor produksi.
2) Skala disekonomis external ; akibat ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan di negara berkembang.

D. Strategi Pembangunan Seimbang

Para ekonom Teori Dorongan Besar-Besaran (BIG PUSH THEORY)

Yaitu Pembangunan Di Berbagai Jenis Industri Secara Bersamaan (Simultaneous) Sehingga Industri Tersebut Saling Menciptakan Pasar. Diperlukan Keseimbangan Antara Demand & Supply.

Tujuan Utama : Menciptakan Jenis Industri Yang Berkaitan Erat Satu Dengan Yang Lain Sehingga Setiap Industri Memperoleh Eksternalitas Ekonomi Sebagai Akibat Industrialisasi. Menurut Reinstein-Rodan, Pembangunan Industri Besar-Besaran Menciptakan 3 Macam Eksternalitas Ekonomi, Yaitu :

1) Yang diakibatkan oleh perluasan pasar
2) Karena industri yang sama letaknya berdekatan
3) Karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.

SCITOVSKY : eksternalitas : jasa-jasa yang diperoleh dengan cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri.

E. Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Albert O. Hirschman dan Paul Streeten : pola yang lebih cocok untuk mempercepat pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena :

1. Secara historis pembangunan ekonomi coraknya tidak seimbang
2. Mempertinggi efisiensi penggunaan Sumber daya tersedia
3. Pembangunan Tak Seimbang Menimbulkan KEMACETAN (BETTLENECKS) Yaitu Gangguan Dalam Proses Pembangunan Tetapi Akan Menjadi Pendorong Pembangunan Selanjutnya.

Hirschman : Menganalisis Alokasi Sumber Daya Sektor Prasarana (*Social Everhead Capital* = SOC) Dengan Sektor Produktif Yang Menghasilkan Barang Kebutuhan Masyarakat (*Directly Productive*

Activities = DPA). Terdapat 3 Pendekatan :

1. Pembangunan yang seimbang antar kedua sektor
2. Pembangunan tidak seimbang dimana sektor prasarana lebih ditekankan.
3. Pembangunan tidak seimbang dimana sektor produktif lebih ditekankan.

Kegiatan ekonomi mencapai efisien dan optimal, jika :

1. Sumber daya dialokasikan DPA dan SOC, pada tingkat produksi maksimum
2. Pada tingkat produksi tertentu, jumlah sumber daya digunakan DPA sedangkan SOC jumlahnya menurun.

Pembangunan Tak Seimbang Dalam Sektor Produktif

Mekanisme pendorong pembangunan (INDUCEMENT MECHANISM) ada 2 :

a. Pengaruh keterkaitan ke belakang (Backward Linkage Effects)
b. Tingkat rangsangan yang diciptakan pembangunan industri terhadap perkembangan industri yang menyediakan input bagi industri tersebut. Pengaruh keterkaitan ke depan (Forward Linkage Effects)
c. Rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan industri terhadap perkembangan industri yang menggunakan produk industri yang pertama sebagai input mereka.

Berdasarkan pada tingkat keterkaitan antar industri, ada 2 golongan :

a. Industri SATELIT (SATELITY INDUSTRY)

1) Lokasi berdekatan dengan industri induk mempertinggi efisiensi
2) Input utama berasal dari produk industri induk
3) Besarnya industri tidak melebihi industri induk.

b. Industri NON SATELIT (NON SATELITY INDUSTRY)
CHENERY & WATANABE * Penggolongan Industri Ada 4 Golongan:

1) Industri Barang Setengah Jadi
2) Industri Barang Jadi
3) Industri Barang Setengah Jadi Sektor Primer
4) Industri Barang Jadi Sektor Primer.

F. Ketimpangan negara berkembang :

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Development Region*) dan daerah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Termasuk dalam analisa ini adalah hasil studi dari Jeffrey G. Williamson yang melakukan pengetesan terhadap kebenaran Neo-Klasik tersebut. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan menggunakan *Williamson Index* dan ukuran ketimpangan lainnya. Selanjutnya pula dengan pembahasan tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia yang dilanjutkan dengan faktor-faktor utama yang menentukan ketimpangan tersebut. Terakhir dilakukan pembahasan tentang beberapa kemungkinan

kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Pengertian Ketimpangan dan pengertian Pembangunan

a. Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008). Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan, ada ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal (bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek *return* atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap yang mengakibatkan jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi yang berkembang akan meningkat (Hartono, 2008).

Pendapatan per kapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Dalam pengukuran

ketimpangan pembangunan ekonomi regional digunakan Indeks Williamson.

Berikut beberapa definisi ketimpangan menurut teori para ahli :

1) Menurut Budi Winarno

Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

2) Menurut Jonathan Haughton & Shahidur R. Khandker

Ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan.

3) Menurut Andrinof A. Chaniago

Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.

4) Roichatul Aswidah

Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

b. Pengertian pembangunan;

1) Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah dan bagaimana pandangan para ahli tentang Ketimpangan Pembangunan antar daerah

Ketimpangan pembangunan pertama dikemukakan oleh teori Neo-Kasik.

Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antar daerah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai *Hipotesa Neo-Klasik* yang menarik perhatian para ekonom dan perencana pembangunan daerah.

Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur -angsur ketimpangan pembangunan antar daerah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar daerah adalah berbentuk huruf U terbalik (*Reserve U-shape Curve*) sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4 terdahulu.

Pertanyaan yang menarik adalah mengapa pada waktu proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang, justru ketimpangan meningkat? Jawabannya adalah karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang. Kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Keadaan yang berbeda terjadi di negara yang sudah maju dimana kondisi daerahnya umumnya telah dalam kondisi yang lebih baik dari segi prasarana dan sarana serta kualitas sumberdaya manusia. Di samping itu, hambatan-hambatan sosial dan budaya dalam

proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali. Dalam kondisi yang demikian, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antar daerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan cenderung mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jefrey G. Willamson pada tahun 1996 melalui suatu studi tentang ketimpangan pembangunan antar daerah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar daerah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal sebaliknya.

Fakta empirik ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang sebenarnya bukanlah karena kesalahan pemerintah atau masyarakatnya, tetapi hal tersebut terjadi secara natural di seluruh negara. Bahkan ketika Amerika Serikat mulai melaksanakan proses pembangunan pada abad kedelapan belas dulu, peningkatan ketimpangan pembangunan antar daerah juga meningkat tajam. Peningkatan ketimpangan ini bahkan sampai memicu terjadinya perang saudara antar negara bagian di Selatan yang masih relative tertinggal dengan negara bagian di Utara yang sudah lebih maju. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dengan adanya pemberontakan PRRI-Persemesta di Sumatera Barat tahun 1957, *Gerakan Aceh Merdeka (*GAM) dan *Organisasi Papua Merdeka* (OPM).

3. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Selanjutnya, pada bagian ini, perlu pula dibahas beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Dengan adanya analisa ini, akan dapat dijelaskan secara empirik unsur penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Di samping itu, analisa ini juga sangat penting artinya karena hasilnya dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah tersebut.

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan di sini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang

dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi pada negara sedang berkembang dimana mobilitas barang dan jasa kurang lancar dan masih terdapatnya beberapa daerah yang terisolir.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong

terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Tidak dapat disangka bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

f. Solusi mengatasi Ketimpangan Pembangunan antar Daerah

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau wilayah.

g. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Sebagaimana telah dibahas terdahulu bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam yang cukup besar antar daerah. Sementara itu, ketidak lancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan wilayah tersebut. Karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan

tersebut adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah. Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan ke seluruh pelosok daerah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan di sini adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antar daerah.

4. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Untuk mengurangi kepentingan pembangun antar wilayah, kebijakan dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan.

5. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan (*Growth Poles*) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep *konsentrasi* dan *desentralisas*i secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Sedangkan aspek

desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah.

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas, karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar daerah akan dapat pula dikurangi. Pemerintah Indonesia telah melakukan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan mulai tahun 2001 yang lalu. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing (desentralisasi pembangunan).

Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah itu adalah perbedaan pembangunan antar suatu daerah dengan daerah lainnya baik secara partikal maupun secara horizontal yang menyebabkan disparatis atau ketidakmerataan pembangunan. Itu di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam,

Perbedaan Kondisi Demografis, Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa, Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah, dan Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan cara pemerintah harus melakukan Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan, Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan, Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

BAB V

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI

A. Konsep Dasar Pemikiran Administrasi Pembangunan

Permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dalam menjalankan aktivitas pemerintahan terutama pemerintahan daerah adalah sistem administrasi pembangunan yang belum mendukung (jelek). Padahal lebih dari 40% dana APBN dan APBD habis untuk biaya membayar penggerak administrasi pembangunan (PNS). Keberadaan administrasi pembangunan dalam masa desentralisasi memegang peranan yang sangat penting.

Tanpa adanya sistem administrasi pembangunan yang baik pembangunan tidak akan berjalan baik atau bahkan kacau. Dengan demikian, upaya pembaruan birokrasi atau dalam bahasa lain reformasi birokrasi adalah suatu hal yang mutlak untuk segera dilakukan. Kelemahan utama selama ini adalah birokrasi kita yang sangat birokratik sehingga urusan menjadi tidak efisien dan sangat lama.

Ada lima ciri administrasi yang umumnya ditemukan di negara berkembang. Pertama, pola dasar (*basic pattern*) administrasi publik di Indonesia bersifat jiplakan (*imitative*) dari pada asli (*indegenous*). Di negara-negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah

bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara yang pernah dijajah umumnya mengikuti pola administrasi negara yang menjajahnya.

Di negara bekas jajahan, pengorganisasian jawatan-jawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya mengikuti karakteristik penjajahnya, dan merupakan kelanjutan dari administrasi kolonial. Administrasi kolonial itu sendiri diterapkan hanya di daerah jajahannya. Sementara di negaranya sendiri tidak dilaksanakan. Administrasi kolonial bersifat elitis, otoriter, menjauh dari masyarakat, lingkungannya, serta paternalistik. Pola administrasi kolonial ini diwarisi administrasi di negara-negara yang baru merdeka. Bahkan sampai sekarang masih menjadi ciri birokrasi di banyak negara berkembang terutama Indonesia.

Kedua, birokrasi di negara berkembang kekurangan sumberdaya manusia terampil untuk menyelenggarakan administrasi pembangunan. Kekurangan ini bukan pada kuantitas, melainkan kualitas. Dari sisi kuantitas justru mengalami kelebihan, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan (*overstaffed*). Yang justru kurang adalah administrator yang terlatih, dengan kapasitas manajemen, keterampilan-keterampilan pembangunan, dan penguasaan teknis yang memadai. Gejala ini nampak pada besarnya jumlah yang diperlukan dalam proses rekrutmen. Di wilayah Sumatera Selatan pada 2006 misalnya, mengalokasikan pengangkatan sampai 8.126 orang. Pertanyaannya sekarang apa memang benar sebanyak itu PNS yang dibutuhkan? Berapa perbandingan tingkat pendidikan yang tamatan SMP, SMU, S1, dan S2? Jangan-jangan setelah diangkat menjadi ASN (Aparat Sipil Negara) perilaku mereka sama seperti selama ini di mana tidak ada deskripsi tugas yang jelas sesuai keahliannya sehingga tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakan atau apa yang dapat dikerjakan. Atau besarnya alokasi yang akan diterima ini memang kebutuhan karena

dampak dari pemekaran kabupaten/kota. Sehingga membutuhkan banyak ASN. Pada umumnya penyebab utama keadaan kurangnya kemampuan ini mencerminkan kondisi dan tingkat pendidikan. Namun hal ini tidak dapat disamaratakan. Seperti kasus di Mesir dan India, di mana dua negara ini banyak memiliki tenaga yang berpendidikan namun menganggur. Hal ini disebabkan tenaga yang berpendidikan ini dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang tidak berkualitas atau lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan (*marginal institutions*).

Ketiga, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi pada hal-hal lain ketimbang mengarah pada yang benar-benar menghasilkan. Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya daripada kepentingan masyarakat. Dari sifat ini lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya yang pada akhirnya para birokrat memiliki kredibilitas yang rendah dan tidak mengenal etika. Korupsi telah merajalela sedemikian rupa. Sehingga menjadi fenomena dan 'diterima' sebagai sesuatu yang wajar.

Keempat, adanya kesenjangan yang lebar antara yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Budaya yang hidup adalah budaya formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Gejala ini nampak dari penetapan perundang-undangan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Bahkan dilanggar sendiri oleh yang membuatnya, sering melaporkan hal-hal yang baik saja kepada atasan bahkan terkadang memanipulasi data untuk memberi gambaran yang menguntungkan.

Kelima, birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan dari administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus

hidup dan berlanjut setelah merdeka. Pada masa kolonial orang-orang berpendidikan berkumpul di administrasi pemerintahan. Sehingga kemampuan administrasinya tidak tertandingi, elit dan pihak-pihak luar sulit untuk melakukan kontrol Penempatan orang-orang berpendidikan ini sendiri selain dengan tujuan menggerakan sistem. administrasi juga untuk menjauhkan orang berpendidikan dengan rakyat. Dengan demikian, penjajahan menjadi langgeng.

Keadaan sekarang adalah kebalikannya. Birokrasi terbaik tidak lagi dimiliki kantor pemerintah. Birokrasi yang baik sudah beralih ke perusahaan swasta, swasta asing, dan BUMN. Tenaga administrasi dan sistem birokrasi di sini bisa andal karena memang orang yang berkualitaslah yang menjalankannya dan proses seleksi yang jelas terhadap tenaga administrasi. Mereka yang tidak masuk kualifikasi tidak akan diterima serta adanya upaya yang jelas untuk meningkatkan kualitas pegawai. Dari beberapa ciri-ciri yang dikemukakan di atas, nampak jelas betapa kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi dalam upaya pembangunan administrasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Di antaranya pembenahan sikap mental dan norma-norma kepegawaian. Sikap mental umum ASN di Indonesia sebagai penggerak Administrasi pembangunan dapat digolongkan dalam tiga golongan besar.

Pertama, golongan tradisionalis, yaitu mereka yang menolak setiap usaha untuk mengintrodusir cara kerja baru, metode baru, dan inovasi baru. Mereka lebih senang bekerja pada suasana yang serba tradisional dan established. Bagi golongan tradisional ini, masa kerja diidentikkan dengan pengalaman mereka yang telah bekerja 20 tahun dianggap telah berpengalaman 20 tahun

Hal ini sesungguhnya tidak benar sebab pengalaman secara implisit memiliki makna kemampuan menumbuhkan kapasitas kerja. Jika seseorang tidak berkembang kemampuannya, berapun lamanya ia bekerja ia tidak bisa dikatakan berpengalaman. Sesungguhnya

penolakan golongan tradisionalis ini pada hal-hal baru karena ketakutan akan kehilangan kedudukan, jabatan, pangkat, dan pengaruhnya karena akan terlihat sesungguhnya ia tidak mampu untuk bekerja lebih baik dan lebih cepat.

Kedua, golongan modernis, yaitu orang-orang yang pada umumnya berpandangan luas dan bersedia untuk menerima hal-hal yang baru. Bahkan tidak jarang mereka menjadi pelopor untuk menemukan hal-hal yang baru itu. Pioneering spirit dan sense of dedications mereka pada umumnya tinggi, hanya saja jumlah mereka dalam birokrasi di Indonesia masih sedikit, kedudukan dan pengaruhnya belumlah begitu menentukan. Golongan semacam inilah yang perlu ditingkatkan dalam waktu yang sesingkat mungkin karena golongan ini dapat menjalankan peranan selaku *administrative change agents*, *administrative reform agents*, dan *administrative modernizing agents*.

Ketiga golongan ambivalen. Golongan ini di Indonesia adalah mayoritas dan sesungguhnya golongan ini bahaya besar dan sebagai penghalang dalam usaha pengembangan suatu sistem administrasi yang tangguh. Ciri umum dari golongan ini adalah ingin mempertahankan status quo, orientasi waktu masa sekarang, ketidakmampuan mengambil risiko, parasitisme, dan oportunisme.

Masalah kesejahteraan pegawai, merupakan suatu hal yang tidak dapat disanggah oleh siapapun juga. Bahwa pendapatan bersih dan nyata para PNS di Indonesia tidak memungkinkan untuk hidup dalam suasana dan kesejahteraan yang layak dan mewah. Namun keadaan ini merupakan pencerminan dari tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan yang juga masih rendah. Meskipun gambaran rakyat secara keseluruhan, masalah kesejahteraan ASN perlu dipikirkan secara serius. Tanpa pemikiran yang serius, penggerak administrasi pembangunan (ASN) akan berusaha membuka peluang peningkatan kesejahteraan menurut cara-caranya sendiri yang belum tentu halal dan membuka peluang merajalelanya korupsi, penyalahgunaan

wewenang dan jabatan. Selain itu, sulitnya pengambilan tindakan disiplin, apatisme, abseenteeisme, kemalasan, dan kemerosotan moral. Jika gejala ini nampak, maka birokrasi di Indonesia akan menyerupai birokrasi pasar gelap (*black market bureaucracy*) yang 'menjual' jasa pelayanan yang diberikan kepada rakyat sebagai pengguna jasanya. Slogan abdi rakyat dan abdi negara akan tinggal kenangan. Namun harus disadari peningkatan kesejahteraan pegawai tidak akan menjamin hilangnya penyakit birokrasi seperti di atas. Masalah penyakit birokrasi ini pada dasarnya menyangkut moral. Jika moral menjadi penyebabnya, sebesar apapun pendapatan yang diterima tidak akan menghilangkan sifat keserakahan dan jiwa pemangsanya. Istilah yang kita kenal kalau ingin kaya raya dan berada dalam kemewahan jangan jadi ASN. Karena negara ini belum mampu memberikannya. Tapi kalau hidup berada dengan sedikit lebih dari rakyat kebanyakan dengan masa depan dan hari tua yang aman karena ada uang pensiun, maka menjadi PNS mungkin adalah pilihan yang tepat.

Ketiga, masalah peningkatan kemampuan kerja. Secara umum birokrasi di Indonesia memiliki kekurangan managerial skills, technical skills, dan tecnological skills. Rendahnya kemampuan kerja ini pada umumnya dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan seperti latihan jabatan, kursus, seminar, konferensi, simposium, coaching, dan pendidikan akademis. Namun masalah peningkatan kemampuan kerja ASN ini terkadang kurang mendapat perhatian dari pimpinan, karena pimpinan kurang menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas kerja bawahannya. Padahal seorang pimpinan yang baik harus mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk mengembangkan kemampuan kerja bawahannya, yang kelak mungkin akan menjadi penerus estafet pemerintahannya.

Permasalahannya tidak jarang sikap mental negatif pimpinan yang merasa risih bila ada bawahannya memiliki kemampuan dan

pengetahuan yang tinggi melebihi dirinya. Bawahan seperti ini dinilai sebagai saingan dan ancaman yang harus segera disingkirkan. Penyingkiran ini dilakukan dengan cara yang halus misalnya tidak memberikan jabatan, memperlemah pengaruhnya, menugaskan di daerah terpencil, dan memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Sehingga ia kelihatan tidak bisa dan berbagai upaya penyingkiran lainnya. Di luar itu, tidak jarang pendidikan dan latihan sebagai sarana peningkatan kualitas ini dijadikan ajang kolusi dengan mengikutkan orang satu suku, keponakan, teman dekat yang pada akhirnya orang yang tidak tepatlah yang disuruh mengikuti pendidikan dan latihan. Atau mental yang dari awalnya yang sudah rusak pendidikan dan latihan tidak dijadikan ajang peningkatan kualitas diri, mengikutinya secara tidak serius atau menjadi ladang baru korupsi untuk menambah 'seseran'.

Keempat, masalah approach yang legalistis. Yang dimaksud dengan approach yang legalistis adalah dengan memandang permasalahan tidak pada tempatnya. Gejala ini akan nampak ketika ada suatu permasalahan maka memandang permasalahan tersebut dari sisi hukumnya. Seolah-olah semua permasalahan akan selesai dengan adanya instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketika merajalela korupsi diterbitkanlah UU Antikorupsi. Mereka beranggapan korupsi akan hilang karena sudah ada UU. Padahal yang sesungguhnya lebih penting adalah actions approach.

Gejala lain yang nampak karena approach yang legalistis adalah memahami ketentuan hukum secara letterlijk. Akibatnya aturan-aturan hukum bukan menjadi alat untuk menjamin proses pembangunan, malahan menjadi alat penghancur. Aturan-aturan hukum menjadi kaku dan sulit untuk ditegakkan karena tidak adanya fleksibilitas dalam penyelenggaraannya.

Sejarah Administrasi Pembangunan

1. Ilmu Administrasi Negara.

Administrasi Pembangunan yang dikembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu Administrasi Negara. Pada abad ke 19 dapat dikemukakan sebagai permulaan perkembangan Ilmu Administrasi Negara yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi Administrasi Pemerintahan di Amerika Serikat yaitu antara lain : Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White, dan bahkan tulisan Alekxis de Tocqueville jauh sebelumnya dianggap pula awal perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara lebih relevan bagi negara-negara yang sudah maju.

Empat perumusan untuk menjelaskan pengertian Ilmu Administrasi Negara yaitu :

1) Edward H. Litehfield, menyatakan bahwa Ilmu Administrasi Negara adalah "Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin"
2) Dwight Waldo, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah "Managemen dan Organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah"
3) Dimock, Dimock dan Koening, menyebutkan bahwa Administrasi Negara adalah "Kegiatan Pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya"
4) Arifin Abdulrachman, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah "Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara" (Bintoro Tjokroamidjojo, 1974 : 1)

Keempat disiplin tersebut membedakan proses politik dan administrasi negara, namun kenyataannya sangat sulit memisahkan proses politik dan proses administrasi negara.

Perumusan yang ketiga tersebut di atas dapat pula diperinci dalam pembahasan-pembahasan sebagai berikut :

a. Apa yang harus dilaksanakan (the what's), haluan politik, kebijaksanaan, program-program negara (pemerintah).
b. Bagaimana sebaiknya melaksanakannya (the hows), sangat tergantung oleh kondisi-kondisi dinamis dari lingkungan (ekologi), pribadi dan lain-lain.
c. Benarkah pelaksanaan itu dan pada siapa harus bertanggungjawab atau proses evaluasi dan kontrol.

Tugas utama Administrasi Negara ialah pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya. Administrasi Negara mempunyai peranan yang besar dalam proses penetapan/penentuan kebijaksanaan politik

Tiga fungsi dasar Administrasi Negara sebagai berikut :

a. Formulasi/perumusan kebijakan.

1) Kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada.

Kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/ masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (***fore cast***) dari perkembangan yang mungkin terjadi.

2) Supaya suatu program strategis dan taktik-taktik kegiatan yang berdasar kedua di atas dapat disusun.
3) Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (***decision making***)
    1. Pengaturan/Pengendalian unsur-unsur administrasi.
    2. Struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain.
    3. Penggunaan Dinamika Administrasi.

Kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilaksanakan tidak saja bagi realisasi tujuan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk pengendalian atau pengawasan dari pada unsur-unsur administrasi.

Unsur-unsur dinamika administrasi (***the dynamics of administration***) ini meliputi :

1) Pimpinan.
2) Koordinasi.
3) Pengawasan.
4) Komunikasi.

Menurut Waldo, dalam Bintoro, 1974 : 4, Administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional, dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fungsi yang dilakukan.

Sedangkan The Liang Gie, mengatakan Administrasi adalah "Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu." Dan apabila tujuan-tujuan itu adalah tujuan negara/pemerintah, maka menjadi lingkupan wilayah Ilmu Administrasi Negara.

Kemudian S.P. Siagian (Dalam Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya, Gunung Agung, Jakarta, 1978 : 2) memberikan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Karena masih terikatnya buku-buku administrasi negara dengan kasus empiris Negara Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, maka terdapat suatu orientasi baru yang dipelopori oleh kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB pada tahun 1950-an mulai memberikan perhatian terhadap

segi administrasi negara-negara yang baru berkembang. Hal ini terutama dihubungkan dengan pemberian bantuan luar negeri.

Kondisi ini juga dapat dilihat mengenai bantuan dari luar negeri yang terus berlanjut sampai sekarang yaitu bantuan Loan, IMF, seperti salah satu contoh yaitu bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari bantuan Luar Negeri (Bank Dunia).

2. Perkembangan ke arah Administrasi Pembangunan.

Para ahli Ilmu Administrasi Negara, kemudian memberikan perhatian pula terhadap dua hal yaitu :

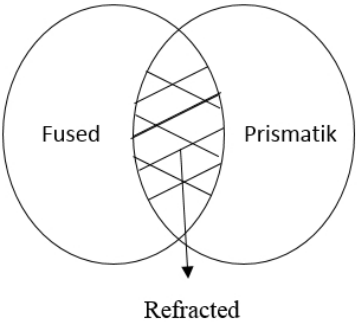
a. Administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisional agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri).
b. Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai praktek di bidang-bidang kehidupan yang lain.

Oleh para ahli tersebut dikembangkan studi komperatif mengenai hal-hal itu. Mereka kemudian menyebutkan diri sebagai kelompok studi komperatif atau Comparative Administratif Group (CAG), yang dipelopori oleh antara lain :

1) F.W. Riggs
2) John D. Montgomery
3) Milton Esman
4) Raiph Braibanti
5) William J. Siffin
6) Edward W. Weidner, dan lain-

Dalam Prismatik tulisan Fred W. Riggs, tentang "*Prismatic*

Society" (Bintoro,1974:5) mengembangkan suatu model mengenai ciri birokrasi dari satu lingkungan masyarakat yang belum maju (*refracted type*) tapi sudah bukan lingkungan masyarakat yang masih tradisional (*fused type*). Model ini disebut "Sala Model" dalam suatu lingkungan "Masyarakat Prismatik" lain.



Model ini berguna untuk menjelaskan sikap-sikap birokrasi dan hubungan organisasi dalam masyarakat yang baru berkembang.

Perkembangan selanjutnya ialah adanya lebih ketegasan orientasi di dalam Ilmu Administrasi yang sekarang merupakan tingkat-tingkat permulaan pertumbuhan Ilmu Administrasi Pembangunan.

Kelompok studi komperatif yang terdahulu kemudian memperkembangkan diri menjadi kelompok Administrasi Pembangunan atau Development Administratif Group (DAG). Dan kelompok ini memperluas diri dengan ahli-ahli dari berbagai pihak, terutama ahli-ahli dari negara baru berkembang antara lain :

a. Dr. Ajit Bannerjee.
b. Dr. Carlos P.Ramos.
c. Dr. S.S. Husen.
d. Dr. Hahn-Been Lee.
e. Dr. S.P. Siagian, dari Indonesia dapat disebut sebagai salah

Seorang pelopor pengembangan "Ilmu Administrasi Pembangunan di Indonesia".

Lebih lanjut dalam bukunya Administrasi Pembangunan (Bintoro, 1974-9) menyebutkan bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai cirri-ciri yang lebih maju dari pada Administrasi Negara.

Beberapa ciri-ciri perbedaan tersebut dapat dilihat dari dalam uraian di bawah ini sebagai berikut :

Ciri-ciri Administrasi Negara	**Ciri-ciri Administrasi Pembangunan**
1. Lebih banyak terkait dengan Lingkungan masyarakat negara-negara maju.	1. Lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berbeda terutama bagi lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang.
2. Terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tapi masih kurang ditekankan. Bahkan ada bersikap netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan	2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, perekonomian dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik

3. Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib/ efesien dari unit-unit kegiatan pemerintah pada waktu ini. Berorientasi masa kini	3. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan. Berorientasi masa depan.
4. Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat (*public service*) dan tertib pemerintahan. Administrasi Negara lebih bersikap sebagai "*Balancing Agen*" (Pelayanan umum)	4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*Development Functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Administrasi Pembangunan lebih bersikap "*Developmen Agent*" (Penggerak Pembangunan).

5. Sebagai akibat dari hal yang disebutkan di atas, maka Administrasi Negara lebih menengok kepada kerapian aparatur administrasi itu sendiri	5. Administrasi harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan tujuan-tujuan yaitu ekonomi, sosial. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
6. Dalam Administrasi Negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrasi dalam aparatur pemerintah sekedar sebagai pelaksana	6. Dalam Administrasi Pembangunan administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*Change Agents*).
7. Lebih berpendekatan legalistis (*Legalistic Approach*)	7. Lebih berpendekatan lingkungan (*Ekological Approach*). Berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem Solving*).

3. Ciri Perumusan Administrasi Pembangunan.

Dua ciri utama yang membedakan dan dianggap paling penting dan menunjukkan lebih majunya pendekatan Administrasi Pembangunan adalah

a. Ciri pokok pertama adalah orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.

Bahkan Administrasi Pembangunan dimaksud untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*Basic change*) di berbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling berkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.

Thompson menyebut bahwa Administrasi Pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk "*innovate"* (melakukan perubahan).

b. Ciri pokok kedua, pendekatan Administrasi Pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Usaha-usaha perubahan di bidang administrasi saling pengaruh mempengaruhi dengan perubahan-perubahan di bidang lain tersebut.

Perbaikan administrasi bukan hanya untuk kepentingan baiknya administrasi itu saja, tetapi memberikan pelayanan administrative usaha perbaikan dan perubahan di bidang tersebut di atas, supaya dapat terselenggara secara lebih baik.

Administrasi Pembangunan berarti kemampuan sistem administrasi untuk menampung adanya akibat-akibat pembangunan.

Montgomery dan Esman dalam Development Administration in Malaysia, mengemukakan **"**Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan (***The Development Of Administration***) dan juga berarti perbaikan

dari pelaksanaan usaha pembangunan (***Administration Of The Development*****).**

Siagian, 1974-4, merumuskan pengertian Administrasi Pembangunan sebagai berikut : "**Administrasi Pembangunan** adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan ".

Pada pokoknya pendekatan Administrasi Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara/pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang lebih baik. Administrasi Pembangunan dianggap lebih baik dan maju di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa (***Nation Building*****)** dan atau perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan ke arah kemajuan seringkali disebut pula oleh para cendekiawan sebagai Modernisasi.

S.P. Siagian (Administrasi Pembangunan, 1978 :2) **Pembangunan** didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Apabila definisi tersebut di atas dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan.

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu **proses**. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan; Meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi-bagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (*independent phase of a prosecess*). Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu

yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara **sadar** dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara **berencana** dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada **modernitas.** Modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat **multi-dimensionil.** Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, social-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.

Keenam, bahwa ke semua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bahwa (*nation-building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai titik tolak, maka Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

4. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan belum diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Saat ini perkembangan menuju ke arah itu terlihat dalam berbagai usaha para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan berkembang berdasarkan disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara.

Administrasi negara muncul akhir abad ke 19 yang dipelopori oleh penulis-penulis dan praktisi-praktisi administrasi pemerintah di Amerika Serikat. Pelopor-pelopor dari ilmu tersebut antara lain Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White.

Ada empat subfungsi perumusan kebijakan yaitu:

a. Kebijakan tergantung analisis yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada
b. Perumusan kebijakan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan perkiraan dari perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin dilalui.
c. Agar suatu program strategi dan taktik-taktik kegiatan berdasarkan seperti no 1 dan 2.
d. Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan, dengan kata lain, bagian ini merupakan perencanaan.

Unsur-unsur administrasi ialah, struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Unsur dinamik administrasi meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi.

Para ahli administrasi negara memberikan perhatian terhadap dua hal, yaitu administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan (dari

masyarakat tradisionil agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri). Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara kehidupan yang lain.

Administrasi negara lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan Negara-negara yang belum maju, yang berarti perhatian terhadap usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan-pembangunan. Suatu perencanaan yang berorientasi kepada pelaksanaannya akan lebih banyak mengarah dalam pelaksanaan pembangunan.

Administrasi pembangunan berfungsi untuk mendukung proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari program-program pembangunan, yang tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi dan politik). Administrasi pembangunan juga mendukung tata pelaksanaan kebijakan secara efektif (instrumen = administrasi pembangunan).

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal, diantaranya falsafah hidup masyarakat dan falsafah politik masyarakat tersebut. Ada negara-negara yang membebaskan masyarakat dalam perkembangannya, sehingga peran pemerintah tidak terlalu dominan. Namun ada pula negara yang menginginkan pemerintah mengurus hampir segala sesuatu kehidupan masyarakat bangsa tersebut, yang mendasari orientasi ini yaitu falsafah politik tradisional. Peran serta fungsi pemerintah seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama dalam bidang ekonomis materiil.

Peran pemerintah dalam pembangunan berencana dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu pemerintah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan, sering kali penarikan pajak tidak diabdikan untuk kepentingan masyarakat sehingga pemerintah berperan dalam hal ini. Adapun istilah *service*

state, dimana pemerintah berperan sebagai abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi *development agent* atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan dilakukan dengan lima macam cara, diantaranya:

a. Operasi (*operation*) langsung, yaitu pemerintah menjalankan sendiri kegiatan pembangunan tertentu.
b. Pengendalian langsung (*direct control*) penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan sebagainya.
c. Pengendalian tidak langsung (*indirect control*) dengan cara pemberian aturan dan syarat.
d. Pemengaruhan langsung (*direct influence*) dengan cara persuasi atau nasihat.
e. Pemengaruhan tidak langsung (*indirect influence*) dengan bentuk involvement.

Di Indonesia peran serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional, tercermin dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."

1. Penyempurnaan Administrasi Negara.
    a. Kepemimpinan, Koordinasi, Pengawasan.
    b. Administrasi fungsional kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain dan kelembagaan dalam arti sempit.
2. Penyempurnaan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan (*The Administration of Development*)

a. Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi maupun proses politik)
b. Tata pelaksanaannya secara efektif.
   Salah satu fungsi lain yang penting dalam administrasi pembangunan ialah membangun partisipasi masyarakat.

B. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana.

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap pembangunan masyarakat tergantung oleh beberapa hal :

Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara-negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuh kembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu sendiri (Filsafat kemasyarakatan Lasser). Ada pula negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut (Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu).

Peranan dan fungsi pemerintahan juga sering tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomi materiil.

Peranan Pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut :

a. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini

adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.

b. Kemudian timbul pengertian *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga disadari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai *welfare state* atau negara kesejahteraan.
c. Di samping itu terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yaitu memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Mengenai cara pelaksanaan peranan pemerintah terdapat klasifikasi sebagai berikut :

Pertama : disebut sebagai klasifikasi Awaloedin yaitu pembagian cara pelaksanaan peranan pemerintah atas :

a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat disebut klasifikasi :

1) Penentuan kebijaksanaan.
2) Pemberian pengarahan dan bimbingan.
3) Pengaturan melalui perizinan.
4) Pengawasan.

Produk dari pada fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan.

b. Pemilihan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Kedua : Cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat

dikemukakan pula pikiran dari ------ Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau

campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat/proses pembangunan dapat dilakukan dengan lima cara :

a. Operasi langsung *(operation)* pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
b. Pengendalian langsung *(direct control*) penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain) penjatahan dan lain-lain.
c. Pengendalian tak langsung (*indirect control*) cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu.
d. Pengarahan langsung (*direct influence,* di sini dilakukan cara persuasi dan nasihat.
e. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*)

Ini adalah bentuk involvement yang paling ringan, misalnya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan, penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru.

Lepas dari pada tingkat campur tangan pemerintah dalam berbagai kegiatan usaha, maka kenyataan adalah fungsi pemerintah dalam berbagai kegiatan makin lama makin banyak juga. Bahkan bagi negara-negara yang mengenai kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang besar, telah pula kelihatan meluasnya tugas baru dinas-dinas pemerintah yang melayani kepentingan umum, yaitu mengatur, mendorong, mengkoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun daerah.

Hal ini makin kentara bagi negara-negara yang baru berkembang,

sebab yang terakhir ini antara lain oleh karena di negara-negara baru berkembang, pemerintahlah merupakan wadah dalam masyarakat dalam mana terhimpun sebagian terbesar dari unsur-unsur modern dalam masyarakat, menggunakan alat-alat negara sebagai alat utama di dalam mengolah atau mengadministrasikan usaha-usaha pembangunan.

Peranan serta fungsi pemerintah juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara.

Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pernyataan peranan pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi. Demikian pula dengan sifat perencanaan pembangunan yang dilakukan.

Fungsi pokok pemerintahan tersebut dapat dibagi pula dalam berbagai tugas-tugas pemerintahan yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Dalam tugas-tugas pemerintahan yang umum dapat dikemukakan dalam rangka pemerintahan umum, pemeliharaan ketertiban, keamanan dan pelaksanaan hukum.

Tugas umum ini juga sering kali diperluas dengan tugas-tugas pelayanan umum, dilakukan melalui penyelenggaraan sendiri ataupun melalui pelaksanaan fungsi pengaturan. Mengenai peranan serta fungsi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional di Indonesia, Landasannya sudah terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Di sini dikemukakan petikannya :

Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan mengenai peranan pemerintah dalam pembangunan dan khususnya dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini dikemukakan apa yang dewasa ini dijadikan

landasan bagi peranan pemerintah itu dalam pembangunan ekonomi.

Peranan tersebut tak dapat dilepaskan dari sendi asas demokrasi ekonomi seperti tercantum dalam UUD. Landasan bagi peranan pemerintah dalam demokrasi ekonomi dan pembangunan dewasa ini dirumuskan pertama kali dalam ketetapan MPRS Nomor XXII Tahun 1966 yang berbunyi :

"Dalam menjalankan peranannya di bidang ekonomi maka pemerintah harus lebih menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

Diusahakan suatu pembinaan sistem ekonomi pasar yang berencana. Peranan pemerintah ditujukan terutama dalam dua bidang yaitu memberi pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat sendiri.

Rencana-rencana pembangunan dipakai sebagai alat pengarahan.

Dalam ketetapan MPR No. IV Tahun 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara di kemukakan sebagai berikut :

"Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha;

Sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Pembangunan Nasional secara berencana dapat dilihat dalam tingkat-tingkat tindakan yang dilaksanakan dalam proses politik dan proses administrasi.

Tingkat-tingkat kegiatan tersebut dilaksanakan secara terus menerus dan merupakan satu proses, yaitu :

1) Adanya kegiatan-kegiatan dasar di dalam masyarakat yang menuntut pemuasan.

Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini adalah kebutuhan

dasar yang dirasakan *(felt needs)* dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang diperlukan karena kondisi objektif (*real needs*).

Demikian pula berperan di sini sistem preferensi dari elite kekuasaan. Konsiliasi dari berbagai sumber-sumber keinginan ini tercermin dalam kehidupannya. Ada pula pendapat bahwa dalam diri manusia itu sendiri terdapat keinginan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Semua itu menjadi dorongan bagi suatu kebutuhan untuk membangun.

Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat konseptualisasi (*conceptualization**)***.

2) Perumusan konsiliasi tersebut pada no. 1 dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak-kehendak negara.

Dalam keputusan politik ini diterapkan apa yang hendak di bangun dan dasar-dasar dari cara pencapaiannya. Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat formulasi keputusan politik (*Formulation Of Political Decision*).

3) Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik tersebut terdahulu. Hal ini penting bagi suatu negara hukum.

Dengan ini dimaksud supaya kegiatan-kegiatan lanjutan tetap dilaksanakan berdasar kerangka hukum yang ada (*legal contexc*).

Tingkat ini disebut sebagai tingkat legalisasi *(legalization*).

4) Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan politik.

Kebijaksanaan dan program tersebut dapat dituangkan dalam suatu rencana kebijaksanaan dan program yang konsisten.

Tingkat ini adalah tingkat formulasi keputusan administrative **(***Formulation Of Policies and plans).*

5) Penyusunan program-program kerja, sistem dan mekanisme

pelaksanaan. > *Tingkat ini disebut sebagai Programming.*

6) Kemudian adalah tingkat Implementasi.

Dalam tingkat ini dimaksudkan untuk merealisasi pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program-program pemerintah yang konsisten berdasar keputusan-keputusan politik (***implementation)*.**

7) Penilaian pada pelaksanaan maupun dari hasil-hasil yang dicapai **(*Concuerent Evaluation, Evaluation Of Results*).**

Perencanaan dan Administrasi Pembangunan.

Proses pembangunan nasional secara berencana seperti di kemukakan di atas, tidak selalu harus menggunakan suatu rencana formil. Apabila suatu pemerintah menciptakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan, program atau bahkan proyek-proyek yang saling berhubungan dan cukup konsisten mungkin dapat terselenggara suatu proses pertumbuhan yang berencana.

Apa lagi bila di dalam masyarakat itu sendiri tumbuh kekuatan-kekuatan yang mendukung iklim pertumbuhan tersebut. Bahkan lebih penting dari pada rencana formil adalah adanya stabilitas sosial yang memungkinkan gerak pertumbuhan dalam masyarakat tidak terganggu.

Di dalam praktek dan ilmu perencanaan mengatakan bahwa proses perencanaan itu sendiri harus terdiri dari formulasi rencana dan implementasinya. Dan dalam administrasi pembangunan maka perencanaan merupakan awal mula dari suatu proses administrasi.

Penekanan mengenai kaitan antara perencanaan dan administrasi pembangunan itu justru karena terdapatnya kenyataan adanya "gap" antara janjinya rencana dan realisasi pelaksanaan rencana (*gap between plan promise and plan performance)*. Dan ini disebabkan oleh karena :

1) Kemampuan sistem administrasi untuk pelaksanaan yang efektif

dari suatu pembangunan berencana.

2) Sering kali usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan.

Dalam perubahan-perubahan sosial yang dikembangkan secara sadar menuju ke arah keadaan yang dianggap lebih baik oleh sesuatu masyarakat bangsa tertentu di kemudian hari, maka perlulah perencanaan itu mempunyai dimensi-dimensi yang operasional :

1) Berorientasi untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan dapat bersifat ekonomi, politik, sosial, bahkan tujuan-tujuan ideologis atau seringkali suatu kombinasi dari pada berbagai hal tersebut.

2) Berorientasi kepada pelaksanaannya.

Perencanaan bukan hanya merumuskan tujuan-tujuan tetapi diarahkan untuk merealisasinya.

3) Pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih diinginkan.

4) Perspektif waktu.

Pencapaian tujuan-tujuan tertentu mungkin perlu dilaksanakan secara bertahap.

5) Perencanaan harus merupakan suatu kegiatan *continue* dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya.

Mengenai ciri-ciri perencanaan yang lebih berorientasi kepada pelaksanaan dapat dikemukakan perkembangan-perkembangan sebagai berikut :

1) Penggunaan “Rolling Plans” yaitu rencana-rencana yang pada tiap akhir suatu periode pelaksanaan disusun kembali tujuan, sasaran-sasaran dan program-programnya.

Dengan demikian rencana diharapkan lebih fleksibel dan

sesuai dengan perkembangan keadaan yang dihadapi. Kecuali itu perhitungkan mengenai potensi sumber-sumber yang dapat dipergunakan diharapkan juga tidak terlalu jauh meleset.

2) Penyusunan dan pelaksanaan dari perencanaan operasional tahunan. Rencana ini dimaksudkan sebagai penerjemahan yang lebih konkrit dan spesifik dari pada rencana-rencana jangka menengah.
3) Kaitan yang erat antara perencanaan fisik dalam berbagai program-program dan proyek-proyek kegiatan dengan perencanaan pembiayaannya.
4) Perencanaan pada unit-unit kegiatan pemerintahan yang pada umumnya dituangkan dalam program-program dan proyek-proyek pembangunan. Perencanaan tingkat proyek-proyek ini akan lebih bersifat operasional.
5) Desain perencanaan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan administrasi negara, sehingga dapat dijadikan program pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan ***(****Development Function****)*** dari pada pemerintah.

Dengan melihat kelemahan-kelemahan di bidang administrasi, maka penyempurnaan administrasi negara untuk pelaksanaan pembangunan terutama ditujukan beberapa wilayah sebagai berikut : (terutama seperti dihadapi oleh negara-negara baru berkembang)

1) Perlu dilakukan penyempurnaan di dalam penyusunan dan hubungan perkembangan yang berfungsi dalam bidang penyempurnaan administrasi negara.
2) Wilayah utama yang kedua adalah mengenai pembinaan dan perencanaan kepegawaian. Dalam hal ini maka yang utama adalah perubahan orientasi dari pada kemampuan dalam melayani tugas-tugas rutin dengan meluasnya tugas-tugas pembangunan dari pada pemerintahan.

3) Wilayah besar lain adalah masalah pembinaan dan penyempurnaan organisasi untuk pembangunan. Di satu pihak seringkali di banyak negara-negara baru berkembang terjadi proliferasi (perluasan organisasi menjadi besar) yang disebabkan karena kecenderungan-kecenderungan "*Empire Building*" badan-badan pemerintahan. Hal ini menyebabkan banyak duplikasi dan kesimpangsiuran dan kemungkinan adanya unit-unit kegiatan yang tidak perlu. Oleh karena itu sering perlu dilakukan pengaturan kembali organisasi tersebut dengan mengusahakan atas dasar fungsionalisasi.
4) Wilayah lain dari pada perhatian penyempurnaan administrasi adalah penyempurnaan di bidang manajemen termasuk prosedur-prosedur kerja.
5) Partisipasi memperoleh perhatian pula dalam usaha penyempurnaan administrasi Negara menuju kepada administrasi pembangunan. Telah diusahakan bahwa tugas-tugas pembangunan tak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah saja. Diperlukan suatu usaha untuk melibatkan masyarakat secara bertingkat dalam kegiatan usaha pembangunan nasional.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan administrasi secara ekonomis ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Tiadanya motif untung dan kemungkinan pailit/bangkrut, maka ada kecenderungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibandingkan dengan suatu operasi swasta.
2) Sering masih terdapatnya paternalisme dan spoil politik maupun pribadi di dalam administrasi negara sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi.
3) Adanya gejala *"empire building"* yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil. Ini adalah manifestasi dari pada apa yang

disebut "*Parkinson Low".* Sering pula disebut "*Empire Building*" dari suatu badan pemerintahan tertentu bertumbuk dengan "*empire building*" badan pemerintahan lainnya sehingga menimbulkan perbenturan atau duplikasi. Hal ini juga menimbulkan kurangnya efisiensi.

4) Berkait dengan yang disebut di atas adalah berkembangnya prosedur-prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena hendak memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten. Ini dinamakan *"Red Tape*" yang dibarengi dengan sikap legalistis yang ketat dan secara salah paham disebut "*Birokratis"* oleh masyarakat awam.

C. Aspek -Aspek Yang Saling Mempengaruhi Administrasi Pembangunan

1. Aspek Politik

Pendekatan administrasi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Hubungan ini dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung.

Beberapa aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah :

a. Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdependensi antara sistem politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.
b. Komitmen dari pada elite kekuasaan atau elite pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
c. Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik.

d. Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan.
e. Hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta antara kaum politik dan birokrasi.
f. Hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di luar negeri yang sering kali merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

2. Aspek Ekonomi

Terdapat hubungan yang erat antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan atau pembinaan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi.

Pertumbuhan ekonomi akan dapat berhasil tidak hanya dari kegiatan-kegiatan atau program-program ekonomi saja, tetapi hubungan timbal balik kebijaksanaan politik, sosial dan lain-lain yang konsisten.

Administrasi pembangunan dalam hal ini dapat mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Aspek ekonomi lain yang penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis.

3. Aspek Sosial – Budaya

Aspek-aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah :

a. Hambatan-hambatan kultural apakah yang sesuai dengan basis kultural tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan.
b. Motivasi apakah yang diperlukan untuk pembaharuan atau

pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan.

c. Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembaharuan.
d. Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

Sebagai hambatan-hambatan kultural dapat dikemukakan adanya tradisi-tradisi tertentu, termasuk tradisi religius (ini bukan berarti agama).

Dalam hal ini termasuk pula ciri-ciri dan nilai-nilai manusia atau masyarakat tradisional dan usaha-usaha perubahan terhadap ciri, nilai manusia dan bahkan sikap-sikap hidup masyarakat yang bersifat tradisional dan tidak menunjang pembangunan.

Menurut Dr. Sudjatmoko, ciri-ciri dan nilai-nilai manusia atau masyarakat tradisional dan usaha-usaha perubahan terhadap ciri-ciri manusia dan masyarakat modern adalah :

a. Masyarakat Tradisional.
   Terikat pada tempat asal
   1. orientasi "status"
   2. hubungan pribadi
   3. legalistic primordial (agama, golongan, suku, keluarga)
   4. organisasi kecil-kecil (frekturisasi), keluarga, ikatan bersifat pribadi.
   5. Bergantung pada nasib
   6. Hubungan dengan alam; penyesuaian
   7. Terhadap kekuasaan : hierarkis
   8. Kebudayaan ekspresif

b. Masyarakat Modern
   1. Mobilitas

2. Orientasi hasil prestasi (*achivement*)
3. Hubungan non pribadi; atas dasar masalah
4. Loyalitas pelingkup (Negara, kedinasan, profesi)
5. Organisasi non pribadi; ikatan kepentingan, atau orientasi tujuan
6. Organisasi besar
7. Orientasi terhadap hari depan
8. Persoalan yang ditimbulkan manusia dapat diatasi oleh manusia
9. Hubungan dengan alam; menguasai/mengatur
10. Kebudayaan progresif

Lima kelompok elite yang mempunyai pengaruh terhadap usaha pembaharuan adalah :

1. Elite Dinasti
2. Golongan menengah
3. Kaum intelektual revolusioner
4. Administrator colonial
5. Para pemimpin / pimpinan nasional

Kemudian menurut S.P. Siagian, klasifikasi mengenai golongan elite di dalam masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap usaha pembaharuan sebagai berikut :

1. Elite politik
2. Elite administrative
3. Elite cendekiawan
4. Elite dunia usaha
5. Elite militer
6. Elite pembinaan pendapat umum (*informed, observer*)

4. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik

Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Administrasi pembangunan perlu membantu sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi.

Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam *(resources development*), pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan mengubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.

Masalah lingkungan hidup yang utama bagi negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan.

5. Aspek Institusional

Aspek institusional berkaitan erat dengan aspek-aspek yang telah diuraikan di atas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusional yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain.

Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi-institusi di dalam masyarakat yang

baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi-institusi di dalam masyarakat yang lama.

Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusional ini adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan.

Dalam proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh dirasakan penting sekali peranannya organisasi-organisasi tertentu yang mampu mengintro, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan-pembaharuan sosial maupun fisik.

6. Birokrasi

Pertama perlu diberikan penjelasan terhadap adanya kesalahpahaman umum bahwa birokrasi itu jelek yaitu birokrasi itu diartikan jika seseorang ingin mendapatkan informasi tertentu dikirim dari pejabat satu kepada pejabat yang lain tanpa mendapatkan informasi yang diinginkan.

Demikian pula keharusan pengisian formulir-formulir, sehingga birokrasi malahan dihubungkan dengan kemacetan-kemacetan administrasi atau tidak adanya efisiensi. Pada hal pengertian birokrasi yang sebenarnya bukan itu.

Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang**.**

Ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya menurut "**Weber"** sebagai berikut :

a. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlakukan untuk mencapai

tujuan-tujuan organisasi dibagi di dalam cara yang tertentu sebagai tugas-tugas jabatan.

b. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarki, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari pada jabatan yang lebih atas.
c. Operasi-operasi atau pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu sistem peraturan yang konsisten dan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan ini terhadap kejadian atau kasus-kasus tertentu.
d. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat "formalistic impersonality" (formil non pribadi), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati.
e. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang.
f. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari penglihatan teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi.

7. Institusi Otonom dan Perusahaan Negara

Macam-macam Institusi Otonom

Pemerintah di banyak negara membentuk berbagai badan-badan yang dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai otonomi operasional tertentu.

Badan-badan ini masih dapat dianggap dalam lingkungan pemerintahan dan dipergunakan sebagai alat pemerintahan.

Namun demikian badan-badan tersebut tidak termasuk dalam hierarki formil dari badan-badan pemerintahan.

Macam dari institusi otonom ini berbagai ragam bentuknya. Yang paling umum adalah bentuk Perusahaan Negara, Lembaga-lembaga dan Yayasan-yayasan yang sponsornya adalah pemerintah.

Bentuk perusahaan-perusahaan negara sendiri berbagai macam.

Bermacam-macam lembaga dibentuk oleh pemerintah terutama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, informasi dan lain-lain.

Dalam hal ini universitas-universitas di berbagai Negara dikategorikan sebagai suatu institusi otonom.

Dalam bidang ini misalnya terdapat lembaga-lembaga penelitian bidang tertentu, lembaga informasi pemasaran, lembaga pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lain-lain.

Dalam kenyataannya, institusi-institusi otonom atau yang juga disebut badan-badan non tradisional inilah yang paling penting sebagai alat organisasi dalam administrasi pembangunan.

8. Klasifikasi Perusahaan-Perusahaan Negara

Mengenai perusahaan negara, klasifikasi dapat diberikan menurut :

a. Tujuan usaha, yaitu perusahaan-perusahaan negara yang didirikan karena harus menyelenggarakan kegiatan yang vital atau memiliki hajat hidup rakyat banyak suatu negara.
b. Perusahaan-perusahaan negara yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang tertentu yang pada umumnya tidak begitu menguntungkan bagi sektor swasta. Misalnya mengenai penyediaan air minum, transport, dan lain-lain.
c. Dimana kegiatan tersebut belum ada kesediaan sektor swasta yang memasukinya.
d. Perusahaan-perusahaan negara yang dibentuk sebagai badan untuk membina dan menggairahkan sektor ekonomi, sektor swasta atau sektor masyarakat tertentu.
e. Perusahaan-perusahaan negara yang dibentuk karena pemerintah memang ingin menguasai dan memiliki sektor kegiatan ekonomi tertentu (yang menguntungkan). Hal ini sering didasarkan pula karena sistem pemerintahan yang statis.

Empat macam klasifikasi bentuk-bentuk organisasi perusahaan negara yang terlihat perbedaannya di dalam tingkat hubungan seberapa jauh otonomi operasional diberikan atau seberapa jauh pengawasan pemerintah terhadap kebijaksanaan perusahaan berlaku, yaitu :

a. Kelompok pertama adalah perusahaan-perusahaan jawatan.

Pada umumnya perusahaan ini dipergunakan untuk administrasi penyelenggaraan bagi pelayanan-pelayanan jasa monopoli secara nasional seperti : pos, telepon dan telegraf, kereta api, pegadaian, pelabuhan, dan lain-lain.

Pengawasan sepenuhnya dari pemerintah dan sedikit operasi otonomi.

b. Kelompok kedua adalah bentuk Perusahaan Negara (***Public Comporation***).

Perusahaan-perusahaan bentuk ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Tetapi dibentuk dengan suatu peraturan khusus yang merumuskan wewenang, tugas, bentuk manajemen dan hubungan departemen pemerintah.

c. Kelompok ketiga adalah perusahaan yang tunduk kepada perundang-undangan perusahaan umum (swasta dari negara bersangkutan), tetapi dimana pemerintah mempunyai kepentingan melalui pemilikan dari sebagian atau seluruh modal.

Dalam bidang ini termasuk perusahaan-perusahaan yang seluruh modalnya milik pemerintah ataupun perusahaan campuran antara pemerintah dan swasta.

d. Kelompok keempat dari bentuk perusahaan negara adalah

seperti yang disebutkan oleh Hanson, perusahaan ini disebut "*The Operating Contract*"

Di sini pemerintah memasuki suatu kontrak dengan perusahaan swasta tertentu untuk melaksanakan manajemen terhadap suatu perusahaan negara atau perusahaan milik negara. Kemudian pemerintah akan membayar kontrak manajemen tersebut. Misalnya manajemen suatu hotel besar yang dimiliki oleh pemerintah.

9. Peranan Perusahaan Negara dalam Pembangunan

Pembentukan perusahaan-perusahaan negara di dalam suatu negara tertentu didasarkan kepada peranan pemerintah yang ingin dilakukan dalam pembangunan dan cara melaksanakan pemerintahan tersebut.

Negara-negara tertentu yang memberikan kebebasan yang besar kepada swasta dan usaha milik pribadi tentu akan kurang menggunakan pembentukan perusahaan-perusahaan negara.

Di sektor-sektor yang bersifat strategis, memerlukan pembiayaan yang besar, penyediaan jasa-jasa pelayanan atau belum bersedianya sektor swasta masuk, pemerintah dapat berperan sebagai entrepreneur.

Ada beberapa sektor tertentu dimana pemerintah paling sedikit pada prinsipnya memasuki dengan pembentukan perusahaan-perusahaan negara secara sementara, untuk kemudian secara berangsur dialihkan kepada sektor swasta. Dan ada pula perusahaan-perusahaan negara yang sebenarnya dibentuk untuk dapat membina sektor swasta atau sektor ekonomi masyarakat.

10. Perbedaan Koperasi dengan Usaha Swasta dan Usaha Milik Negara

Perbedaan Koperasi dengan Usaha Swasta dan Usaha Milik Negara dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut ;

Perbedaan Koperasi dengan Usaha Swasta dan Usaha Milik Negara

No	Segi-Segi Yang Dibandingkan	Sektor Swasta				
		Swasta			Koperasi	Badan Usaha Milik Negara (Persero)
		Perorangan (Individual)	Persekutuan	Perseroan Terbatas		
1.	Siapa Pengguna Jasanya?	Bukan Pemilik Pelanggan	Umumnya bukan Pemilik	Umumnya bukan Pemilik Pelanggan	Terutama Anggota	Umum/ Anggota Masyarakat
2.	Siapa Pemilik Usahanya?	Perorangan	Pelanggan	Pemegang Saham	Para Anggota	Pemegang Saham
3.	Siapa yang Mempunyai Hak	Tidak Diperlukan	Para Sekutu Usaha	Pemegang Saham Biasa (*Common Stackholders*)	Para Anggota	Pemegang Saham

4.	Suara? Bagaimana Voting Itu Dilakukan?	Tidak Diperlukan	Para Sekutu Usaha Biasanya Menurut Besarnya Modal Penyertaan Sekutu Usaha	Menurut Besarnya Modal Yang Dimilikinya. Dilakukan Sebelum RUPS.	Satu Anggota Satu Suara Pd. Rapat Anggota Dan tidak Boleh Diwakilkan Pengurus	Berdasarkan Jumlah Saham yang Dimilikinya
5.	Siapa Yang Menentukan Kebijaksa-naan Perusa-haan?	Orang yang Bersangkutan	Para Sekutu Usaha	Direksi	Dalam Hal-Hal Tertentu Memerlukan Pengesahan dari Rapat Anggota	Direksi
6.	Apakah Balas Jasa Atas Modal Itu Terbatas?	Tidak	Tidak		Ya, Maksimun 8% Anggota Sesuai Dg Jasa/	Tidak

7.	Siapa yang Akan Menerima Hasil Dr Usaha Tsb? (Pendapatan)	Orang Yang Bersangkutan	Para Sekutu Usaha Proportional dengan Jasa Mereka Dalam Usaha Tsb			Pemegang Saham
8.	Siapa yang Bertanggung Jawab terhadap Kerugian Usaha?	Pemilik yang Bersangkutan	Para Sekutu Usaha	Tidak Para Pemegang Saham Proportional Dg. Jumlah Saham yang Dimilikinya Pemegang Saham Atas Sejumlah Saham Yang Dimilikinya	Partisipasinya Anggota, Atas Modal Equite (Simpanan Pokok & Wajib)	Pemegang Saham

11. Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sasaran Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah untuk menjamin suatu bangsa dan negara dapat :

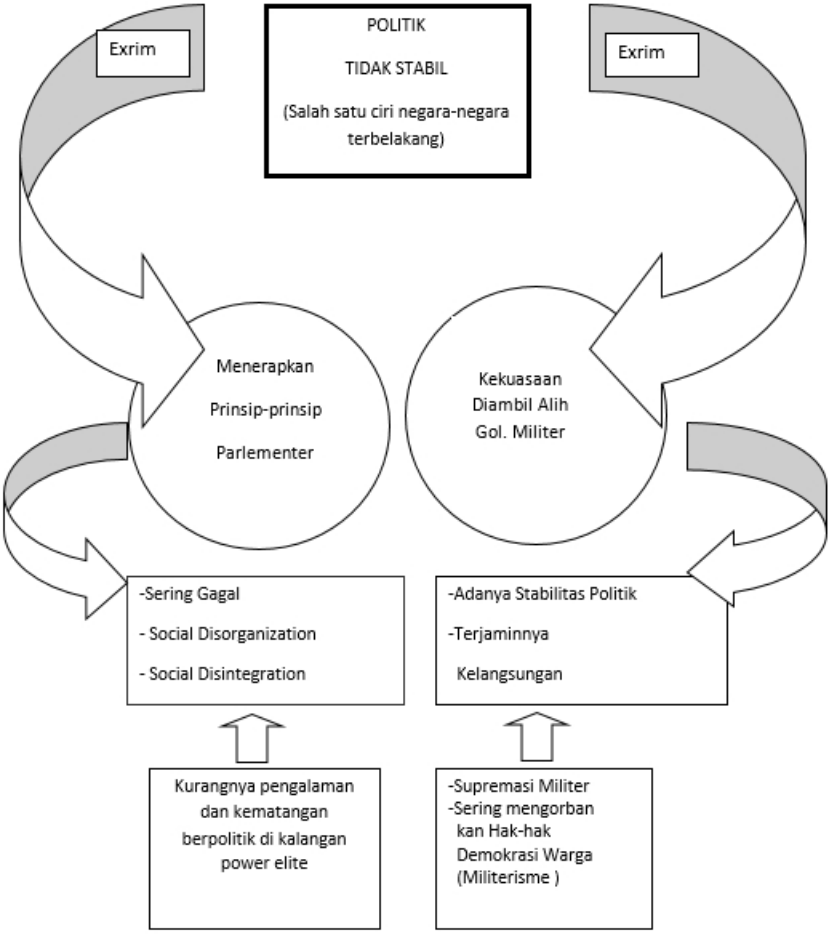
a. Menjamin integritas bangsa dan negara;
b. Menangkis serangan dari luar wilayah kekuasaannya;
c. Memadamkan pemberontakan yang mungkin timbul di dalam negeri;
d. Mematahkan usaha subversi dan infiltrasi yang mungkin dipergunakan oleh musuh negara yang berada di dalam negeri;
e. Yang kesemuanya dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup negara sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat.

Faktor-faktor sosial yang harus diperhitungkan dalam mengembangkan dan membina suatu ketahanan nasional yang tangguh antara lain :

a. Faktor Geografis (termasuk faktor Iklim)
b. Faktor Penduduk
c. Faktor Kekayaan Alam
d. Faktor Ideologi
e. Faktor Politik
f. Faktor Ekonomi
g. Faktor Sosial Budaya, dan
h. Faktor Kekuatan Militer.

Pembangunan Politik

Dalam Rangka Pembangunan Nasional



Tahap-Tahap Pertumbuhan Politik Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Pertama : Menciptakan Stabilitas Politik.

Stabilitas politik tidak boleh dijadikan tujuan pembangunan di bidang politik, melainkan sebagai landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

Kedua : Penyusunan kembali struktur-struktur organisasi politik (*restructuring of political organization*).

Sering jumlah partai politik di negara-negara terbelakang itu adalah berkelebihan, maka dilakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga jumlah partai-partai politik itu semakin lama semakin disederhanakan.

Ketiga : Political Take Off, yaitu dimulainya usaha-usaha oleh partai-partai politik yang telah disederhanakan dan dimatangkan itu untuk turut serta secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang, terutama di bidang mereka sendiri yaitu bidang politik.

12. Hubungan pembangunan dan kemiskinan di Indonesia

Dalam pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah utama dan sangat berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain pemerintah, swasta juga punya andil dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara terutama peran swasta yaitu dengan investasi dan membuka lapangan kerja sehingga masalah kemiskinan diharapkan bisa diatasi dengan mengurangi tingkat pengangguran. Anggaran pemerintah sangat

berpengaruh pada kondisi perekonomian. Anggaran pemerintah dapat berpengaruh pada tingkat output. Pengaruhnya tergantung pada pengaruh anggaran terhadap sektor swasta.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Robert W. Fogel mengatakan bahwa antara sepertiga dari pertumbuhan ekonomi Inggris dalam 200 tahun terakhir dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi makanan populasinya. Eksistensi dampak dari kemiskinan pada pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang mirip juga telah diverifikasi dalam periode waktu dan negara yang berbeda,

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.

Istilah kemiskinan sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan kita. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan ditinjau dari segi materi (ekonomi). Dari kegagalan dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara berarti, maka para ahli kemudian bergeser dari penciptaan lapangan kerja yang memadai, penghapusan kemiskinan, dan akhirnya penyediaan barang-barang dan jasa kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk.

Jumlah aset yang dimiliki sebelumnya (*initial assets*) merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemilikan aset yang lebih baik, individu

atau kelompok masyarakat tertentu akan memiliki peluang yang lebih baik dan kemudahan yang lebih banyak dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya hasil pembangunan dapat berkontribusi pada pembentukan aset yang lebih baik. Kenyataan inilah yang melatarbelakangi munculnya problema lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

a. Pengertian Kemiskinan

Kata miskin diartikan tidak berharta atau serba kekurangan. Sedangkan fakir diartikan orang yang sangat kekurangan atau sangat miskin. Akan tetapi kedua kata miskin dan fakir telah menjadi satu istilah yang baku yaitu fakir miskin sebagai suatu istilah yang makna sama yaitu kondisi yang serba kekurangan materi.

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain. (Emil Salim, 1982). Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur.

b. Garis kemiskinan

Yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh tiga hal:

1) Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan
2) Posisi manusia dalam lingkungan sekitar
3) Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi.

Kesemuanya dapat tersimpul dalam barang dan jasa serta tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi penetapan

pendapatan minimal yang diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimal.

Orang-orang miskin umumnya tidak memiliki aset yang baik dan kemampuan mereka sangat terbatas. Meskipun sumber daya di sekitar mereka kadangkala melimpah, tapi penguasaan mereka terhadap sumberdaya tersebut sangat terbatas. Konsekuensinya, dalam upaya dan aktivitas pembangunan yang mereka laksanakan mereka menjadi jauh tertinggal, dibandingkan kelompok masyarakat lain yang mempunyai kemampuan, aset dan penguasaan sumberdaya yang lebih baik. Kondisi ini terus berlanjut berjalan ke arah pelebaran gap kaya miskin, karena yang kaya akan semakin kaya karena hasil pembangunan mereka lebih baik, sementara yang miskin akan semakin tertinggal karena pembangunan yang dijalankannya berjalan jauh lebih lambat.

c. Upaya Mengatasi Kemiskinan

Beberapa faktor kemiskinan diantaranya pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Factor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

d. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107) sebagai berikut:

1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber

daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3) Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses modal.

Dari hasil-hasil penelitian kemudian pusat perhatian para ahli lambat laun mulai bergeser dari tekanan pada penciptaan lapangan kerja yang memadai ke penghapusan kemiskinan, dan akhirnya ke penyediaan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk, yang berupa dua perangkat, yaitu:

1) Perangkap kebutuhan konsumsi perorangan akan pangan, sandang, dan pemukiman.
2) Perangkap yang mencakup penyediaan jasa umum dasar, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.

Di samping kedua perangkat tersebut ,kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar manusiawi kadang-kadang juga digunakan untuk mencakup tiga sasaran lain, yaitu

a. Hak atas pekerjaan produktif dan yang memberikan imbalan yang layak, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap rumah tangga atau perorangan.
b. Prasarana yang mampu menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.
c. Partisipasi seluruh penduduk ,baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan proyek-proyek yang berhubungan dengan penyediaan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar.

d. Indikator pengukuran keberhasilan pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan per kapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Di samping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut :

a. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro-ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

b. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.

Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

c. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

d. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

e. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Qualty of life Index* (PQLI) digunakan untuk

mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga.

f. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Kemiskinan sering diidentifikasikan dengan kekurangan terutama kekurangan bahan pokok seperti pangan, kesehatan,

sandang, papan, dan sebagiannya. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, sehingga ia mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya (Siswanto, 1998). Kemiskinan bagaikan penyakit yang diberantas. Namun upaya memberantas tidak selalu membawa hasil karena masalah memang kompleks.

Untuk mengatasi kemiskinan, paling tidak harus dilihat dari konteks masalahnya. Kemiskinan timbul dari berbagai faktor yang setiap faktornya memerlukan penanganan khusus.

13. Administrasi bagi Pembangunan Nasional

Masyarakat bangsa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat peralihan, dan masyarakat maju. Masyarakat di negara berkembang merupakan masyarakat peralihan yang sedang berusaha mengembangkan dirinya dari masyarakat tradisional dengan ekonomi terbelakang, menuju ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini masyarakat negara berkembang berada dalam usaha perubahan sosial yang besar dan umumnya ditekankan pada pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan serta pembaharuan dalam bidang kehidupan di masyarakat.

Hal terpenting dalam proses pembangunan nasional adalah terselenggaranya perubahan-perubahan dalam keadaan yang stabil dinamis. Untuk dapat mewujudkan perubahan-perubahan tersebut diperlukan perencanaan. Perencanaan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Pembangunan nasional secara berencana dapat dilihat dari tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

a. Adanya keinginan dari masyarakat yang didasari dari kebutuhan dasar masyarakat.
b. Perumusan konsilisasi yang dilakukan dalam proses politik

dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak negara.

c. Perumusan dasar-dasar hokum bagi pelaksanaan keputusan politik.
d. Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik.
e. Penyusunan program-program kerja (*programming*).
f. Implementasi, dalam tingkat ini dimaksudkan untuk merealisasi pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan pemerintah berdasarkan keputusan politik.
g. Penilaian dari pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

Rencana dan realisasi pelaksanaan rencana sering kali tidak sejalan, ini disebabkan oleh karena kemampuan sistem administrasi untuk pelaksanaan pembangunan berencana yang efektif tidak mendapat perhatian. Serta seringkali usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara terpisah dari perencanaan pembangunan. Perencanaan perlu dimensi-dimensi yang operasional, diantaranya berorientasi untuk mencapai suatu tujuan, berorientasi kepada pelaksanaannya, pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih diinginkan, perspektif waktu, serta perencanaan harus merupakan suatu kegiatan yang rutin dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya. Ciri-ciri perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Penggunaan *rolling plants* yaitu rencana-rencana yang setiap akhir periode pelaksanaan disusun kembali tujuan, sasaran, dan program-programnya.
b. Penyusunan dan pelaksanaan dari perencanaan operasional tahunan.
c. Kaitan antara perencanaan fisik dalam berbagai program dan

proyek kegiatan dengan perencanaan pembiayaan.

d. Perencanaan pada unit kegiatan pemerintah yang dituangkan dalam program dan proyek pembangunan.
e. Desain perencanaan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan administrasi negara, sehingga dapat dijadikan prasarana pelaksanaan fungsi-fungsi pembangunan pemerintah.

Salah satu hambatan pokok terhadap kemampuan administrasi negara untuk mendukung tugas-tugas baru dalam pelaksanaan pembangunan adalah karena seringkali birokrasi pemerintah itu sendiri sebagai produk dari pada lingkungannya masih terbelakang. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh, dan pendekatan secara sebagian-sebagian.

Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan pertimbangan ekonomis menjadi pertimbangan yang amat penting. Dilihat dari kelemahan-kelemahan di bidang administrasi, maka penyempurnaan administrasi negara untuk pelaksanaan pembangunan di beberapa wilayah terutama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti (Asia) memiliki beberapa hal yang dihadapi diantaranya, sebagai berikut.

a. Perlu dilakukan penyempurnaan di dalam penyusunan dan hubungan perlembagaan yang berfungsi dalam bidang penyempurnaan administrasi negara.
b. Mengenai pembinaan dan perencanaan kepegawaian, perubahan orientasi pada kemampuan untuk melayani tugas-tugas rutin pembangunan.
c. Masalah pembinaan dan penyempurnaan organisasi untuk pembangunan.
d. Penyempurnaan di bidang manajemen termasuk prosedur-

prosedur kerja.

e. Partisipasi dan perhatian terhadap usaha penyempurnaan administrasi negara menuju administrasi pembangunan.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan administrasi secara ekonomis, dapat dikemukakan beberapa hal:

a. Tiadanya motif untung dan kemungkinan pailit/bangkrut maka ada kecenderungan suatu operasi pemerintah kurang efisien dibandingkan dengan suatu operasi swasta.
b. Masih seringnya terdapat paternalisme dan spoil politik maupun pribadi di dalam administrasi negara sehingga hal ini menyulitkan pembinaan efisien.
c. Adanya gejala *empire building* yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi.
d. Berkembangnya prosedur-prosedur yang berbelit-belit dan panjang karena hendak memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten.

14. Implementasi Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 54 Tahun 2010 antara lain:

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Pendekatan politis bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) yaitu bahwa rencana pembangunan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pada saat ini, era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui diberlakukannya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia

berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), eksploitasi SDA. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah dan lokal.

Sehingga saat ini pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Diharapkan dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Idealnya ini menjadi dasar pergeseran orientasi pemerintah, yang awalnya *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membangun daerahnya melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakatnya, karena pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah mengandung tiga misi utama, yaitu : Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah (secara ekonomi) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (secara sosial) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan daerah (secara politik dan budaya).

Upaya pemerataan pembangunan dengan diterapkan nya otonomi daerah hingga saat ini dirasa belum signifikan untuk mempercepat pembangunan daerah dan kemandirian ekonomi daerah, bahkan melahirkan beberapa dampak negatif seperti :

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya malah menjadi ajang mencari untung bagi segelintir pejabat di daerah, terutama di daerah tertentu yang memiliki SDA melimpah seperti Kalimantan dan Papua. Dimana seperti yang diketahui kedua daerah tersebut mempunyai SDA yang melimpah namun pembangunan sangat minim dan kerusakan lingkungan terjadi sangat parah akibat dari keegoisan dari pejabat di daerah. Ada beberapa gejala negatif yang timbul akibat otonomi daerah, yaitu :

a. Berkembangnya sentimen primordial
b. Di beberapa daerah telah muncul semacam gerakan bersifat kesukuan yang mengarah pada keinginan untuk mendominasi seluruh posisi strategis di masyarakat maupun pemerintahan. Hal ini bisa dilihat seperti kejadian banyaknya pemekaran di Sumatera Utara yang didasari pada pembagian etnis pada daerah tertentu atau karena persaingan antar etnis tertentu. Kasus lain adalah adanya konflik berdarah di Sampit antara suku madura dan suku dayak.
c. Berkembangnya proses KKN

Dengan tidak diberlakukannya lagi ketentuan mengenai proses pengambilan keputusan yang harus memperoleh persetujuan di Jakarta (tuntas di daerah), ada beberapa pihak yang memanfaatkannya untuk melakukan KKN, seperti :

a. Maraknya isu kasus *money* politik dalam proses pemilihan kepala daerah. Penopang dana pada kasus ini biasanya adalah para pelaku ekonomi yang kuat yang berharap memperoleh fasilitas bisnis setelah andalannya menang.
b. Proses pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural di daerah terkesan didasarkan "nepotisme" ketimbang menggunakan asas "meritokrasi"

1. Konflik antar daerah

Dengan ditetapkannya status daerah otonom secara penuh kepada Kabupaten dan Kota, ada kecenderungan masing-masing daerah untuk memproteksi seluruh potensi dan asset yang dimilikinya secara ketat untuk kepentingan masing-masing. Hal ini bisa menyebabkan kecemburuan antar daerah akibat dari terjadinya ketimpangan sosial ekonomi. Dengan ketentuan dana bagi hasil, daerah yang kaya akan SDA akan semakin kaya, dan daerah yang miskin SDA akan semakin terpuruk.

2. Eksploitasi SDA secara berlebihan

Dengan diberikannya keleluasaan kepada daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia di daerahnya, sementara beberapa daerah masih menggunakan paradigma lama bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segalanya dan merupakan faktor utama yang sangat menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah, mendorong daerah untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alamnya. Hal ini tentunya akan mengancam kelestarian lingkungan dan menimbulkan imbas sosial lainnya, apalagi jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), meskipun Pembangunan berkelanjutan bukanlah hal baru bagi masyarakat di dunia secara umum.

Gagasan pembangunan berkelanjutan sudah dimulai ketika Brundtland Comission merumuskan dan mendefinisikan istilah pembangunan berkelanjutan tersebut. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Pembangunan sebagai sebuah gagasan, prinsip dan konsep berkaitan dengan bagaimana diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial dan

aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang dipraktekkan oleh kebijakan-kebijakan daerah di Indonesia. Karena relasi praktek-praktek pembangunan berkelanjutan terkait juga relasinya dengan pemerintah.

Pembangunan mempunyai dampak negatif yang akan menyebabkan tercemarnya atau rusaknya lingkungan karena eksploitasi dan pemanfaatan yang berlebihan terhadap lingkungannya,

Menurut ahli lingkungan Emil Salim, konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri (landasan pokok) berikut:

1) Proses pembangunan mesti berkelanjutan, terus menerus, didukung sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang terus berkembang.
2) Sumber daya alam memiliki ambang batas sehingga pemanfaatannya akan menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungan.
3) Kualitas lingkungan berkorelasi/berhubungan dengan kualitas hidup.
4) Pola pembangunan sumber daya kini seharusnya menutup kemungkinan pilihan lain
5) Mengendalikan solidaritas transgenerasi sehingga peningkatan kesejahteraan generasi sekarang juga dapat dialami oleh generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia terbukti berisiko tinggi terhadap perusakan lingkungan, ekosistem dan berdampak pada pengeluaran besar negara atas efek yang ditimbulkan, seperti kebakaran lahan sawit di Riau, lumpur Sidoarjo yang bahkan secara ekonomi menurunkan reputasi dan komitmen pemerintah Indonesia di mata Internasional, walaupun secara regulasi bahwa untuk project-project pembangunan nasional di daerah sebagian

besar masih merupakan kewenangan pusat tetapi kewenangan yang diberikan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah juga melahirkan kerajaan-kerajaan atau kekuasaan-kekuasaan kecil baru yang tidak memperhatikan dan tidak berorientasi pada pembangunan nasional.

Pemerintah mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di daerah karena dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan, maka kebijakan pemerintah dalam menentukan otonomi daerah harus benar-benar dievaluasi penyelenggaraannya untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan guna mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang merata untuk rakyat Indonesia.

Namun demikian dalam perkembangannya terutama di Jawa Barat khususnya, bahwa laju ekonomi mengalami peningkatan di atas rata-rata nasional, Badan Pusat Statistik mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada Triwulan I 2015 melampaui nasional. "Nasional 4,71 persen, Jawa Barat 4,93 persen, penyumbang laju ekonomi yang paling dominan di Jawa Barat juga terdongkrak oleh pertumbuhan tinggi di lapangan usaha informasi dan komunikasi. Dan konsekuensi lain dari laju ekonomi di Jawa Barat diiringi pula dengan terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, dan pencari kerja. Februari 2015 tercatat jumlah angkatan kerja menembus 22,3 juta orang, meningkat lebih dari 1 juta orang, penduduk bekerja 20,45 juta orang naik 1 juta orang, serta jumlah pengangguran menjadi 1,875 juta orang setahun sebelumnya 1,843 juta orang.

Potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat ada pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), dimana jumlah penduduk Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia sehingga dapat menjadi potensi yang besar baik sebagai faktor produksi maupun sebagai pasar yang sangat potensial. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu

daerah yang memiliki keunggulan dan peran strategis baik dari sisi geografi maupun ekonomi. Dari sisi geografis, Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintah dan ekonomi nasional yang dijadikan sebagai pasar, pusat keuangan dan permodalan serta pengembangan teknologi. Sedangkan, dari sisi ekonomi, Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang ekonomi terbesar ketiga (14,30 persen) setelah Provinsi DKI Jakarta (16,32 persen) dan Jawa Timur (14,68 persen).

Akselerasi pembangunan ekonomi Jawa Barat memerlukan percepatan pertumbuhan investasi di segala sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai faktor-faktor pendukung, seperti tersedianya infrastruktur pendukung produksi dan distribusi barang yang memadai, terdapat jaminan pasokan bahan baku dan sumber energi pada harga kompetitif, tersedia sumber daya manusia yang andal, peningkatan penggunaan teknologi, serta peningkatan akses pada pembiayaan investasi dan peningkatan akses ke pasar domestik dan pasar ekspor.

Akselerasi pembangunan ekonomi Jawa Barat tersebut, dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Percepatan proses pengambilan keputusan pemerintah, mendorong peningkatan daya saing Kabupaten/Kota dan meningkatkan integrasi pasar domestik.

Namun jika mengerucut pada kondisi kota dan kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Garut masih dinyatakan daerah tertinggal dari 122 kabupaten di Indonesia yang mayoritas merupakan kabupaten di luar Pulau Jawa, pembangunan daerah yang masih tertinggal merupakan salah satu fokus dari pemerintah pusat. Idealnya diharapkan seluruh daerah memiliki pertumbuhan perekonomian yang merata sehingga menekan budaya urbanisasi sebagai efek tekanan ekonomi dan sosial.

Pemprov Jabar pun merancang berbagai program dan bantuan

untuk melepaskan Garut dari status daerah tertinggal. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah membangun jalan provinsi di Garut dan Sukabumi. Hal itu akan menjadi faktor utama yang mendorong kemajuan daerah. Pemprov juga akan mendorong pembuatan jalan tol serta jalur kereta api guna meningkatkan akses transaksi ekonomi di daerah tertinggal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralisasi (terpusat), sekarang mengarah kepada desentralisasi yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Dasar konseptual pembangunan daerah umumnya tidak dijelaskan secara eksplisit. Pengertiannya lebih bermakna praktis (utilitarian), dimana pembangunan daerah dianggap mampu secara efektif menghadapi permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan otonomi diyakini mampu merespons permasalahan aktual yang akan sering muncul dalam keadaan masih tingginya intensitas alokasi sumber daya alam dalam pembangunan. Otonomi dalam administrasi pembangunan ini dirasakan makin relevan sejalan dengan keragaman sosial dan ekologi (bio-social diversity) pada suatu wilayah.

Pengertian dan penerapan pembangunan daerah umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan nasional menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, sangat menentukan pengertian dari pembangunan daerah. Atas dasar alasan itulah pandangan terhadap pembangunan daerah dari setiap negara akan

sangat beragam. Singapura, Brunei, atau negara yang berukuran kecil sangat mungkin tidak mengenal istilah pembangunan daerah. Sebaliknya bagi negara besar, seperti Indonesia atau Amerika Serikat perlu menetapkan definisi-definisi pembangunan daerah yang rinci untuk mengimplementasikan pembangunannya.

Dasar hukum penyelenggaraan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 Bab VI pasal 18. Hingga saat ini, implementasi formal pasal tersebut terdiri tiga kali momentum penting, yaitu UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 22 Tahun 1999 serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum tahun 1974, bukan saja pembangunan daerah, pembangunan nasional juga diakui belum didefinisikan dan direncanakan secara baik. Implementasi pembangunan daerah berdasar UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, terbukti sangat mendukung keberhasilan pembangunan nasional hingga Pelita VI tetapi juga mampu secara langsung melegitimasi kepemimpinan Presiden Suharto. Sementara UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan UU No. 32 Tahun 2004 lebih merupakan koreksi-koreksi sistematis disebabkan oleh permasalahan struktural (sistemik) maupun dalam hal implementasi. Maka dari itu saya mencoba membuat suatu pemaparan mengenai pembangunan daerah dalam sebuah makalah yang berjudul "Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah".

D. Pembangunan Karakter Individu di Era Globalisasi

Karakter suatu masyarakat khususnya generasi muda adalah identitas masyarakat itu sendiri, yang diekspresikan dan dipancarkan dari kebudayaan masyarakat. Manusia harus dipandang sebagai subyek yang dapat berpikir, merancang kehidupan, dan memproduksi sesuatu. Peran negara hanya sebagai fasilitator jangan lagi mendominasi sebagai kekuasaan sentral.

Pada jaman sekarang perhatian anak muda hanya terpusat kepada pembangunan ekonomi dengan orientasi ke fisik. Dengan karakter demikian tak mengherankan apabila di kalangan anak muda tumbuh subur sifat-sifat materialisme, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berbagai jenis perilaku tidak terpuji lainnya. Karakter anak muda saat ini sudah abai dari pembangunan kemanusiaan. Sejak tahun 1974 Koentjaraningrat sebagai Bapak Antropologi Indonesia sudah mengingatkan kita jauh hari tentang pentingnya pembangunan karakter bangsa.

Di era globalisasi ini seorang individu harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Generasi muda dapat berperan menghadapi segala macam persaingan di era globalisasi, yang semakin ketat sekarang ini. Hendak ke mana generasi muda Indonesia ini dibawa? Sebuah pertanyaan yang harus segera dicari jawabannya. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas tentang pembangunan karakter individu di era globalisasi.

1. Tantangan Globalisasi

Globalisasi sesungguhnya sudah lama terjadi, yakni sejak abad 19, yaitu sejak adanya kontak dagang kerajaan-kerajaan di kepulauan Nusantara dengan para pedagang Eropa yang berujung pada penjajahan. Kemudian tingkat dan skala globalisasi juga kian pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta kemenangan kekuatan kapitalis atas kekuatan sosialis/komunis. Menilai negative, karena ketimpangan penguasaan sumber daya (terutama modal) serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpotensi untuk menguntungkan negara kuat dan merugikan negara lemah.

Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi

informasi.

Ketua DPR RI Agung Laksono berpendapat bahwa globalisasi sebenarnya netral, tergantung bagaimana kita mengartikannya. Ada yang menilai globalisasi sebagai sesuatu yang positif karena memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk bermain secara global. Namun ada pula yang menilai negatif, karena ketimpangan penguasaan sumber daya (terutama modal) serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpotensi untuk menguntungkan negara kuat dan merugikan negara lemah.

Gelombang globalisasi memasuki Dunia Ketiga tanpa mampu dibendung. Pasar bebas menjadi keniscayaan yang setiap saat bisa membinasakan siapapun yang tak mampu bertahan. Bagi masyarakat Dunia Ketiga, di manapun, ancaman itu kini bermetamorfosis menjadi badai garang yang siap menerkam. Tanpa kecuali.

Para petani akan terhisap tenaganya melalui perampasan nilai lebih yang semestinya dinikmati. Pada Dunia Ketiga akan mengulangi bentuk-bentuk kekejaman kapitalisme abad pertengahan. Di lain pihak, dahsyatnya industrialisasi pada Dunia Ketiga akan mengulangi bentuk-bentuk kekejaman kapitalisme abad pertengahan. Di mana kaum buruh dieksploitasi melalui cara-cara yang jauh di bawah standar kemanusiaan. Kejahatan menjadi ciri utama, dari bentuknya yang paling sederhana hingga dalam wujudnya yang tersamar dan berlindung di balik gagasan mengenai pembangunan. Aksi-reaksi berakhir di ujung puncaknya berupa kekerasan dan kegagalan menjawab berbagai soal kemiskinan dan kemanusiaan (Andrinof A. Chaniago: 2001).

Dengan segala keterbatasan, tentu saja dibutuhkan sebuah strategi pembangunan yang matang. Utamanya menyangkut peran dan fungsi negara dalam menyelamatkan kepentingan nasional. Satu di antaranya sebagaimana dirumuskan melalui postulat ideologis, yaitu asas kekeluargaan. Dan tentunya, siasat menyikapi

pihak asing dan kapitalisme transnasional, serta pelbagai implikasi ketergantungan yang sangat mungkin ditimbulkan dari hubungan yang tak seimbang.

2. Pengertian Globalisasi

Scholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan globalisasi:

a. *Internasionalisasi*: Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.
b. *Liberalisasi*: Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkan batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.
c. *Universalisasi*: Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.
d. *Westernisasi*: Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal.
e. *Hubungan transplanetari dan suprateritorialitas*: Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.

3. Pengertian Karakter

Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang

individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu.

Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.

Beberapa patah kalimat perihal karakter yang tertuang dalam buku Koentjaraningat, yang masih sangat relevan sebagai bahan perenungan. Karakter tersebut merupakan gambaran mentalitas generasi muda saat ini, yaitu :

1) Mentalitas yang meremehkan mutu.
2) Mentalitas suka menerabas.
3) Sifat tidak percaya kepada diri sendiri.
4) Sifat tidak berdisiplin murni.
5) Sifat tidak bertanggung jawab.

4. Karakteristik Individu

Marslow dan Gidson (1996:181) menggambarkan karakteristik individu yang didefinisikan sebagai orang yang beraktualisasi diri.

a. Kemampuan mempersepsi orang dan kejadian-kejadian dengan akurat.
b. Kemampuan melepas diri sendiri dari kekalutan malu.
c. Orientasi masalah tugas.
d. Kemampuan untuk memperoleh kepuasan pribadi dari pengembangan pribadi dalam melakukan sesuatu hal yang berharga.
e. Kapasitas untuk mencintai dan menjalani kehidupan dengan cara yang sangat mendalam.
f. Ketertarikan pada tujuan apa yang mereka sedang kerjakan

g. Kreativitas yang tinggi dalam bekerja.

Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Karakteristik individu dalam penulisan ini yaitu sikap.

a. Nilai

Menurut Woods, Nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Norma

Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan orang perorangan, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial.

c. Sikap (*attitude*)

Menurut Robbins (2003) sikap adalah pernyataan evaluatif-baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan-mengenai objek, orang, atau peristiwa. Dalam penelitian ini sikap akan difokuskan bagaimana seseorang merasakan atas pekerjaan, kelompok kerja, penyedia dan organisasi.

d. Perilaku

Menurut Drs. Leonard F. Polhaupessy, Psi. Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil.

5. Faktor-Faktor Pembentukan Karakter

Menurut Roucek dan Warren menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter seorang individu, yaitu:

a. Faktor biologis atau fisik, contohnya seorang yang mempunyai cacat fisik atau penampilannya kurang ideal, akan rendah

diri, pemalu, sukar bergaul, dan sebagainya sehingga akan mempengaruhi pembentukan karakternya.

b. Faktor psikologis atau kejiwaan. Factor psikologis yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter seorang individu antara lain unsure temperamen seperti agresivitas, pemarah, pemalu, hasrat atau keinginan, dan sebagainya. Selain itu keterampilan dan kemampuan belajar juga dapat mempengaruhi karakter seseorang.
c. Faktor sosiologis atau lingkungan, yaitu faktor yang membentuk karakter seseorang menjadi sesuai dengan perilaku atau karakter kelompok atau lingkungan masyarakatnya. Contohnya, orang yang lahir di daerah pedesaan cenderung memiliki karakter yang ramah, memiliki solidaritas dan kolektivitas yang tinggi, serta keterikatan dengan lingkungan alam yang kuat. Sebaliknya, orang yang dilahirkan di daerah perkotaan cenderung memiliki karakter masyarakat kota yang lebih individualitas, rasa solidaritas dan kolektivitas yang kurang, dan sebagainya.

Koentjaraningrat menganalisis bahwa pembentukan karakter seorang individu dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut ini :

a. Unsur pengetahuan, yaitu unsur yang bersumber dari pola pikir yang rasional. Bentuknya dapat berupa gambaran atau pandangan diri (persepsi) seorang individu tentang sesuatu hal, atau pengamatan terhadap suatu hal secara intensif dan terfokus, serta kreativitas untuk mengemukakan pendapat (konsep). Keseluruhan persepsi, pengamatan, dan konsep tersebut merupakan unsure-unsur pengetahuan yang dapat mempengaruhi karakter seorang individu.
b. Unsur perasaan, baik yang bersifat positif maupun negative terhadap suatu hal atau keadaan yang terjadi. Contohnya, bila terjadi penurunan produksi hasil pertanian, maka bagi para

penimbun dianggap sebagai pertanda baik (positif) untuk mencari keuntungan, sedangkan bagi para konsumen dianggap sebagai pertanda buruk (negatif) karena akan menimbulkan kenaikan harga produk-produk pertanian.

c. Unsur naluri atau dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah. Naluri atau dorongan semacam ini tidak semata-mata bersumber dari pengetahuan atau akal pikiran seorang individu, tetapi sudah terkandung secara kodrati. Contohnya, naluri untuk memenuhi kebutuhan pokok akan makanan dan minuman, naluri untuk memenuhi rasa aman dan damai.
d. Soerjono Soekanto seorang ahli sosiologi dari Indonesia juga mengemukakan bahwa secara sosiologis proses terbentuknya karakter seorang individu diperoleh melalui proses sosialisasi. Proses ini dimulai sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Melalui proses sosialisasi ini seorang individu mendapatkan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya atau masyarakatnya.

6. Media Penunjang Pembangunan Karakter

a. Keluarga

Keluarga merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi. Begitu seorang bayi dilahirkan, ia sudah berhubungan dengan kedua orangtuanya, kakak-kakaknya, dan mungkin dengan saudara-saudara dekatnya yang lain. Peran orangtua lebih dominan memberi perhatian kepada anak.

b. Pendidikan

Wahana pendidikan seperti tim pengajar dalam artian guru dilaksanakan secara terintegrasi. Pada pendidikan tingkat dasar, peran guru sangat besar dan bahkan dominant untuk mempengaruhi dan membentuk pola perilaku anak didik. Peran guru dalam

memberi motivasi dan mendorong keberhasilan studi anak sangat besar. Hal itu akan berpengaruh pada tahap pendidikan selanjutnya. Para guru sebagai wakil orang tua tidak hanya bertugas memberikan pengajaran tetapi juga bimbingan karier kepada para peserta didik. Anak dituntut untuk dapat menetapkan sendiri pilihan ke masa depan sesuai bakat dan kemampuannya.

c. Masyarakat

Pembentukan kepribadian dan wahana pengenalan serta pengimplementasian dari nilai dan norma.

d. Pemerintah

Sebuah wahana yang dapat memberi keteladanan pada masyarakat oleh para pelaksana fungsi pemerintahan.

e. Media massa

Media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar, majalah) maupun elektronik (radio, televise, dan film), merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Media massa diidentifikasikan sebagai media sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayaknya.

Ekonomi Rakyat dan Kemandirian

Semenjak gelombang krisis menerpa Indonesia, kegamangan menghinggapi seluruh lini kebijakan publik yang ditelurkan pemerintah. Tanda-tanda mengkhawatirkan menyergap dalam bentuk enggannya sebagian besar investor asing menanamkan modal di Indonesia. Termasuk juga di dalamnya bantuan setengah hati dari lembaga-lembaga donor seperti IMF maupun World Bank, yang memberi kesan kuat terjadinya boikot diam-diam dari masyarakat internasional (*international community*), khususnya Amerika, terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Habibie terdahulu. Ekonomi Indonesia diilustrasikan oleh Hal Hill sebagai *the strange and sudden death of a tiger*, harimau yang semula kuat namun

akhirnya mati secara mengejutkan.

Dampaknya yang paling terasa dihadapi oleh dunia industri yang banyak memanfaatkan komponen asing dalam pengelolaannya. Roda industri relatif macet dan bahkan berhenti total. Ada banyak pabrik berhenti beroperasi akibat pailit dan terhentinya bantuan lunak serta proteksi yang sebelumnya biasa diterima.

Bagi hampir sebagian besar Dunia Ketiga, industrialisasi memang menjadi persoalan yang tak pernah berujung untuk dibahas. Berbagai teori lahir dan berkembang untuk menjawab berbagai soal kemiskinan, pengangguran, kebebasan, dan soal-soal kemanusiaan lainnya. Belum lagi anak-anak yang harus menjadi korban dari kerasnya—untuk tidak mengatakan jahatnya—pembangunan. Padahal di pundak merekalah negeri ini pastinya akan diwariskan.

Dalam kegelisahan semacam itu, ada sejumlah fenomena yang justru menarik untuk dicermati. Yaitu, ketika roda perekonomian yang terpuruk dalam banyak pandangan analis ekonomi justru tidak terlalu memberikan dampak yang begitu berarti di sejumlah kawasan. Atau setidak-tidaknya, roda perekonomian berjalan tidak sepesimis prediksi sejumlah ekonom yang menggunakan pendekatan makro-deduktif. Yang tak jarang sampai pada kesimpulan yang terkesan dangkal, terburu-buru, dan terlampau berani.

Pada kenyataannya, globalisasi dan liberasi perdagangan di era sekarang adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari, di samping memang sama sekali tidak bijak untuk menolaknya. Indonesia, dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya, tak bisa menghindari diri dari kenyataan tersebut.

Untuk itu, sebuah strategi yang matang menghadapi persaingan pasar bebas mutlak diperlukan. Sebab bila tidak, Indonesia akan terus diterpa badai krisis panjang yang mengimplikasikan kebangkrutan Indonesia sebagai sebuah negara.

15. Cara menghadapi tantangan Globalisasi

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Globalisasi merupakan sebuah realita yang mau tak mau harus dihadapi bila bangsa Indonesia ingin tetap hidup sebagai bangsa yang berdaulat di dunia.

Cara untuk menghadapi dampak globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang optimal, bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dapat bersaing di kancah dunia Internasional.

b. Meningkatkan Kualitas Nilai Keimanan dan Moralitas Masyarakat

Globalisasi membuat budaya antar bangsa saling mempengaruhi. Karenanya keberadaan nilai-nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting. Sebab nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting. Sebab nilai-nilai keimanan dan moralitas itulah yang mampu mengatasi dampak negatif dari globalisasi.

Sebagai kaum Muslim, kita hendaknya menanamkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya menjalankan syariat Islam. Mengetahui mana yang halal dan haram. Sehingga kita dapat memilah-milah pengaruh dari luar.

Moralitas bangsa juga harus ditingkatkan. Di dalam era globalisasi ini, moralitas bangsa cenderung menurun kualitasnya. Ini tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, guru, dan pemerintah. Salah satu solusinya adalah melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

c. Mendorong dan Mendukung Upaya Pemerintah Indonesia untuk Memperjuangkan Keadilan Antarbangsa

Salah satu dampak globalisasi adalah saling berkaitannya antara satu negara dengan negara lainnya. Baik dalam bentuk kerjasama ataupun persaingan global.

d. Pemerintah Indonesia harus berupaya sekuat tenaga untuk

memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antarbangsa. Upaya pemerintah tersebut harus selalu didorong dan didukung oleh setiap warga negaranya.

e. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan 1 diantara 2 negara yang memberikan permohonan agar Israel menghentikan serangan ke Jalur Gaza. Ini membuktikan kepedulian bangsa kita terhadap perdamaian dan peradilan antarbangsa. Maka sebagai warga negara, hendaknya kita mendukung upaya pemerintah.
f. Mendorong dan Mendukung Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Mendesak Negara Maju Agar Memberikan Dana Perbaikan Lingkungan Hidup

Negara maju sangat diuntungkan dengan adanya globalisasi, sebab negara maju banyak yang memiliki perusahaan transnasional. Perusahaan tersebut biasanya berdiri di berbagai negara terutama di negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Aktivitas perusahaan tersebut membuat lingkungan hidup menjadi rusak oleh pencemaran limbah atau asap pabriknya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnyalah negara-negara maju menyisihkan uang guna mendanai upaya-upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup.

Tindakan ini sangat pantas diambil oleh Indonesia, karena buktinya banyak sekali hutan yang dijadikan perindustrian. Lahan hijau pun semakin sulit ditemukan di daerah perindustrian. Untuk memulihkan keadaan, Indonesia butuh dana dari perusahaan asing tersebut.

g. Meningkatkan Jiwa dan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Nasionalisme

Adanya globalisasi menjadi suatu tantangan yang berat bagi negara berkembang yang belum maju dan kuat. Negara yang masyarakatnya tidak mempunyai jiwa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang kuat akan dengan mudah dipermainkan oleh

negara-negara maju. Oleh karena itu, semangat dan jiwa persatuan, kesatuan dan nasionalisme harus terus ditingkatkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bila jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme telah tertanam dengan kuat pada setiap warga negara Indonesia tidak akan mudah dipermainkan oleh negara-negara yang kuat dan maju.

h. Melestarikan Kebudayaan dan Adat Istiadat Daerah

Globalisasi membuat budaya luar dapat dengan mudah kita ketahui. Pengetahuan akan budaya luar terkadang membuat masyarakat lebih menyukainya daripada budaya daerah sendiri.

Menyukai kebudayaan luar adalah hal yang wajar. Namun kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita punah begitu saja seiring dengan waktu. Apalagi kebudayaan itu seenaknya saja diambil oleh bangsa lain. Betapa malunya kita?

Walaupun zaman kini telah serba modern, kita harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat. Apalagi kita sebagai masyarakat Minangkabau, dimana "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*".

i. Menjaga Keasrian Objek Wisata dalam Negeri

Salah satu ciri-ciri globalisasi adalah perjalanan dan perlancongan antarbangsa yang semakin meningkat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan objek-objek wisata yang indah hendaknya memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin. Salah satu usaha adalah menjaga keasrian objek wisata tersebut.

Sebenarnya selain Bali, banyak lagi pulau-pulau di Indonesia yang memiliki tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Namun banyak lokasi yang tidak terjaga keasriannya sehingga tidak menarik untuk dikunjungi. Maka seharusnya masyarakat selalu menjaga keasrian objek wisata di daerah masing-masing.

j. Cara-cara menjaga keasrian objek wisata dalam negeri seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-mencoret tembok, melakukan penghijauan di sekitar pegunungan, tidak membuang sampah ke sungai yang nantinya bermuara ke laut, melestarikan terumbu karang, dan sebagainya.

16. Dampak globalisasi terhadap pembentukan karakter individu

Dampak Positif

a. Perubahan Tata Nilai dan Sikap

Adanya Modernisasi dan Globalisasi dalam Budaya Menyebabkan Pergeseran Nilai dan Sikap Masyarakat yang Semua Irasional Menjadi Rasional.

b. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat Menjadi Lebih Mudah dalam Beraktivitas dan Mendorong untuk Berpikir Lebih Maju.

c. Tingkat Kehidupan yang Lebih Baik

Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dampak Negatif

a. Pola Hidup Konsumtif

Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada.

b. Sikap Individualistik

Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk

sosial.

c. Gaya Hidup Kebarat-baratan

Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.

d. Kesenjangan Sosial

Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.

Bangsa yang maju dan jaya tidak semata-mata disebabkan oleh kompetensi, teknologi canggih ataupun kekayaan alamnya, tetapi utama dan terutama karena dorongan semangat dan karakter bangsanya. Peran karakter bagi diri seorang manusia adalah ibarat kemudi bagi sebuah kapal. Karakter adalah kemudi hidup yang akan menentukan arah yang benar bahtera kehidupan seorang manusia.

Bangsa Indonesia telah membuktikan kebenaran bahwa bangsa maju dan jaya karena dorongan semangat dan karakter bangsanya, maupun kebenaran kata bijak yang mengatakan bahwa karakter adalah kemudi hidup dengan apa yang kita lihat ; 1908 menjadi Hari Kebangkitan Nasional, 1928 menjadi Hari Sumpah Pemuda,1945 Proklamasi Kemerdekaan.

Padahal, *founding fathers* kita yang pada waktu itu adalah pemuda, yang hidup di dalam negeri yang dijajah, dapat melakukan semua itu karena modalnya adalah dorongan semangat dan dimilikinya jati diri dan karakter yang ditempa dalam masa penjajahan.

Mengacu pada tata nilai yang kita pakai yang mengatakan bahwa *when character is lost everything is lost*, maka dari uraian di atas yang dapat kita simpulkan bahwa: bangsa yang didorong

oleh karakter bangsanya akan menjadi bangsa yang maju dan jaya, sedangkan bangsa yang kehilangan karakter bangsanya maka bangsa ini akan sirna dari muka bumi.

Menghadapi era globalisasi, karakter generasi muda harus lebih meningkatkan pembangunan budi pekerti dan sikap menghormati, dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus memiliki sifat menghargai mutu, memiliki kesabaran untuk meniti usaha dari awal, adanya rasa percaya diri, memiliki sikap disiplin waktu bekerja, serta memiliki sifat mengutamakan tanggung jawab

Membangun karakter bangsa harus secara nyata dan realistis. Yaitu membangun keunggulan dan daya saing, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena yang dibutuhkan bangsa ini bukan Sumber Daya Alamnya melainkan Sumber Daya Manusianya itu sendiri, karena Sumber Daya Alam yang tersedia sungguh begitu melimpahnya di bumi pertiwi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, A (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga,* Jakarta: Gramedia

Jakarta:Gramedia

Bintoro Tjokroamidjojo,(1974).Pengantar Administrasi Pembangunan, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta Barat,

F.W. Riggs, Administrasi Pembangunan, Batas-Batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembeharuan Administrasi, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

Kartono, Kartini. 2007. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rohman, Taufiq. 2005. *Sosiologi*. Jakarta: Yudhistira.

Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Sondang P. Siagian,(1978) Administrasi Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta

Edisi: 12 Jan 07 Halaman: OPINI

http://koleksi-skripsi.blogspot.com/2008/07/teori-pembentukan-karakter.html

http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=pengertian+karakter+menurut+para+ahli&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=a86637e519b879be

http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi

file:///D:/makalah_ekokes/arah-tujuan-dan-kebijakan-

pembangunan.html
file:///D:/makalah_ekokes/MAKALAH-EKONOMI-PEMBANGUNAN.htm
https://devipuspitasari.wordpress.com/pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi-di-Indonesia-dapat-diwujudkan-melalui-peningkatan-investasi-dan-perluasan-pasar/
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan
Materi Kuliah Teori dan Isu Pembangunan dari Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, MS;
Publikasi Statistik 70 tahun Indonesia Merdeka dari Badan Pusat Statistik;
Publikasi Statistik Indonesia 2015 dari Badan Pusat Statistik;
Publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2004-2009 dari Badan Pusat Statistik;
Publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2008-2013 dari Badan Pusat Statistik;
Publikasi Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2010-2014 dari Badan Pusat Statistik;
Artikel Teori Pembangunan Masyarakat dari http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/14/opini/1553516.htm;
Artikel Pembangunan Indonesia Masa Kini dari Rochmat Aldy Purnomo (www.academia.edu);
Artikel Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dari www.slideshare.net;
Dari artikel-artikel lainnya yang langsung dibaca di internet http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/774
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_terluar_Indonesia
http://anaarisanti.blogspot.com/2010/06/strategi-pembangunan-ekonomi-daerah.html

http://www.elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_Indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_Indonesia.pdf
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-eko nomi-Indonesia/
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_Indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_Indonesia.pdf
http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/06/13/minapolitan-strategi-pemerataan-pembangunan-banten/
http://marchtavaissta.wordpress.com/2012/04/20/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-Indonesia/
http://www.yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan.html
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_Indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_Indonesia.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta.

Arsyad, Lincolin (1991). Ikhtisar teori dan Soal Jawab Ekonomi Mikro, Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Alkadri, 1999. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka.

Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.

Arifin, 2003. Keterkaitan Antara Kebijakan Fiscal dengan Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah. Jurnal Ekonomi. Jakarta.

Arthur, Lewis. Teori Pertumbuhan Ekonomi. PT. raja grafindo pustaka. Jakarta.

Boediono, 1982. Pengertian Sederhana Mengenai Investasi. Jurnal Ekonomi. Jakarta. Boediono,1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE. Deliarnov, 2003, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Boediono, 2002, Ekonomi Mikro : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.

Basuki, 1997. Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia Tahun 1969-1994. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.12,2,50-65, Universitas Gajah Mada, 1997.

Becker, Gary. S. 1993. Human Capital. The University Chicago Press. Budiman 1982 dalam Endi suandi hamid 2003, Definisi

Investasi Secara Sederhana. Jakarta.
David, Richardo 2008. Teori Pertumbuhan Klasik. PT. Raja grafindo pustaka. Jakarta.
David, Richardo 1926. The Principles of Political Economy and Taxation. JM Dent & Sons, London.
David, Richardo, 2008. Teori Pertumbuhan Klasik. PT. Raja grafindo pustaka. Jakarta. Deliarnov, 1995. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta : III Press.
Dumairy, 1996. Pengertian Investasi. Ekonomi perencanaan dan pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
Dumairy (1996), Perekonomian Indonesia. Jakarta : Erlangga. Djoyohadikusumo, dalam Inna 2000. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Peningkatan Produksi. Jurnal Ekonomi. Jakarta.
Dornbush, Fischer dalam Sinardhin Thahir, 2002. Definisi dan Pengertian Investasi. Jakarta. Gerald M Meier 1985; alih bahasa oleh Sahat Simamora. Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang : Teori dan Kebijaksanaan, Jakarta : Bina Aksara.
Gerald M Meier, Robert E. Baldwin 1972; alih bahasa oleh P. Sihotang. Pembangunan Ekonomi, Jakarta : Bhratara.
Gujarati, Damodar. 1995. Basic Econometrics.Third Edition. McGraw Hill International Editions.
Gunadi Brata, Aloysius.2004. Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tk.II di Indonesia. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Gunadi, 2004. Dampak dari Cara Pemerintah Dalam Membiayai Pengeluarannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi.
Galenson, Leibenstein, 1958. Kriteria penginvestasian. Jurnal Ekonomi. Jakarta.
Grossman, G.M. dan E. Helpman. 1993. Innovation and Growth in

the Global Economy, Cambridge. the MIT Press. Halim, 2003. Pembagian Kriteria Investasi. Jurnal Makro Ekonomi. Jakarta.

Harrord, Domar, dalam Jhingan . 1975. Teori Model-Model Pertumbuhan. PT. Raja Grafindo Persada.

Harrord, Domar, 1957. Model Pertumbuhan Ekonomi. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta. Herlan, Firmansyah, (2004). Analisis Akselerasi Pendapatan Nasional Terhadap Investasi Asing di Indonesia Periode 1985-2002. Skripsi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi FPIPS UPI Bandung. Idris, 2004. Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan. Jurnal Makro Ekonomi.

Jhingan, 1996. Ekonomi pembangunan dan perencanaan. Rajawali press. Jogjakarta. Jhingan, 2000. Tujuan pokok pembangunan ekonomi. Jurnal Makro Ekonomi Jakarta.

Jhingan, dalam Sinardhin Thahir, 2002 . Definisi dari penanaman modal asing. Jurnal Makro Ekonomi. Jakarta.

Khuznets, dalam Jhingan, 1994. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kenaikan Jangka Panjang. Jurnal Ekonomi. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat., 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN Yogyakarta.

Kunarjo, dalam Hasanuddin 2003. Pentingnya Investasi Dalam Upaya Pertumbuhan. Jurnal Ekonomi. Jakarta. Kunarjo, 2000. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Jakarta, UI Press.

Mankiw, N.Gregory, 2000.Teori Makro Ekonomi.Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mankiw, 2000. Perbedaan Macam Investasi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Mankiw, N. Gregory. 2003. "Teori Makro Ekonomi". Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Airlangga. Meier, 1985. Investasi Swasta Asing. Jurnal Ekonomi. Jakarta. Paul M.

Romer The Journal of Economic Perspectives Vol. 8, No. 1 (Winter, 1994), pp. 3-22.

Robbert, Sollow, 1995. Teori Pertumbuhan Neo Klasik. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta. Romer, Paul M., 1990. Endogeneus Technological Change. Journal Of Political Economy. Rostow dan Musgrave, 1996. Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta. Ranis, Gustav. et. al. 2000. Economic Growth and Human Development. World Development Vol.28,No.2,pp.197-219.

Samuelson, 1986. Definisi Investasi. Teori Makro Ekonomi Ed.5, Jakarta: Penerbit Erlangga. Samuelson, Paul A. Nordhaus, William D. (1999) Mikro Ekonomi: Jakarta : Erlangga. Schumpeter, dalam Fatimah, 2004. PDRB Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara. Jurnal Ekonomi. Jakarta.

Sukirno, 1982 . Definisi dari Pembentukan Modal dan Investasi. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.

Sukirno, dalam Sinardhin Thahir, 2002. Pertambahan Jumlah Barang dan Modal. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.

Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

Simanjuntak Payaman J, 1998, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, dan Widyanti, 2000. Indikator-Indikator Makroekonomi ed. 2. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama, 2000. Todaro, Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.

Todaro, Michael, P. Dan Stephen C. Smith, 2006, Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan, Jakarta : Erlangga.

Todaro, Michael, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.

Edisi Ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Todaro, 1999. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.

Yuliarmi, Nyoman. 2008. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali ; Bulletin Studi Ekonomi Vo.13 No.2 Tahun 2008, Universitas Udayana Denpasar.

Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.02, Universitas Gajah Mada, 2005.